

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA SUKABUMI 2019



Sambutan :

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Kami Panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, karena atas perkenan-Nya buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi ini dapat kami susun.

Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Melalui buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran serta masukan, sehingga buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi ini dapat terselesaikan, walaupun masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan dalam penyusunannya.

Harapan kami semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera (RENYAH).

Demikian yang dapat di sampaikan,

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan”.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/8458/MD tanggal 20 Desember 2012 perihal Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Yang Diterbitkan Secara Periodik Setiap Tahun.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai data kuantitas penduduk dan kualitas penduduk di Kota Sukabumi. Data kuantitas penduduk antara lain menyajikan Jumlah dan Persebaran Penduduk, Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografis, Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial, dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Adapun data kualitas penduduk antara lain menyajikan indikator kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, dan sosial serta mobilitas penduduk.

Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran serta masukan, sehingga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi ini dapat terselesaikan.

Kami berharap semoga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi ini, dapat dijadikan sebagai sarana informasi perkembangan kependudukan yang positif, dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha.

Sukabumi, Maret 2019

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Landasan Hukum	6
1.4 Ruang Lingkup	7
1.5 Konsep dan Definisi	7
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM	15
2.1 Keadaan Geografis	15
2.2 Letak Geografis	17
2.3 Luas Wilayah	17
2.4 Visi dan Misi Kota Sukabumi	19
2.5 Visi dan Misi Kepala Daerah	19
2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	22
BAB III KUANTITAS PENDUDUK	24
3.1. Persebaran Penduduk	24
3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk	24
3.1.2 Kepadatan Penduduk (<i>Population Density</i>)	30
3.2. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografis	35
3.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin	35

	3.2.2 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	61
	3.2.3 Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	62
3.3.	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	68
	3.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	68
	3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	72
3.4.	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	78
	3.4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	78
	3.4.2 Kepemilikan KTP-el	80
	3.4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran	81
	3.4.4 Kepemilikan Akta Perkawinan	84
	3.4.5 Kepemilikan Akta Perceraian	88
BAB IV	KUALITAS PENDUDUK	92
4.1.	Indikator Kesehatan	92
	4.1.1 Kelahiran (<i>Fertilitas</i>)	92
	4.1.2 Kematian (<i>Mortalitas</i>)	94
4.2	Indikator Pendidikan	100
	4.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)	100
	4.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	100
	4.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)	105
4.3	Indikator Keluarga Berencana	109
	4.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)	109
	4.3.2 Peserta KB Aktif	111
	4.3.3 Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB	113
	4.3.4 Tahapan Keluarga	116
4.4	Indikator Tenaga Kerja	119
	4.4.1 Jumlah Pencari Kerja	119
4.5	Indikator Sosial	126
	4.5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	126

	4.6	Mobilitas Penduduk	132
	4.6.1	Angka Migrasi Masuk	132
	4.6.2	Angka Migrasi Keluar	136
	4.6.3	Angka Migrasi Netto	138
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN	140
	5.1.	Kesimpulan	140
	5.2	Saran	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi & Luas Wilayah Se-Kota Sukabumi	18
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2019	25
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2018	25
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	26
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	26
Tabel 3.5	Kepadatan Penduduk Tahun 2019	30
Tabel 3.6	Kepadatan Penduduk Tahun 2018	32
Tabel 3.7	Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2019	36
Tabel 3.8	Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2018	36
Tabel 3.9	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	39
Tabel 3.10	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	40
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	43
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	44
Tabel 3.13	Jumlah Penduduk Kecamatan Cikole Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	46
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk Kecamatan Cikole Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	46
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Kecamatan Citamiang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	48
Tabel 3.16	Jumlah Penduduk Kecamatan Citamiang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	49
Tabel 3.17	Jumlah Penduduk Kecamatan Warudoyong Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	51
Tabel 3.18	Jumlah Penduduk Kecamatan Warudoyong Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	51

Tabel 3.19	Jumlah Penduduk Kecamatan Baros Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	53
Tabel 3.20	Jumlah Penduduk Kecamatan Baros Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	54
Tabel 3.21	Jumlah Penduduk Kecamatan Lembursitu Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	56
Tabel 3.22	Jumlah Penduduk Kecamatan Lembursitu Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	57
Tabel 3.23	Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	59
Tabel 3.24	Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	59
Tabel 3.25	Rasio Ketergantungan (<i>Depedency Ratio</i>) Tahun 2019	63
Tabel 3.26	Rasio Ketergantungan (<i>Depedency Ratio</i>) Tahun 2018	64
Tabel 3.27	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2019	68
Tabel 3.28	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2018	69
Tabel 3.29	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan Tahun 2019	71
Tabel 3.30	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan Tahun 2018	71
Tabel 3.31	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir per Kecamatan Tahun 2019	73
Tabel 3.32	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir per Kecamatan Tahun 2018	73
Tabel 3.33	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019	74
Tabel 3.34	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018	74
Tabel 3.35	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Rendah Tahun 2019	76
Tabel 3.36	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Tinggi Tahun 2019	77
Tabel 3.37	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Menurut Usia Tahun 2019	77
Tabel 3.38	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2019	79
Tabel 3.39	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2018	79
Tabel 3.40	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP-el Tahun 2019	80

Tabel 3.41	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP-el Tahun 2018	81
Tabel 3.42	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019	82
Tabel 3.43	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2018	82
Tabel 3.44	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019	83
Tabel 3.45	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2018	83
Tabel 3.46	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Tahun 2019	86
Tabel 3.47	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Tahun 2018	87
Tabel 3.47	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Umur Tahun 2019	87
Tabel 3.49	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Umur Tahun 2018	88
Tabel 3.50	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan Tahun 2019	89
Tabel 3.51	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan Tahun 2018	90
Tabel 3.52	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Umur Tahun 2019	90
Tabel 3.53	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Umur Tahun 2018	91
Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Wilayah Kerja Kecamatan Di Kota Sukabumi Tahun 2019	92
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD per Kecamatan	101
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/Sederajat per Kecamatan	102
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat per Kecamatan	103
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/Sederajat per Kecamatan	104
Tabel 4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/Sederajat	106
Tabel 4.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/Sederajat	107
Tabel 4.8	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/Sederajat	107
Tabel 4.9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	109
Tabel 4.10	Data Pasangan Usia Subur (PUS)	110

Tabel 4.11	Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi	112
Tabel 4.12	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB	114
Tabel 4.13	Data Tahapan Keluarga	117
Tabel 4.14	Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2019	120
Tabel 4.15	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Tahun 2019	121
Tabel 4.16	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019	121
Tabel 4.17	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Bukan Tenaga Kerja Tahun 2019	123
Tabel 4.18	Ikhtisar Pencari Kerja yang Terdaftar Berdasarkan AK. I, Ditempatkan dan dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019	124
Tabel 4.19	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Tahun 2019	126
Tabel 4.20	Rekapitulasi Pelayanan UPT. SLRT REPEH RAPIH Tahun 2019	128
Tabel 4.21	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2019	129
Tabel 4.22	Rakapitulasi Pendataan PMKS di Kota Sukabumi Tahun 2019	131
Tabel 4.23	Migrasi Penduduk Masuk Kota Sukabumi Tahun 2019	133
Tabel 4.24	Migrasi Penduduk Masuk menurut Kelompok Umur Tahun 2019	133
Tabel 4.25	Migrasi Penduduk Masuk menurut Pekerjaan Tahun 2019	134
Tabel 4.26	Migrasi Penduduk Keluar Kota Sukabumi Tahun 2019	137
Tabel 4.27	Migrasi Penduduk Keluar menurut Alasan Kepindahan Tahun 2019	137
Tabel 4.28	Migrasi Penduduk Keluar menurut Kelompok Umur Tahun 2019	138
Tabel 4.29	Migrasi Netto Penduduk Tahun 2019	139

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2019	25
Grafik 3.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2018	25
Grafik 3.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	27
Grafik 3.4	Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	27
Grafik 3.5	Jumlah Penduduk per Kelurahan Tahun 2019	29
Grafik 3.6	Jumlah Penduduk per Kelurahan Tahun 2018	29
Grafik 3.7	Kepadatan Penduduk Tahun 2019	33
Grafik 3.8	Kepadatan Penduduk Tahun 2018	34
Grafik 3.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur umur Tahun 2019	37
Grafik 3.10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur umur Tahun 2018	38
Grafik 3.11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2019	70
Grafik 3.12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2018	70
Grafik 3.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019	75
Grafik 3.14	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018	75
Grafik 4.1	Kematian Ibu Berdasarkan Periode Meninggal Tahun 2019	96
Grafik 4.2	Kematian Ibu Berdasarkan Wilayah Kematian Tahun 2019	97
Grafik 4.3	Kematian Bayi Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2019	99
Grafik 4.4	Persentase PUS per Kecamatan Tahun 2019	111
Grafik 4.5	Peserta KB Aktif (PA/PUS) Tahun 2019	112
Grafik 4.6	PUS Bukan Peserta KB Tahun 2019	114
Grafik 4.7	Tahapan Keluarga Tahun 2019	118

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Piramida Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019	42
Diagram 3.2	Piramida Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2018	42
Diagram 3.3	Piramida Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Tahun 2019	44
Diagram 3.4	Piramida Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Tahun 2018	45
Diagram 3.5	Piramida Penduduk Kecamatan Cikole Tahun 2019	47
Diagram 3.6	Piramida Penduduk Kecamatan Cikole Tahun 2018	47
Diagram 3.7	Piramida Penduduk Kecamatan Citamiang Tahun 2019	49
Diagram 3.8	Piramida Penduduk Kecamatan Citamiang Tahun 2018	50
Diagram 3.9	Piramida Penduduk Kecamatan Warudoyong Tahun 2019	52
Diagram 3.10	Piramida Penduduk Kecamatan Warudoyong Tahun 2018	52
Diagram 3.11	Piramida Penduduk Kecamatan Baros Tahun 2019	55
Diagram 3.12	Piramida Penduduk Kecamatan Baros Tahun 2018	55
Diagram 3.13	Piramida Penduduk Kecamatan Lembursitu Tahun 2019	57
Diagram 3.14	Piramida Penduduk Kecamatan Lembursitu Tahun 2018	58
Diagram 3.15	Piramida Penduduk Kecamatan Cibeureum Tahun 2019	60
Diagram 3.16	Piramida Penduduk Kecamatan Cibeureum Tahun 2018	60

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan penduduk, peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan Nasional. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dapat dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jadi, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.
2. Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan Nasional.
3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karenanya, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25 tahun ke depan atau satu generasi.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data

perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan.

Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI Pasal 17 dinyatakan bahwa :

“Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan”.

Hadirnya Undang-Undang ini sebagai landasan dasar yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik dalam arti fisik maupun non fisik.

Lebih lanjut disebutkan dalam Bab VIII Pasal 49 :

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan pembangunan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, merupakan penjabaran amanat dari Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam *database* kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, karena masalah kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektoral. Pengintegrasian berbagai aspek kependudukan kedalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan.

Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Dalam hal ini, data kependudukan mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menentukan arah kebijakan pembangunan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan disemua tingkatan administrasi pemerintahan (kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program pembangunan.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Kependudukan bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Variabel data yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan variabel kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan ini perlu disusun dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Sukabumi dan prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang. Disisi lain penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

Kerangka pikir penyusunan profil perkembangan kependudukan mencakup 5 (lima) hal pokok bahasan, antara lain:

1. Menyajikan profil perkembangan kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung;
2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk;
3. Teridentifikasinya potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah maupun nasional;
4. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan, kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
5. Mendorong terwujudnya *database* penduduk dan analisis *database* kependudukan sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan Kota Sukabumi secara transparan dan komprehensif.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi kependudukan Kota Sukabumi sebagai salah satu informasi untuk dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
2. Sebagai bahan analisis dalam penyusunan program-program kependudukan.
3. Sebagai bahan evaluasi dan acuan pengambilan kebijakan bidang kependudukan.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
13. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/52-Disdukcapil/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi.

1.4. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan mencakup gambaran tentang ciri-ciri kependudukan Kota Sukabumi dengan segala aspek yang terkait di dalamnya berdasarkan data yang dikumpulkan pada Tahun 2019, meliputi :

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen, dan urbanisasi.
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

1.5. Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi pokok yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
3. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
5. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

7. Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
8. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
9. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
10. Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
11. Mobilitas penduduk non permanen (*circucaltion/sirkuler*) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik/nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok;
12. Penduduk musiman merupakan salah satu jenis obilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
13. Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (*commuting*) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
14. Migrasi kembali (*return migration*) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;

15. Migrasi semasa hidup (*life time migration*) adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
16. Migrasi risen (*recent migration*) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
17. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
18. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkiraan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
19. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
20. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
21. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
22. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
23. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
24. Lahir hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;

25. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
26. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
27. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
28. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah Banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
29. Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (0-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
30. Angka Kematian, Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
31. Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
32. Pengeluaran untuk makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
33. Penduduk Melek Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;

34. Buta Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang belum bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengataman dasar;
35. Angka Partisipasi Total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12,13-15,16-18, dan 19-24 tahun;
36. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
37. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Konsep dan Definisi
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1. Keadaan Geografis
- 2.2. Letak Geografis
- 2.3. Luas Wilayah
- 2.4. Visi dan Misi Kota Sukabumi
- 2.5. Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi

BAB III Kuantitas Penduduk

3.1. Persebaran Penduduk

3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

3.1.2 Kepadatan Penduduk (*Population Density*)

3.2. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

3.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

3.2.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

3.2.3 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

3.3. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

3.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

3.4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

3.4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

3.4.2 Kepemilikan KTP-el

3.4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

3.4.4 Kepemilikan Akta Perkawinan

3.4.5 Kepemilikan Akta Perceraian

BAB IV Kualitas Penduduk

4.1. Indikator Kesehatan

4.1.1 Kelahiran (*Fertilitas*)

4.1.2 Kematian (*Mortalitas*)

4.2. Indikator Pendidikan

4.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

4.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

4.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

4.3. Indikator Keluarga Berencana (KB)

4.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)

4.3.2 Peserta KB Aktif

4.3.3 Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB

4.3.4 Tahapan Keluarga

4.4.Indikator Tenaga Kerja

4.4.1 Jumlah Pencari Kerja

4.5.Indikator Sosial

4.5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4.6.Mobilitas Penduduk

4.6.1 Angka Migrasi Masuk

4.6.2 Angka Migrasi Keluar

4.6.3 Angka Migrasi Netto

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM



2.1. Keadaan Geografis

Secara historis Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur* (1914) dengan status *Gemeenteraad Van Sukabumi* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Dalam konteks perekonomian regional kala itu Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, fasilitas perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan samudera di Jakarta sehingga terjadi kegiatan ekspor-impor. Namun demikian dalam perjalanan sejarah kejayaan itu menyusut dikarenakan kesinambungan pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset yang berbasis perkebunan tidak lagi menguntungkan akibat semakin ketatnya persaingan dengan negara-negara produsen sejenis.

Memasuki era kemerdekaan dengan dibentuknya sistem pemerintahan daerah, Kota Sukabumi termasuk kedalam kategori kota kecil yang disebut sebagai Kotapraja, Kotamadya dan terakhir menjadi Kota yang memiliki areal 1.215 Ha yang terdiri dari

2 (dua) kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Kota Sukabumi mengalami perluasan menjadi 4.800,23 Ha, sehingga ada penambahan desa-desa dan kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Cibereum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros dan Gunung Puyuh yang terdiri dari 33 kelurahan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi)

Batas wilayah administrasi dan posisi Kota Sukabumi dalam Konstelasi Regional Jawa Barat berada pada posisi strategis karena berada diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya ini, merupakan salah satu kawasan andalan dari 8 kawasan andalan di Jawa Barat (RTRW Jawa Barat) yang berpotensi untuk mengembangkan agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global, serta menjadi motivator untuk memacu perkembangan wilayahnya juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah disekitarnya (*hinterland*).

Sesuai dengan kondisi obyektif yang terus berkembang, pertumbuhan kota mengarah kepada kegiatan perekonomian yang berbasis pada jasa meliputi perdagangan, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan, pertanian, hal inilah yang mendasari pemikiran untuk menetapkan visi kedepan keberadaan Kota Sukabumi ”**Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa**” yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005 – 2025.

Visi kota tersebut sejalan dengan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh UNDP yang terdiri dari komponen peningkatan kemampuan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang akan menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Letak Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat pada titik koordinat $106^{\circ} 45' 50''$ BT dan $106^{\circ} 45' 10''$ Bujur Timur, $6^{\circ} 50'44''$ Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan $0^{\circ} - 3^{\circ}$ dan $3^{\circ} - 8^{\circ}$ di bagian utara. Secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Hal ini juga membuka kesempatan kepada Kota Sukabumi untuk mengembangkan diri sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan yang merupakan visi Kota Sukabumi dengan didukung oleh tenaga profesional, kelengkapan sarana dan prasarana perekonomian, jasa pendidikan dan kesehatan berskala pelayanan regional.

2.3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kota Sukabumi adalah ± 48 Km² dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan $\pm 7,5$ Km dan dari Barat ke Timur ± 6 Km yang terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 356 Rukun Warga (RW) dan 1.548 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan tanah paling banyak dipergunakan untuk pertanian yaitu seluas 1.356 Ha dan yang paling kecil adalah penggunaan lahan untuk lain-lain seluas 275 Ha. Kecamatan Lembursitu merupakan kecamatan paling luas yaitu 8,89 Km² atau sebesar 18,52% dari luas Kota Sukabumi, sedangkan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Citamiang dengan luas 4,04 Km². Adapun luas masing- masing kecamatan di Kota Sukabumi dapat di lihat pada Table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi & Luas Wilayah se-Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah RT	Jumlah RW	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	GUNUNG PUYUH	Gunung Puyuh	0.94	44	12	9.050
		Karamat	1.11	37	9	9.169
		Sriwidari	0.95	58	14	11.444
		KarangTengah	2.50	74	16	7.843
2	CIKOLE	Cikole	0.79	36	7	7.587
		Selabatu	0.97	60	9	10.109
		Gn. Parang	0.64	35	9	6.305
		Kebonjati	0.48	55	10	15.629
		Cisarua	2.00	75	19	9.823
		Subangjaya	2.20	76	14	7.825
3	CITAMIANG	Citamiang	0.73	42	7	13.493
		Tipar	0.46	49	8	21.435
		Nanggaleng	1.20	65	13	13.986
		Gedong Pnjng	1.00	30	6	8.709
		Cikondang	0.65	41	9	13.895
4	WARU DOYONG	Warudoyong	0.43	32	5	15.326
		Nyomplong	0.52	49	9	14.048
		Dayeuhluhur	2.33	76	21	7.232
		Sukakarya	3.04	47	13	5.315
		Benteng	1.28	60	10	9.971
5	BAROS	Baros	1.79	62	18	9.828
		Jayaraksa	1.45	32	7	5.109
		Jayamekar	1.59	27	7	3.508
		SudajayaHilir	1.29	31	8	5.423
6	LEMBURSITU	Cipanengah	1.53	34	8	5.637
		Situmekar	1.54	30	8	4.107
		Lembursitu	3.22	67	21	3.710
		Cikundul	1.58	32	10	5.185
		Sindangsari	1.02	21	6	5.999
7	CIBEUREUM	Cibeureum Hilir	1.84	53	12	7.536
		Babakan	2.65	41	10	3.651
		Sindangpalay	1.65	34	7	4.655
		Limusunnggal	2.63	43	13	4.440
	JUMLAH	33	48.00	1548	356	7.270

2.4. VISI DAN MISI KOTA SUKABUMI

Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yaitu :

Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Misi Kota Sukabumi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas;
3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Aparatur Pemerintah Daerah yang Profesional dan Amanah;
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah.

2.5. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Kepala Daerah :

”Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera (RENYAH)”

Misi Kepala Daerah :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlakulkarimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial.
2. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi masuk kedalam misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada Point 4 (empat) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif”**. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa yang ditandai dengan menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan masyarakat atas kinerja pemerintahan yang tidak ditindaklanjuti dan meningkatnya kemampuan keuangan daerah dimana PAD meningkat pada setiap tahun yang diarahkan pada **”Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”**.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengertian dari :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan yaitu :

1. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib yaitu dalam melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku, tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.
2. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat yaitu : dalam melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, data yang ada dan yang diberikan itu harus benar, tidak memberikan data palsu dan tidak memanipulasi data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis yaitu : dalam melaksanakan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil data yang ada itu harus mengikuti perkembangan waktu terakhir, sehingga perubahannya kelihatan setiap waktu, apakah data yang ada itu statis atau tidak, atau misalkan dokumen yang dimiliki masih berlaku atau tidak.

Apabila sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tertib, akurat dan dinamis, maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Guna mewujudkan hal tersebut, yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Dinas;

Kemudian terdapat beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Program SIAK merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal;

3. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebarluasan informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan menindaklanjutinya. Selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang.
Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi memiliki motto pelayanan : **“Cermat, Tepat, Bersahabat”**, dengan janji pelayanan : **“Cermat** dalam penyajian data, **Tepat** waktu dalam pengurusan, **Bersahabat** dalam pelayanan”.

2.6. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menjabarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi merupakan salah satu lembaga teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

BAB III

KUANTITAS PENDUDUK

3.1. Persebaran Penduduk

Kota Sukabumi dengan luas wilayah 48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 348.945 jiwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kemendagri, tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu, dan Cibeureum.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yaitu sebanyak 344.797 jiwa, sehingga dapat dihitung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,00%.

3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah dan persebaran penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,40%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10,77%), persebaran penduduk tersebut masih sama keadaannya dengan Tahun 2018 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,51%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros

(10.75%), dan Tahun 2017 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,63%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10.57%).

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 serta Grafik 3.1 dan Grafik 3.2, di bawah ini :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2019

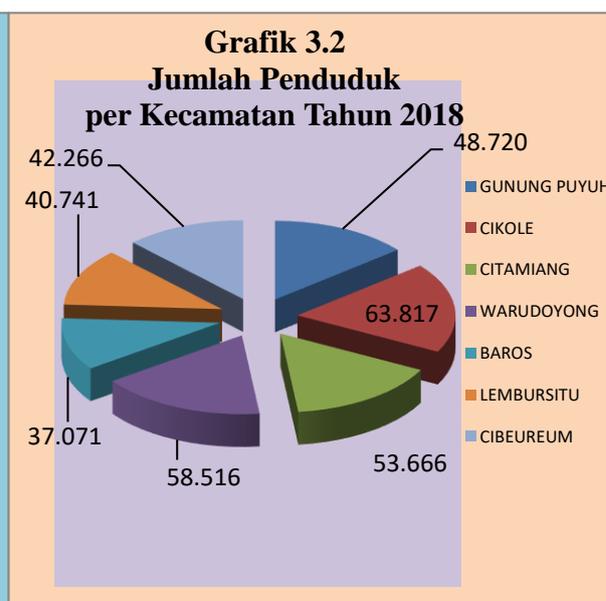
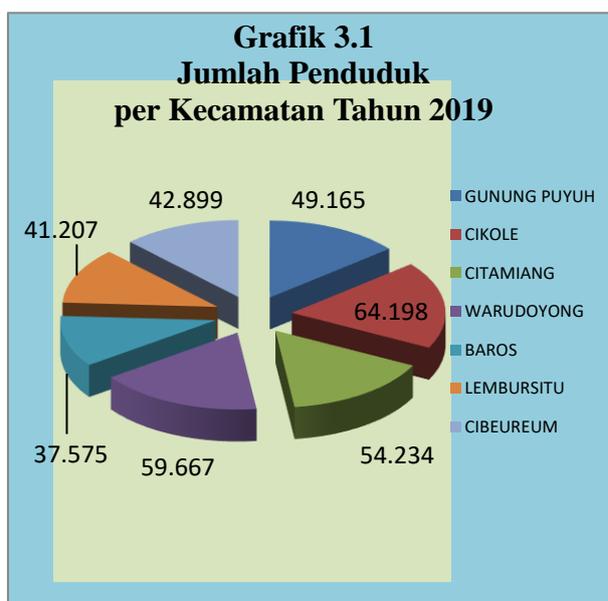
KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	%
GUNUNG PUYUH	49.165	14,09
CIKOLE	64.198	18,40
CITAMIANG	54.234	15,54
WARUDOYONG	59.667	17,10
BAROS	37.575	10,77
LEMBURSITU	41.207	11,81
CIBEUREUM	42.899	12,29
JUMLAH	348.945	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2018

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	%
GUNUNG PUYUH	48.720	14,13
CIKOLE	63.817	18,51
CITAMIANG	53.666	15,56
WARUDOYONG	58.516	16,97
BAROS	37.071	10,75
LEMBURSITU	40.741	11,82
CIBEUREUM	42.266	12,26
JUMLAH	344.797	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018



Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin, disajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan
berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019

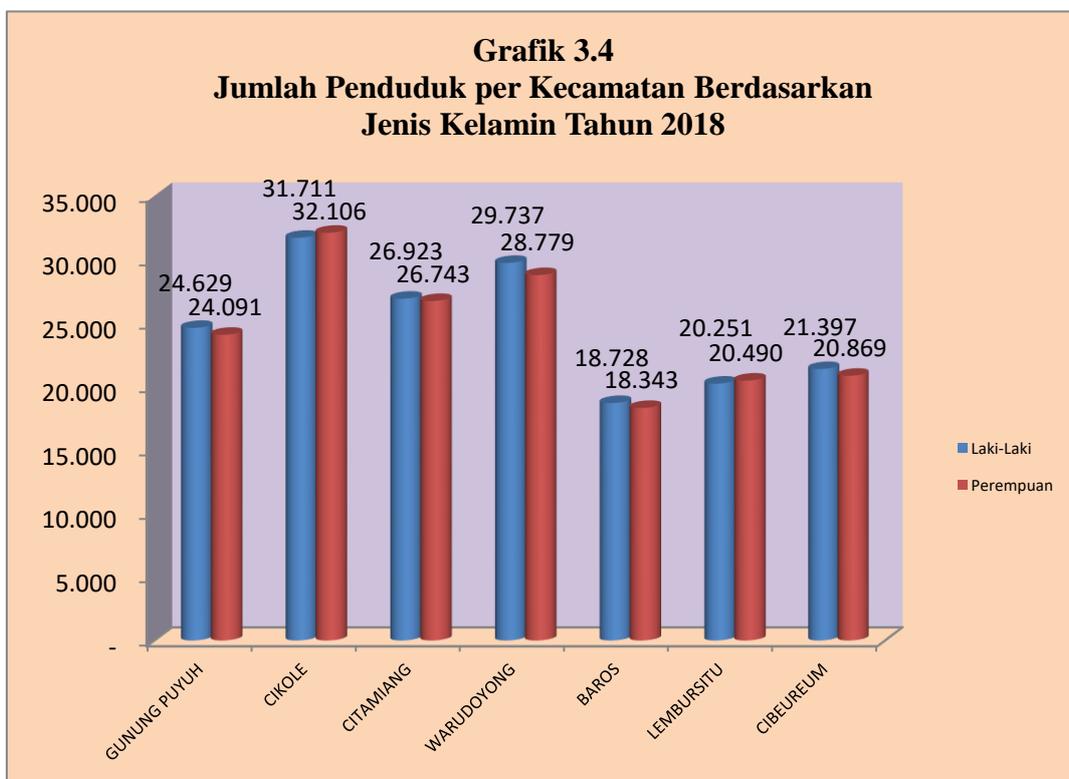
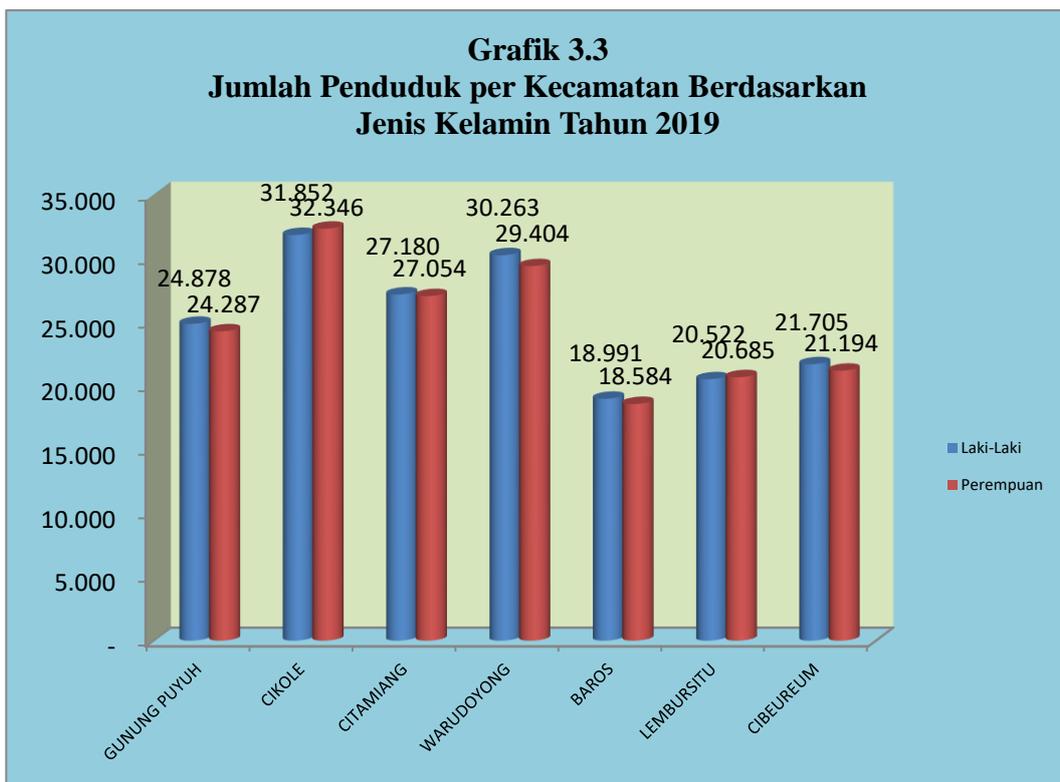
KECAMATAN	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total Jiwa	%	Jenis Kelamin Terbanyak	%
	Laki-Laki	%	Perempuan	%				
GUNUNG PUYUH	24.878	50,60	24.287	49,40	49.165	14,09	Laki-Laki	50,60
CIKOLE	31.852	49,62	32.346	50,38	64.198	18,40	Perempuan	50,38
CITAMIANG	27.180	50,12	27.054	49,88	54.234	15,54	Laki-Laki	50,12
WARUDOYONG	30.263	50,72	29.404	49,28	59.667	17,10	Laki-Laki	50,72
BAROS	18.991	50,54	18.584	49,46	37.575	10,77	Laki-Laki	50,54
LEMBURSITU	20.522	49,80	20.685	50,20	41.207	11,81	Perempuan	50,20
CIBEUREUM	21.705	50,60	21.194	49,40	42.899	12,29	Laki-Laki	50,60
JUMLAH	175.391	50,26	173.554	49,74	348.945	100		

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk per Kecamatan
berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2018

KECAMATAN	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total Jiwa	%	Jenis Kelamin Terbanyak	%
	Laki-Laki	%	Perempuan	%				
GUNUNG PUYUH	24.629	50,55	24.091	49,45	48.720	14,13	Laki-Laki	50,55
CIKOLE	31.711	49,69	32.106	50,31	63.817	18,51	Perempuan	50,31
CITAMIANG	26.923	50,17	26.743	49,83	53.666	15,56	Laki-Laki	50,17
WARUDOYONG	29.737	50,82	28.779	49,18	58.516	16,97	Laki-Laki	50,82
BAROS	18.728	50,52	18.343	49,48	37.071	10,75	Laki-Laki	50,52
LEMBURSITU	20.251	49,71	20.490	50,29	40.741	11,82	Perempuan	50,29
CIBEUREUM	21.397	50,62	20.869	49,38	42.266	12,26	Laki-Laki	50,62
JUMLAH	173.376	50,28	171.421	49,72	344.797	100		

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

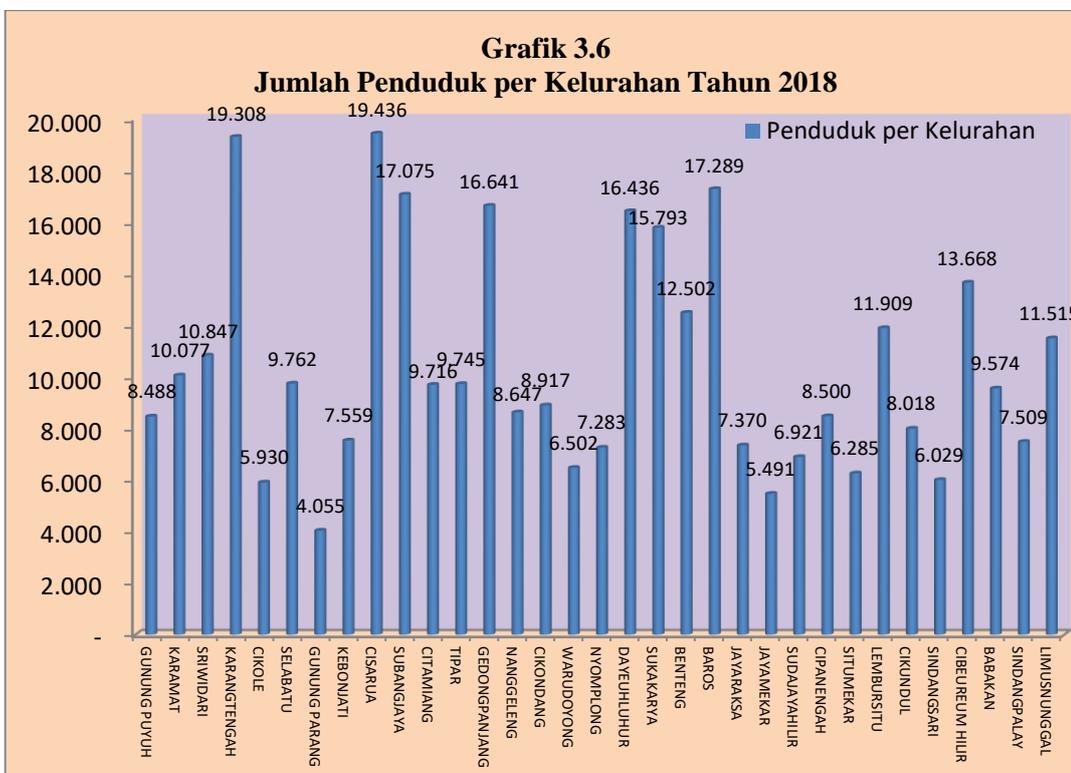
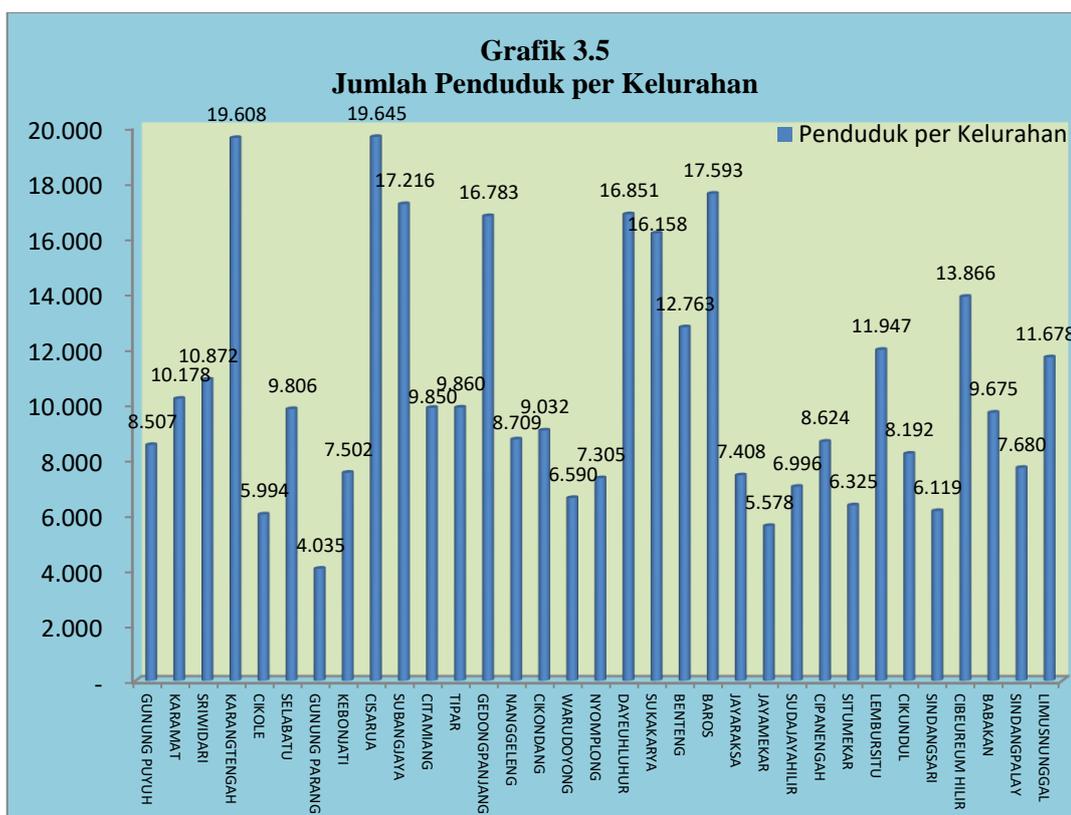


Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 sebanyak 348.945 jiwa terdiri dari 175.391 jiwa laki-laki (50,28%) dan 173.554 jiwa perempuan (49,74%). Apabila dilihat jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2018 sebanyak 344.797 jiwa terdiri dari 173.376 jiwa laki-laki (50,28%) dan 171.421 jiwa perempuan (49,72%). Hal ini berarti bahwa penduduk Kota Sukabumi di atas 50% berjenis kelamin laki-laki.

Sedangkan jika kita lihat Grafik 3.3 per kecamatan menunjukkan jumlah yang bervariasi, yaitu :

- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Puyuh lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,60%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Cikole lebih banyak berjenis kelamin perempuan (50,38%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Citamiang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,12%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Warudoyong lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,72%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Baros lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,54%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Lembursitu lebih banyak berjenis kelamin perempuan (50,20%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Cibeureum lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,60%)

Jumlah Penduduk per kelurahan disajikan pada Grafik 3.5 di bawah ini :



Dari Tabel 3.5 dan Grafik 3.5, terlihat bahwa Penduduk Kota Sukabumi per 31 Desember 2019 yang terbanyak berada di wilayah Kelurahan Cisarua 19.645 jiwa, disusul Kelurahan Karang Tengah sebanyak 19.608 jiwa, sedangkan yang terkecil berada di wilayah Kelurahan Gunung Parang sebanyak 4.035 jiwa, disusul Kelurahan Jayamekar sebanyak 5.491 jiwa.

3.1.2 Kepadatan Penduduk (*Population Density*)

Kepadatan penduduk disuatu daerah menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk dengan luas daerah yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk per km². Kepadatan penduduk berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah.

Rasio kepadatan penduduk ini dapat menggambarkan distribusi penduduk yang terkonsentrasi di suatu tempat dan memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan ini misalnya dengan membuat program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk.

Kepadatan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 348.945 jiwa dibandingkan Luas Wilayah 48 km² adalah 7.270 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 7.270 s.d 7.271 jiwa. Apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Tahun 2018 adalah 7.183 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 7.183 s.d 7.184 jiwa dan kepadatan penduduk Tahun 2017 adalah 6.997 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.997 s.d 6.998 jiwa, terjadi peningkatan kepadatan penduduk sebanyak 87 jiwa yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 serta Grafik 3.7 dan Grafik 3.8 di bahwa ini :

Tabel 3.5
Kepadatan Penduduk Tahun 2019

KECAMATAN/ KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (jiwa/Km2)	Rangking
GUNUNG PUYUH	49.165	5,5	8.939	
GUNUNG PUYUH	8.507	0,94	9.050	14
KARAMAT	10.178	1,11	9.169	13
SRIWIDARI	10.872	0,95	11.444	8
KARANGTENGAH	19.608	2,5	7.843	17

CIKOLE	64.198	7,08	9.068	
CIKOLE	5.994	0,79	7.587	18
SELABATU	9.806	0,97	10.109	9
GUNUNG PARANG	4.035	0,64	6.305	21
KEBONJATI	7.502	0,48	15.629	2
CISARUA	19.645	2	9.823	12
SUBANGJAYA	17.216	2,2	7.825	16
CITAMIANG	54.234	4,04	13.424	
CITAMIANG	9.850	0,73	13.493	7
TIPAR	9.860	0,46	21.435	1
GEDONGPANJANG	16.783	1,2	13.986	5
NANGGELENG	8.709	1	8.709	15
CIKONDANG	9.032	0,65	13.895	6
WARUDOYONG	59.667	7,6	7.851	
WARUDOYONG	6.590	0,43	15.326	3
NYOMPLONG	7.305	0,52	14.048	4
DAYEUHLUHUR	16.851	2,33	7.232	20
SUKAKARYA	16.158	3,04	5.315	25
BENTENG	12.763	1,28	9.971	10
BAROS	37.575	6,12	6.140	
BAROS	17.593	1,79	9.828	11
JAYARAKSA	7.408	1,45	5.109	26
JAYAMEKAR	5.578	1,59	3.508	33
SUDAJAYAHILIR	6.996	1,29	5.423	24
LEMBURSITU	41.207	8,89	4.635	
CIPANENGAH	8.624	1,53	5.637	23
SITUMEKAR	6.325	1,54	4.107	30
LEMBURSITU	11.947	3,22	3.710	31
CIKUNDUL	8.192	1,58	5.185	27
SINDANGSARI	6.119	1,02	5.999	22
CIBEUREUM	42.899	8,77	4.892	
CIBEUREUM HILIR	13.866	1,84	7.536	19
BABAKAN	9.675	2,65	3.651	32
SINDANGPALAY	7.680	1,65	4.655	28
LIMUSNUNGGAL	11.678	2,63	4.440	29
JUMLAH	348.945	48	7.270	

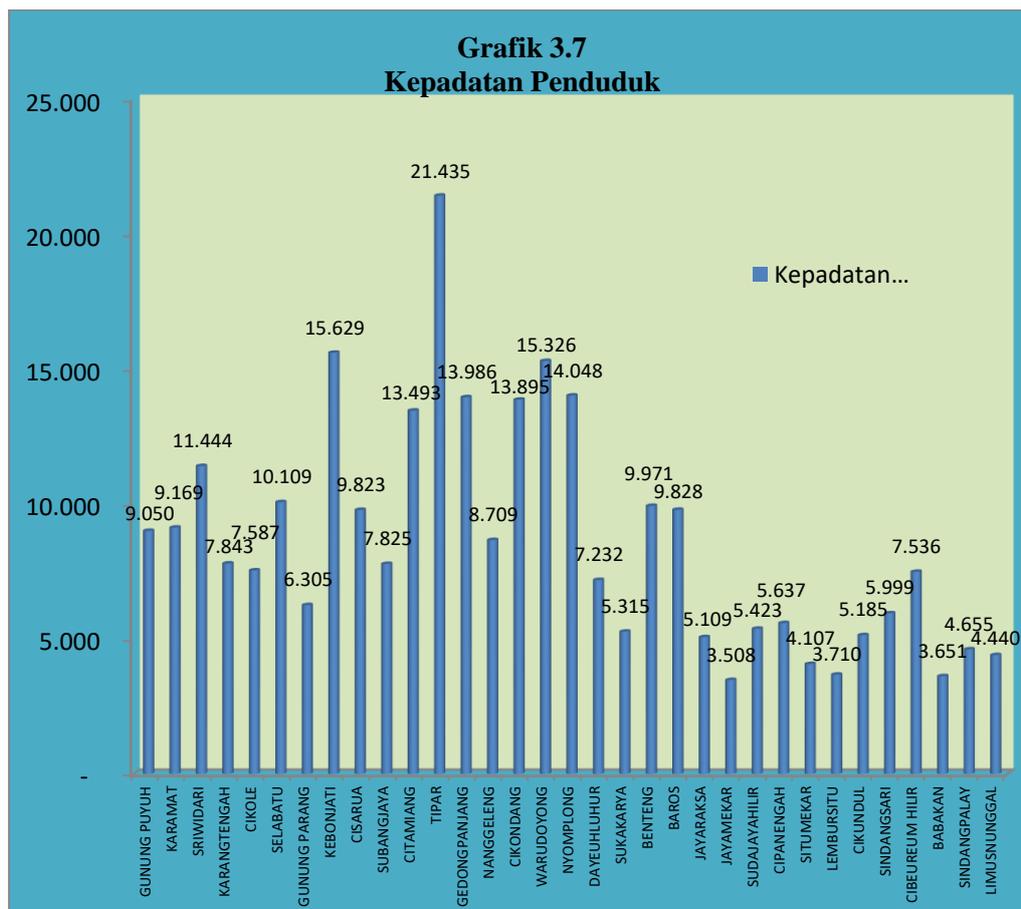
Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

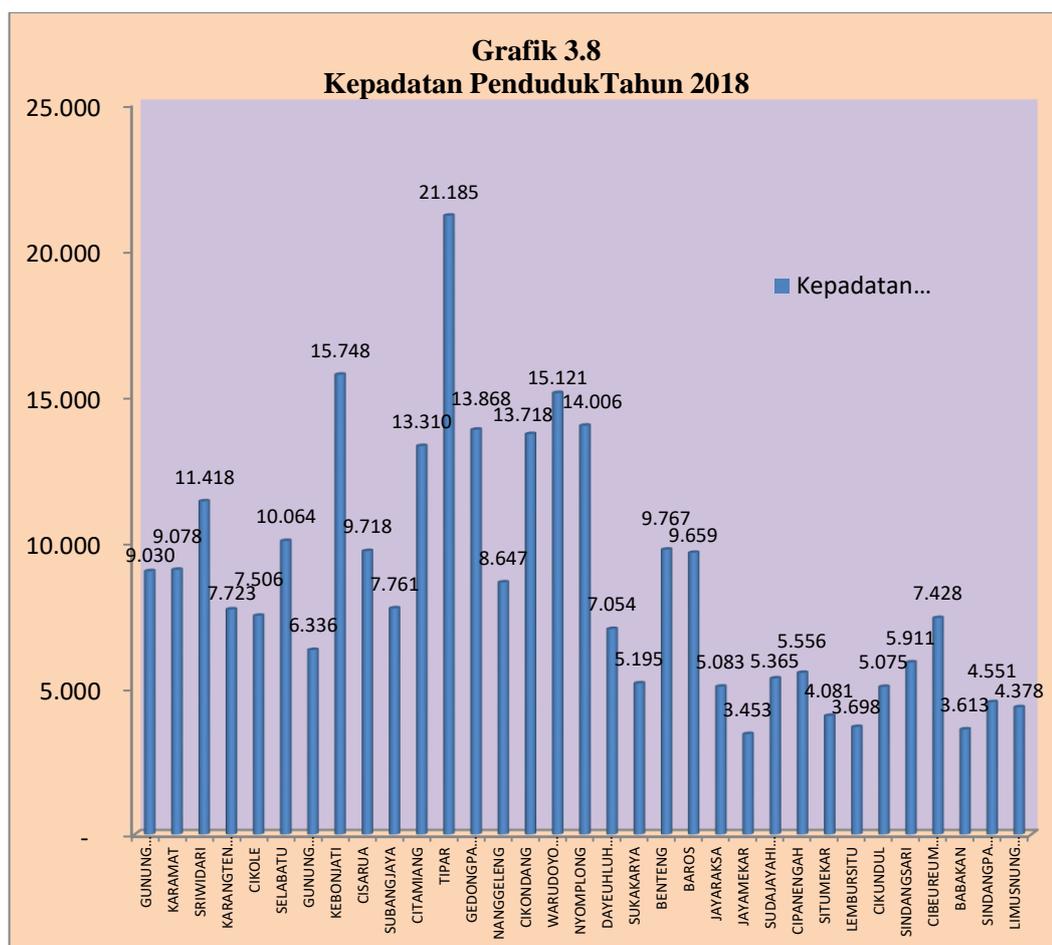
Tabel 3.6
Kepadatan Penduduk Tahun 2018

KECAMATAN/ KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (jiwa/Km ²)	Rangking
GUNUNG PUYUH	48.720	5,5	8.858	
GUNUNG PUYUH	8.488	0,94	9.030	14
KARAMAT	10.077	1,11	9.078	13
SRIWIDARI	10.847	0,95	11.418	8
KARANGTENGAH	19.308	2,5	7.723	17
CIKOLE	63.817	7,08	9.014	
CIKOLE	5.930	0,79	7.506	18
SELABATU	9.762	0,97	10.064	9
GUNUNG PARANG	4.055	0,64	6.336	21
KEBONJATI	7.559	0,48	15.748	2
CISARUA	19.436	2	9.718	11
SUBANGJAYA	17.075	2,2	7.761	16
CITAMIANG	53.666	4,04	13.284	
CITAMIANG	9.716	0,73	13.310	7
TIPAR	9.745	0,46	21.185	1
GEDONGPANJANG	16.641	1,2	13.868	5
NANGGELENG	8.647	1	8.647	15
CIKONDANG	8.917	0,65	13.718	6
WARUDOYONG	58.516	7,6	7.699	
WARUDOYONG	6.502	0,43	15.121	3
NYOMPLONG	7.283	0,52	14.006	4
DAYEUHLUHUR	16.436	2,33	7.054	20
SUKAKARYA	15.793	3,04	5.195	25
BENTENG	12.502	1,28	9.767	10
BAROS	37.071	6,12	6.057	
BAROS	17.289	1,79	9.659	12
JAYARAKSA	7.370	1,45	5.083	26
JAYAMEKAR	5.491	1,59	3.453	33
SUDAJAYAHILIR	6.921	1,29	5.365	24
LEMBURSITU	40.741	8,89	4.583	
CIPANENGAH	8.500	1,53	5.556	23
SITUMEKAR	6.285	1,54	4.081	30
LEMBURSITU	11.909	3,22	3.698	31
CIKUNDUL	8.018	1,58	5.075	27
SINDANGSARI	6.029	1,02	5.911	22

CIBEUREUM	42.266	8,77	4.819	
CIBEUREUM HILIR	13.668	1,84	7.428	19
BABAKAN	9.574	2,65	3.613	32
SINDANGPALAY	7.509	1,65	4.551	28
LIMUSNUNGGAL	11.515	2,63	4.378	29
JUMLAH	344.797	48	7.183	

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018





Kemudian apabila dilihat kepadatan wilayah per kecamatan Tahun 2019, maka kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Citamiang yaitu 13.424, disusul Kecamatan Cikole yaitu 9.068, lalu Kecamatan Gunung Puyuh yaitu 8.939, dan Kecamatan Warudoyong yaitu 7.851. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Lembursitu yaitu 4.635, disusul dengan Kecamatan Cibeureum yaitu 4.892, dan Kecamatan Baros yaitu 6.140.

Untuk kelurahan yang paling padat Tahun 2019 adalah Kelurahan Tipar yaitu 21.435, kemudian Kelurahan Kebonjati yaitu 15.629, lalu Kelurahan Warudoyong yaitu 15.326, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Jayamekar yaitu 3.508, dan Kelurahan Babakan yaitu 3.651.

Hal tersebut masih sama kepadatan penduduknya dengan Tahun 2018, maka kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Citamiang yaitu 13.284, disusul Kecamatan Cikole yaitu 9.014 lalu Kecamatan Gunung Puyuh yaitu 8.858, dan Kecamatan Warudoyong yaitu 7.699. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Lembursitu yaitu 4.583, disusul dengan Kecamatan Cibeureum yaitu 4.819, dan Kecamatan Baros yaitu 6.057.

Begitu juga dengan kelurahan yang paling padat penduduknya Tahun 2018 adalah Kelurahan Tipar yaitu 21.185, kemudian Kelurahan Kebonjati yaitu 15.748, lalu Kelurahan Warudoyong yaitu 15.121, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Jayamekar yaitu 3.453, dan Kelurahan Babakan yaitu 3.613.

3.2. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

3.2.1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. seperti misalnya masalah angkatan kerja, penyediaan sarana pendidikan dan lain sebagainya. Karakteristik penduduk paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau sering disebut dengan struktur umur dan jenis kelamin. Indikator karakteristik penduduk adalah Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*), Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk.

a. Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur.

Penduduk di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tergolong ke dalam kategori penduduk “Muda”. Sebaliknya sebagian besar negara-negara maju mempunyai penduduk “Tua”. Dibanyak negara berkembang hampir separuh dari penduduknya adalah di bawah 15 tahun dan kurang dari 3% yang berumur 65 tahun atau lebih. Dibanyak negara maju, kurang dari 30% penduduknya berumur kurang dari 15 tahun dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih.

Tabel 3.7
Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2019

Golongan Umur	Total (Jiwa)	Keterangan	Komposisi Total	%
0-4	28.612	PENDUDUK MUDA	90.523	25,94
5-9	31.366			
10-14	30.545			
15-19	26.844	PENDUDUK PRODUKTIF	235.521	67,50
20-24	28.761			
25-29	27.694			
30-34	26.056			
35-39	28.428			
40-44	25.255			
45-49	22.368			
50-54	20.541			
55-59	16.552			
60-64	13.022			
65-69	9.507	PENDUDUK TUA	22.901	6,56
70-74	6.301			
>75	7.093			
JUMLAH			348.945	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

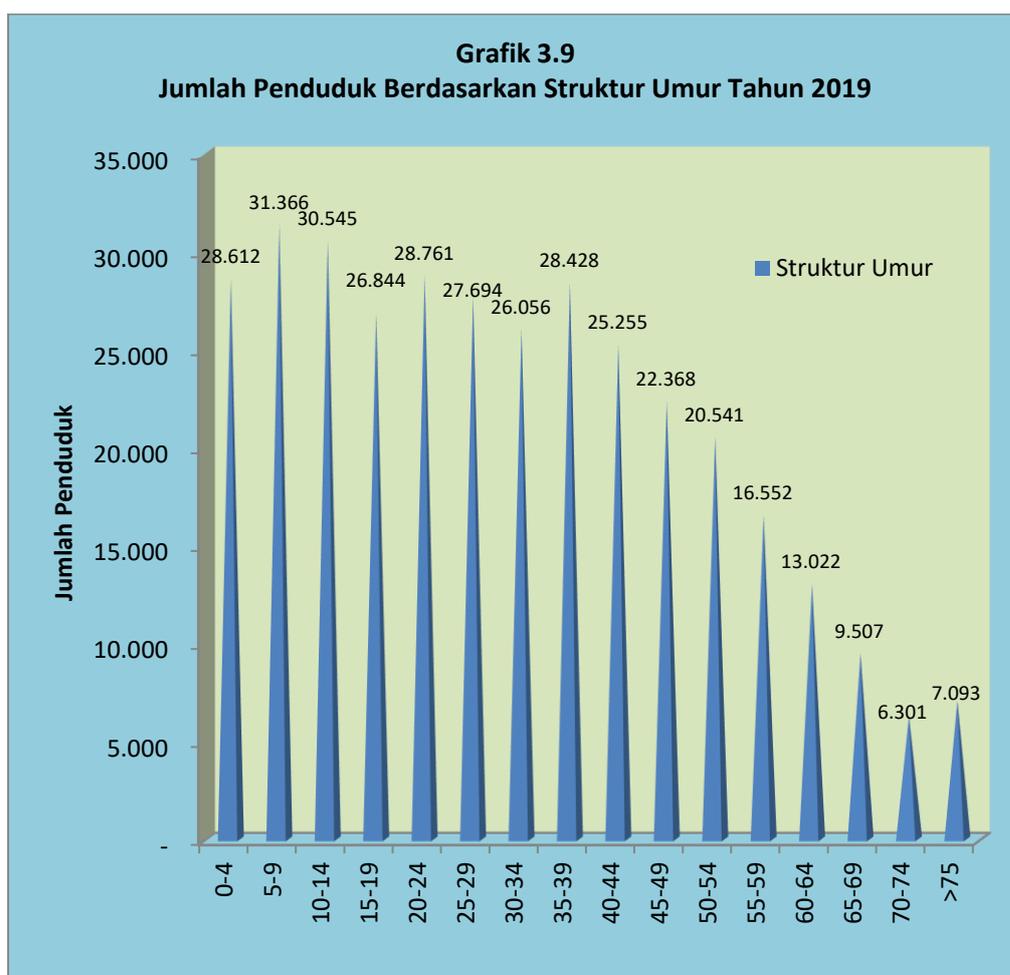
Tabel 3.8
Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2018

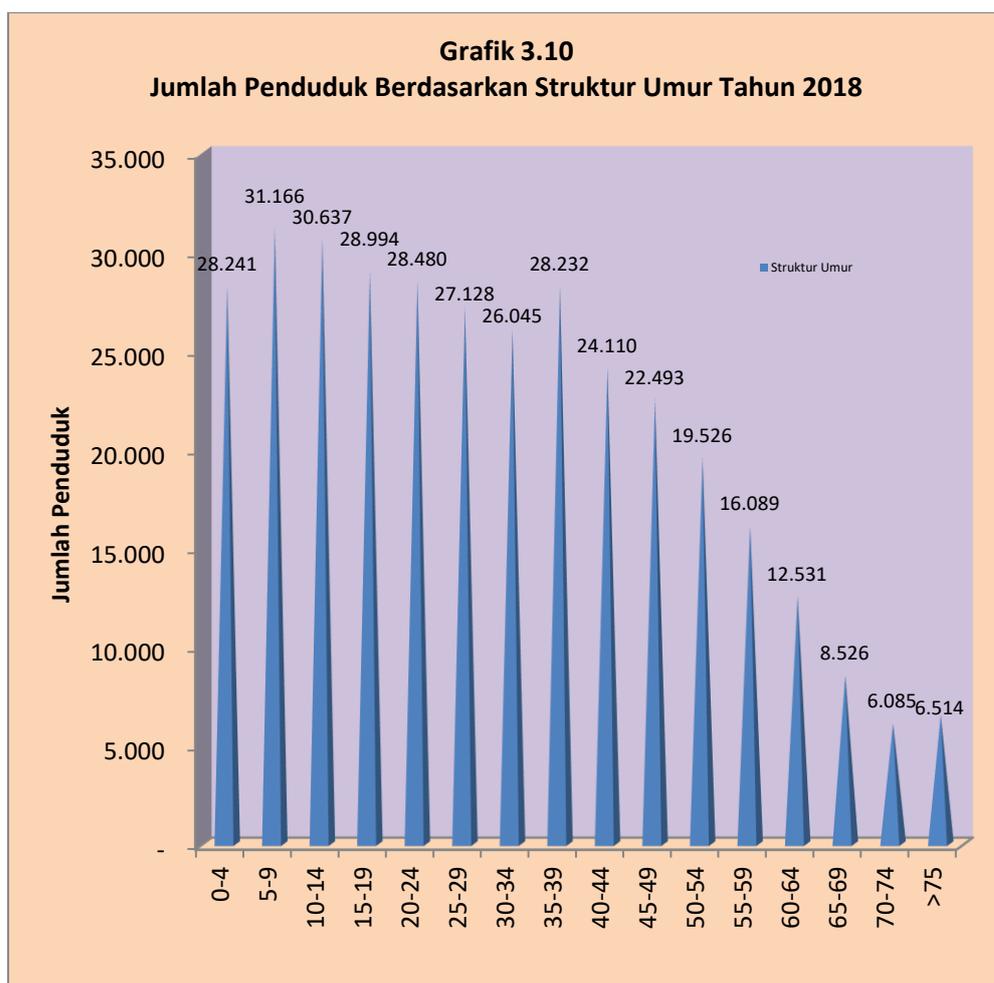
Golongan Umur	Total (Jiwa)	Keterangan	Komposisi Total	%
0-4	28.241	PENDUDUK MUDA	90.044	26,12
5-9	31.166			
10-14	30.637			
15-19	28.994	PENDUDUK PRODUKTIF	233.628	67,76
20-24	28.480			
25-29	27.128			
30-34	26.045			
35-39	28.232			
40-44	24.110			
45-49	22.493			
50-54	19.526			
55-59	16.089			
60-64	12.531			
65-69	8.526	PENDUDUK TUA	21.125	6,13
70-74	6.085			
>75	6.514			
JUMLAH			344.797	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Kalau kita lihat Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kota Sukabumi tergolong Penduduk Produktif. Data Tahun 2019 menunjukkan sebesar 67,50% (Kota Maju bukan Kota Berkembang) karena kurang dari 30% penduduk Kota Sukabumi berumur <15 tahun (Penduduk Muda) yaitu 25,4% dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih yaitu 6,56%.

Hal tersebut masih sama dengan data penduduk Tahun 2018 menunjukkan sebesar 67,76% (Kota Maju bukan Kota Berkembang) karena kurang dari 30% penduduk Kota Sukabumi berumur <15 tahun (Penduduk Muda) yaitu 26,12% dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih yaitu 6,13%.





Jika dilihat Grafik 3.9, maka jumlah penduduk tertinggi Kota Sukabumi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 31.366 jiwa, disusul kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 30.545 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 6.301 jiwa, disusul kelompok umur 75 tahun ke atas sebanyak 7.093 jiwa.

b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin menggambarkan jumlah penduduk untuk kelompok umur tertentu dan jenis kelamin yang dikaitkan dengan perencanaan pembangunan yang diarahkan sesuai dengan kebutuhan penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan (subyek dan obyek pembangunan).

Informasi penduduk berdasarkan umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Jumlah dan Proporsi Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2019

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	14,845	8.76	13,767	8.27	28,612	8.20	107.83
5-9	16,226	9.58	15,140	9.09	31,366	8.99	107.17
10-14	15,730	9.29	14,815	8.90	30,545	8.75	106.18
15-19	13,808	8.15	13,036	7.83	26,844	7.69	105.92
20-24	14,464	8.54	14,297	8.59	28,761	8.24	101.17
25-29	13,875	8.19	13,819	8.30	27,694	7.94	100.41
30-34	13,265	7.83	12,791	7.68	26,056	7.47	103.71
35-39	14,183	8.37	14,245	8.56	28,428	8.15	99.56
40-44	12,654	7.47	12,601	7.57	25,255	7.24	100.42
45-49	11,051	6.52	11,317	6.80	22,368	6.41	97.65
50-54	9,992	5.90	10,549	6.34	20,541	5.89	94.72
55-59	8,162	4.82	8,390	5.04	16,552	4.74	97.28
60-64	6,405	3.78	6,617	3.97	13,022	3.73	96.80
65-69	4,726	2.79	4,781	2.87	9,507	2.72	98.85
70-75	2,836	1.67	3,465	2.08	6,301	1.81	81.85
>75	3,169	1.87	3,924	2.36	7,093	2.03	80.76
JUMLAH	169,392	100	166,474	100	348,945	100	101.75

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.10
Jumlah dan Proporsi Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2018

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	14,729	8.70	13,512	8.12	28,241	8.19	109.01
5-9	16,112	9.51	15,054	9.04	31,166	9.04	107.03
10-14	15,781	9.32	14,856	8.92	30,637	8.89	106.23
15-19	14,873	8.78	14,121	8.48	28,994	8.41	105.33
20-24	14,260	8.42	14,220	8.54	28,480	8.26	100.28
25-29	13,529	7.99	13,599	8.17	27,128	7.87	99.49
30-34	13,244	7.82	12,801	7.69	26,045	7.55	103.46
35-39	14,083	8.31	14,149	8.50	28,232	8.19	99.53
40-44	12,070	7.13	12,040	7.23	24,110	6.99	100.25
45-49	11,035	6.51	11,458	6.88	22,493	6.52	96.31
50-54	9,668	5.71	9,858	5.92	19,526	5.66	98.07
55-59	7,922	4.68	8,167	4.91	16,089	4.67	97.00
60-64	6,158	3.64	6,373	3.83	12,531	3.63	96.63
65-69	4,262	2.52	4,264	2.56	8,526	2.47	99.95
70-75	2,693	1.59	3,392	2.04	6,085	1.76	79.39
>75	2,957	1.75	3,557	2.14	6,514	1.89	83.13
JUMLAH	169,392	100	166,474	100	344,797	100	101.75

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Dari Tabel 3.9 di atas, dilihat dari struktur umur penduduk Kota Sukabumi per 31 Desember 2019, pada struktur umur muda (0-14 tahun), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 31.366 jiwa (8,99%) diikuti kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 30.545 jiwa (8,75%). Proporsi struktur umur tersebut masih sama keadaannya dengan Tahun 2018, pada struktur umur muda (0-14 tahun), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 31.166 jiwa (9,04%) diikuti kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 30.637 jiwa (8,99%).

Informasi ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan yaitu penyediaan sarana dan prasarana pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD).

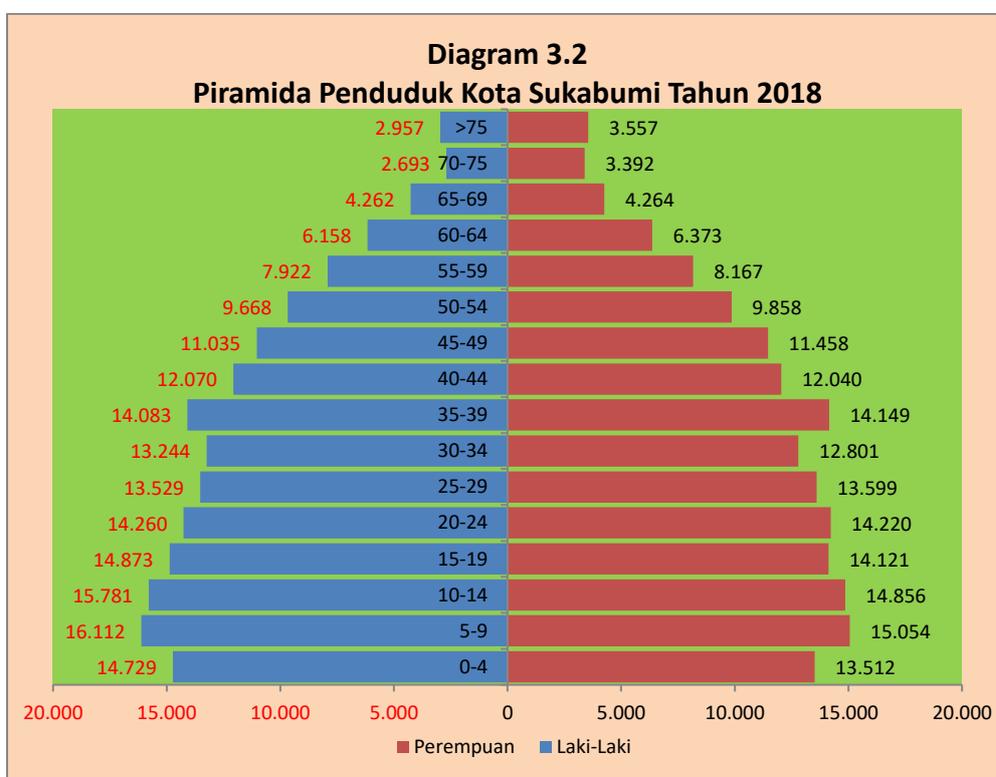
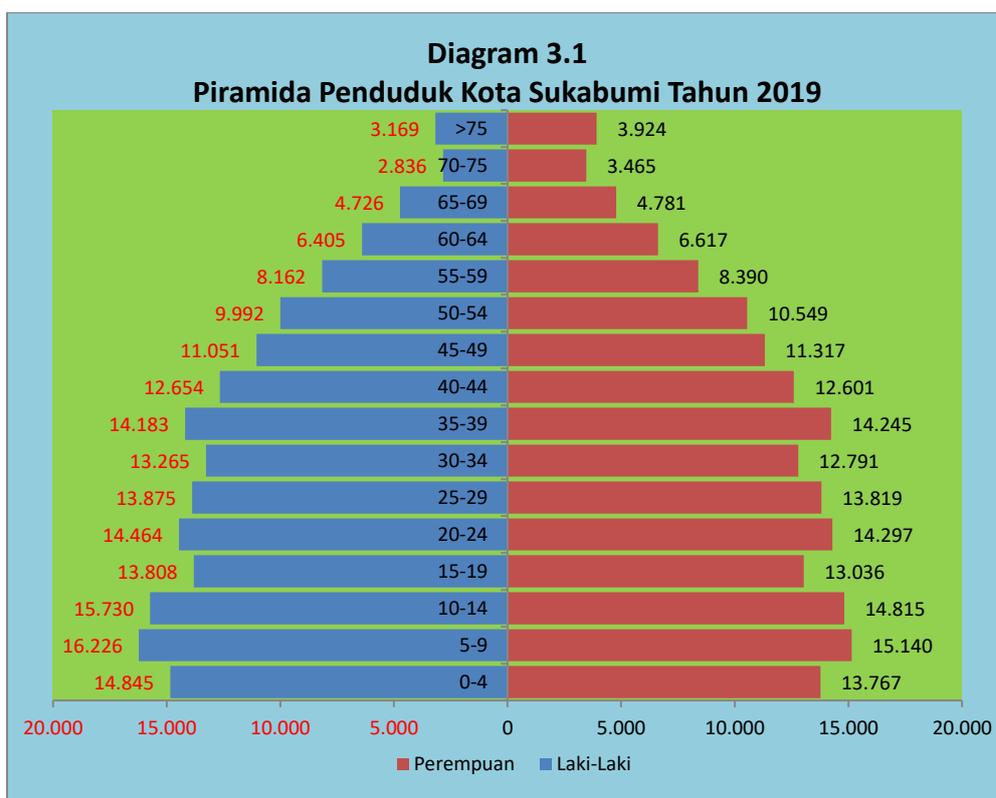
Pada Tahun 2019 Kelompok Umur Produktif (15-64 tahun), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 28.761 jiwa (8,24%), diikuti kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 28.48 jiwa (8,15%), sedangkan pada Tahun 2018 proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 28.994 jiwa (8,41%), diikuti kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 28.480 jiwa (8,26%).

Data ini memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Sukabumi dalam kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja. Pemerintah Kota Sukabumi akan memperoleh keuntungan yang besar, jika penduduk usia produktif ini semuanya bisa memperoleh pekerjaan.

Pada Tahun 2019 Kelompok Umur Tua (65 tahun ke atas), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 9.507 jiwa (2,72%), sedangkan Tahun 2018 proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 8.526 jiwa (2,47%).

c. Piramida Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk. Badan piramida sebelah kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki, sedangkan badan piramida sebelah kanan menunjukkan banyaknya penduduk perempuan.



Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan penduduk masa yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian, dan migrasi masa lalu dan selanjutnya. Struktur umur penduduk saat ini menentukan perkembangan penduduk masa yang akan datang. Dengan piramida ini, nampak jelas badan piramida menggelembung di tengah yang berarti bahwa penduduk Kota Sukabumi adalah penduduk produktif.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci per kecamatan, akan disajikan tabel dan piramidanya.

Tabel 3.11
Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2019

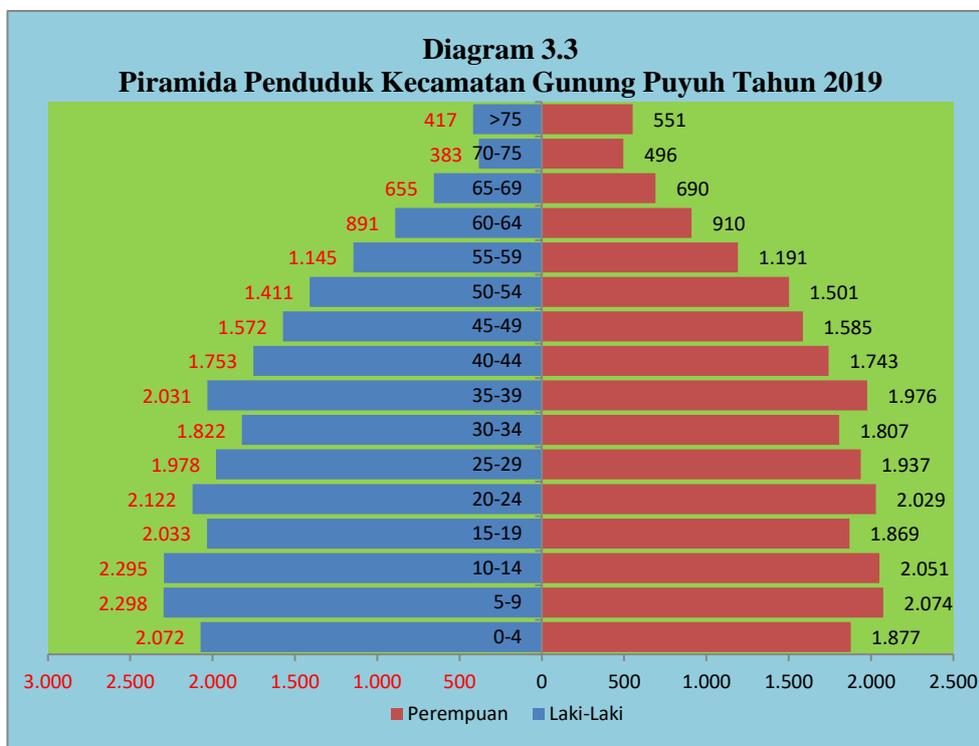
Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.072	8,33	1.877	7,73	3.949	8,03	110,39
5-9	2.298	9,24	2.074	8,54	4.372	8,89	110,80
10-14	2.295	9,23	2.051	8,44	4.346	8,84	111,90
15-19	2.033	8,17	1.869	7,70	3.902	7,94	108,77
20-24	2.122	8,53	2.029	8,35	4.151	8,44	104,58
25-29	1.978	7,95	1.937	7,98	3.915	7,96	102,12
30-34	1.822	7,32	1.807	7,44	3.629	7,38	100,83
35-39	2.031	8,16	1.976	8,14	4.007	8,15	102,78
40-44	1.753	7,05	1.743	7,18	3.496	7,11	100,57
45-49	1.572	6,32	1.585	6,53	3.157	6,42	99,18
50-54	1.411	5,67	1.501	6,18	2.912	5,92	94,00
55-59	1.145	4,60	1.191	4,90	2.336	4,75	96,14
60-64	891	3,58	910	3,75	1.801	3,66	97,91
65-69	655	2,63	690	2,84	1.345	2,74	94,93
70-75	383	1,54	496	2,04	879	1,79	77,22
>75	417	1,68	551	2,27	968	1,97	75,68
JUMLAH	24.878	50,60	24.287	49,40	49.165	100	102,43

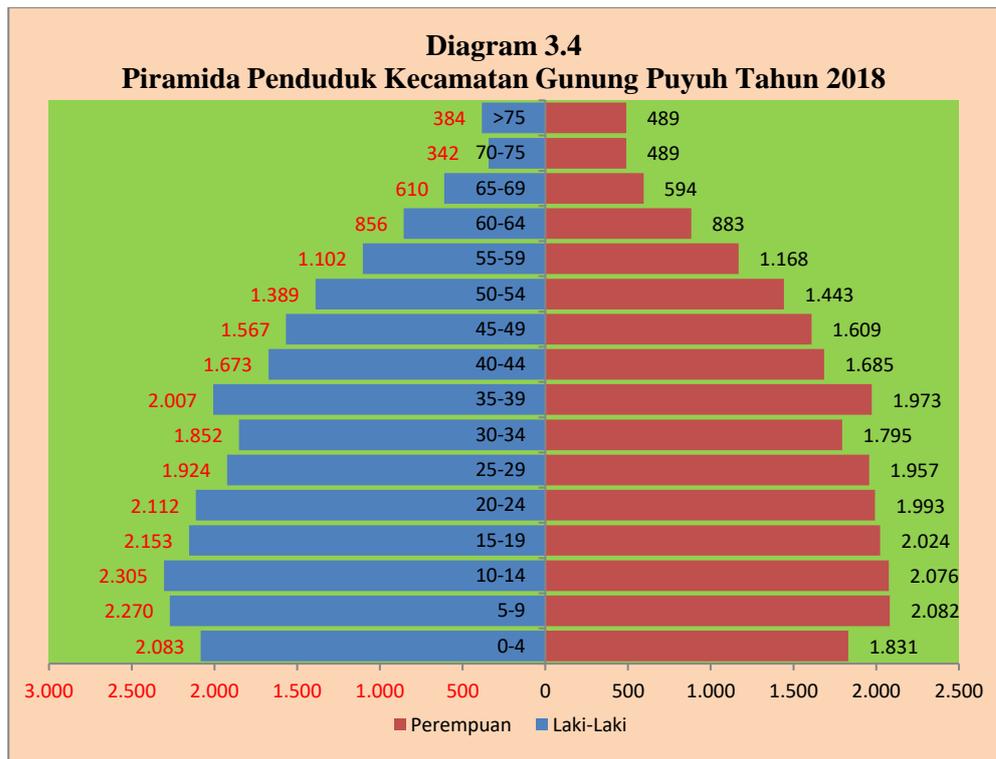
Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2018

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.083	8,46	1.831	7,60	3.914	8,03	113,76
5-9	2.270	9,22	2.082	8,64	4.352	8,93	109,03
10-14	2.305	9,36	2.076	8,62	4.381	8,99	111,03
15-19	2.153	8,74	2.024	8,40	4.177	8,57	106,37
20-24	2.112	8,58	1.993	8,27	4.105	8,43	105,97
25-29	1.924	7,81	1.957	8,12	3.881	7,97	98,31
30-34	1.852	7,52	1.795	7,45	3.647	7,49	103,18
35-39	2.007	8,15	1.973	8,19	3.980	8,17	101,72
40-44	1.673	6,79	1.685	6,99	3.358	6,89	99,29
45-49	1.567	6,36	1.609	6,68	3.176	6,52	97,39
50-54	1.389	5,64	1.443	5,99	2.832	5,81	96,26
55-59	1.102	4,47	1.168	4,85	2.270	4,66	94,35
60-64	856	3,48	883	3,67	1.739	3,57	96,94
65-69	610	2,48	594	2,47	1.204	2,47	102,69
70-75	342	1,39	489	2,03	831	1,71	69,94
>75	384	1,56	489	2,03	873	1,79	78,53
JUMLAH	24.629	50,55	24.091	49,45	48.720	100	102,23

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018





Jika kita lihat Tabel 3.11 dan Diagram 3.3 tergambar bahwa penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Tahun 2019, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 4.372 jiwa (8,89%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.298 jiwa (9,24%) dan perempuan 2.074 jiwa (8,54%) sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 879 jiwa (1,79%) terdiri dari laki-laki sejumlah 383 jiwa (1,54%) dan perempuan 496 jiwa (2,04%).

Proporsi tersebut berbeda dengan Tahun 2018, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 4.381 jiwa (8,99%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.305 jiwa (9,36%) dan perempuan 2.076 jiwa (8,62%) sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 831 jiwa (1,71%) terdiri dari laki-laki sejumlah 342 jiwa (1,39%) dan perempuan 489 jiwa (2,03%). Pada umumnya penduduk Kecamatan Gunung Puyuh lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, namun pada umur 70 tahun ke atas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Tabel 3.13
Jumlah Penduduk Kecamatan Cikole
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

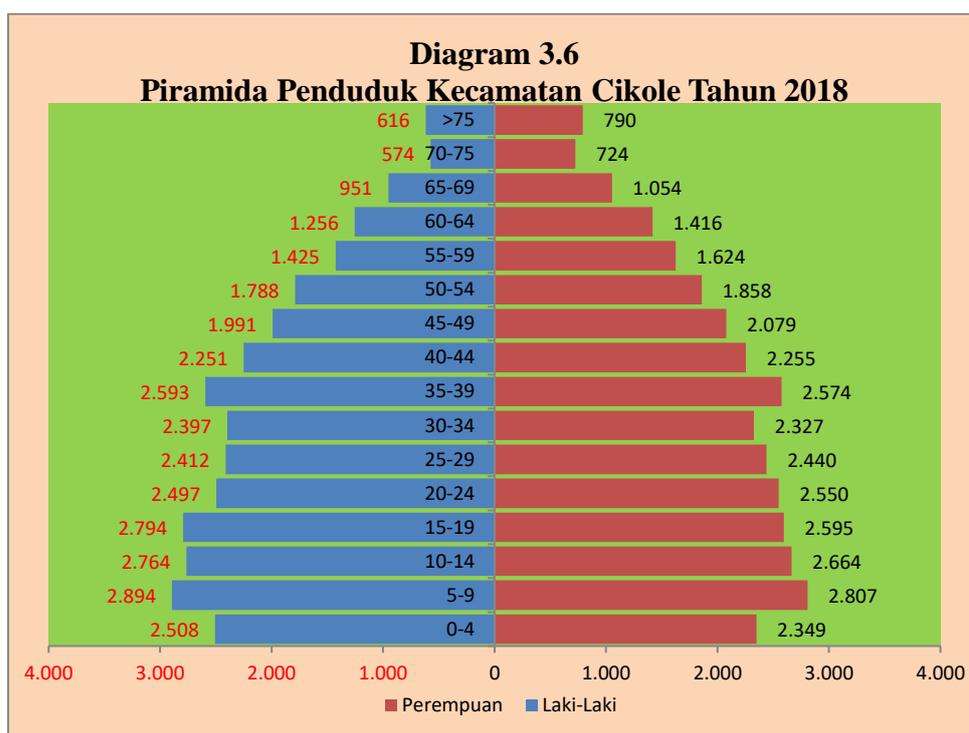
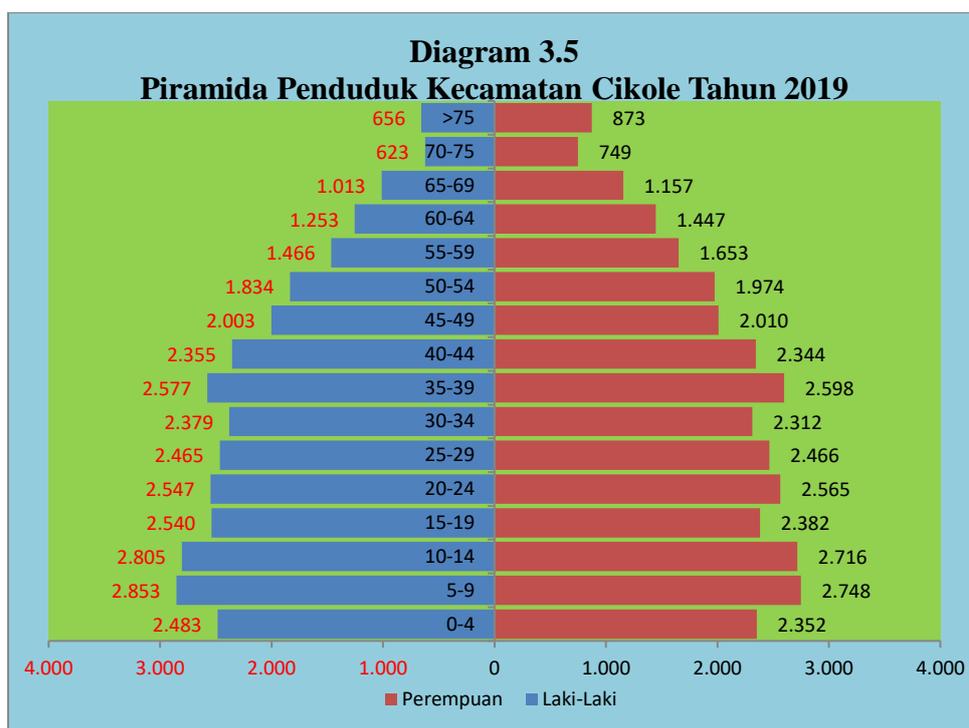
Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.483	7,83	2.352	7,33	4.835	7,53	105,57
5-9	2.853	9,00	2.748	8,56	5.601	8,72	103,82
10-14	2.805	8,85	2.716	8,46	5.521	8,60	103,28
15-19	2.540	8,01	2.382	7,42	4.922	7,67	106,63
20-24	2.547	8,03	2.565	7,99	5.112	7,96	99,30
25-29	2.465	7,77	2.466	7,68	4.931	7,68	99,96
30-34	2.379	7,50	2.312	7,20	4.691	7,31	102,90
35-39	2.577	8,13	2.598	8,09	5.175	8,06	99,19
40-44	2.355	7,43	2.344	7,30	4.699	7,32	100,47
45-49	2.003	6,32	2.010	6,26	4.013	6,25	99,65
50-54	1.834	5,78	1.974	6,15	3.808	5,93	92,91
55-59	1.466	4,62	1.653	5,15	3.119	4,86	88,69
60-64	1.253	3,95	1.447	4,51	2.700	4,21	86,59
65-69	1.013	3,19	1.157	3,60	2.170	3,38	87,55
70-75	623	1,96	749	2,33	1.372	2,14	83,18
>75	656	2,07	873	2,72	1.529	2,38	75,14
JUMLAH	31.711	49,40	32.106	50,01	64.198	100	98,77

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.14
Jumlah Penduduk Kecamatan Cikole
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.508	7,91	2.349	7,32	4.857	7,61	106,77
5-9	2.894	9,13	2.807	8,74	5.701	8,93	103,10
10-14	2.764	8,72	2.664	8,30	5.428	8,51	103,75
15-19	2.794	8,81	2.595	8,08	5.389	8,44	107,67
20-24	2.497	7,87	2.550	7,94	5.047	7,91	97,92
25-29	2.412	7,61	2.440	7,60	4.852	7,60	98,85
30-34	2.397	7,56	2.327	7,25	4.724	7,40	103,01
35-39	2.593	8,18	2.574	8,02	5.167	8,10	100,74
40-44	2.251	7,10	2.255	7,02	4.506	7,06	99,82
45-49	1.991	6,28	2.079	6,48	4.070	6,38	95,77
50-54	1.788	5,64	1.858	5,79	3.646	5,71	96,23
55-59	1.425	4,49	1.624	5,06	3.049	4,78	87,75
60-64	1.256	3,96	1.416	4,41	2.672	4,19	88,70
65-69	951	3,00	1.054	3,28	2.005	3,14	90,23
70-75	574	1,81	724	2,26	1.298	2,03	79,28
>75	616	1,94	790	2,46	1.406	2,20	77,97
JUMLAH	31.711	49,69	32.106	50,31	63.817	100	98,77

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018



Jika kita lihat Tabel 3.13 dan Diagram 3.5, tergambar penduduk Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2019, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 5.601 jiwa (8,72%) terdiri dari laki-laki

2.853 jiwa (9,00%) dan perempuan 2.748 jiwa (8,56%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 1.372 jiwa (2,14%) terdiri dari laki-laki 623 jiwa (1,96%) dan perempuan 749 jiwa (2,33%).

Proporsi tersebut berbeda dengan Tahun 2018, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 5.428 jiwa (8,51%) terdiri dari laki-laki 2.764 jiwa (8,72%) dan perempuan 2.664 jiwa (8,30%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 1.298 jiwa (2,03%) terdiri dari laki-laki 574 jiwa (1,81%) dan perempuan 724 jiwa (2,26%).

Kecamatan Cikole adalah kecamatan yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu penduduk laki-laki 31.711 jiwa (49,40%) dan perempuan 32.106 jiwa (50,01%).

Tabel 3.15
Jumlah Penduduk Kecamatan Citamiang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

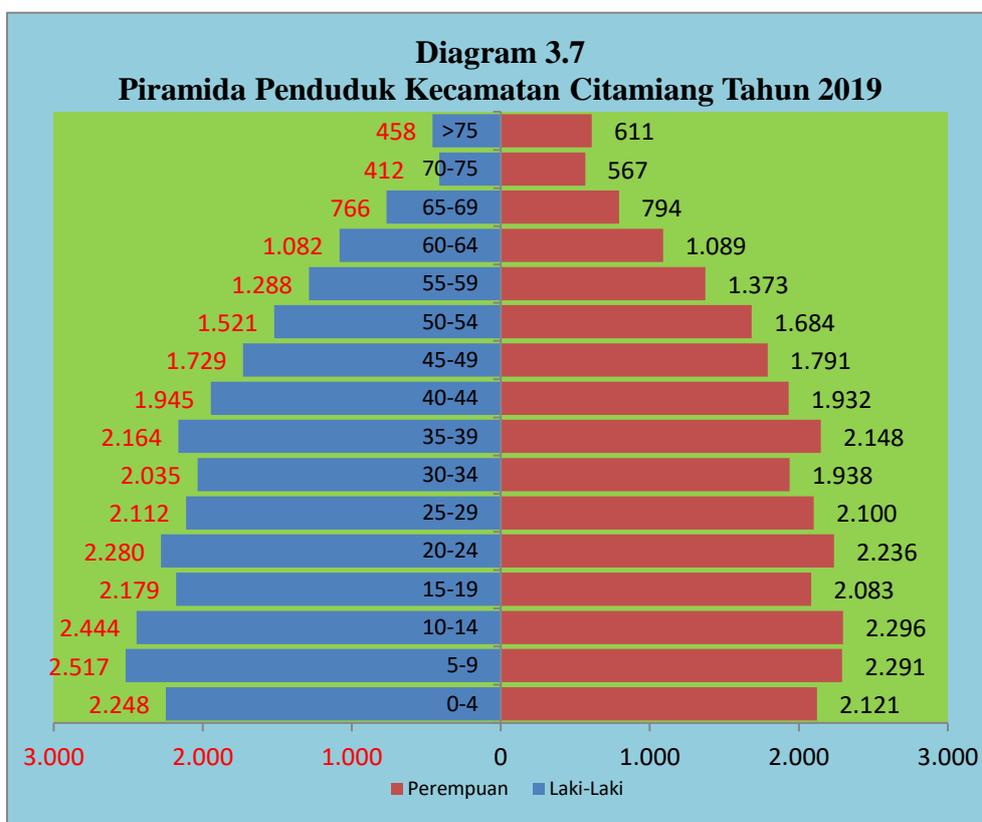
Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.248	8,35	2.121	7,93	4.369	8,06	105,99
5-9	2.517	9,35	2.291	8,57	4.808	8,87	109,86
10-14	2.444	9,08	2.296	8,59	4.740	8,74	106,45
15-19	2.179	8,09	2.083	7,79	4.262	7,86	104,61
20-24	2.280	8,47	2.236	8,36	4.516	8,33	101,97
25-29	2.112	7,84	2.100	7,85	4.212	7,77	100,57
30-34	2.035	7,56	1.938	7,25	3.973	7,33	105,01
35-39	2.164	8,04	2.148	8,03	4.312	7,95	100,74
40-44	1.945	7,22	1.932	7,22	3.877	7,15	100,67
45-49	1.729	6,42	1.791	6,70	3.520	6,49	96,54
50-54	1.521	5,65	1.684	6,30	3.205	5,91	90,32
55-59	1.288	4,78	1.373	5,13	2.661	4,91	93,81
60-64	1.082	4,02	1.089	4,07	2.171	4,00	99,36
65-69	766	2,85	794	2,97	1.560	2,88	96,47
70-75	412	1,53	567	2,12	979	1,81	72,66
>75	458	1,70	611	2,28	1.069	1,97	74,96
JUMLAH	26.923	49,64	26.743	49,31	54.234	100	100,67

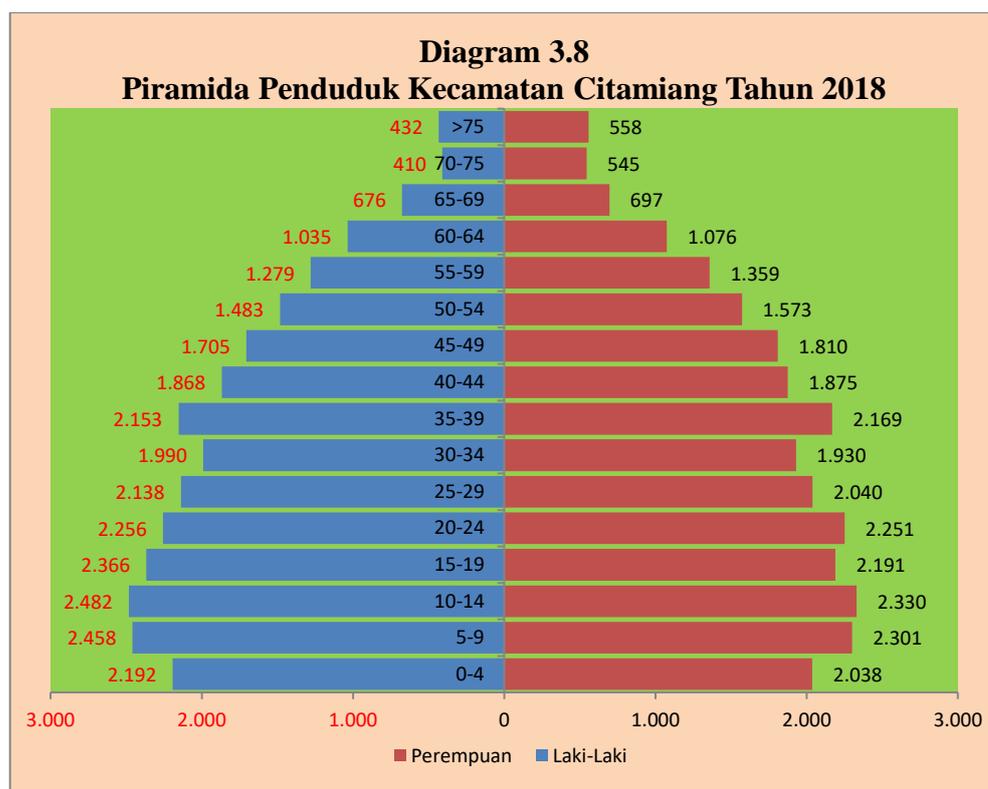
Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.16
Jumlah Penduduk Kecamatan Citamiang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.192	8,14	2.038	7,62	4.230	7,88	107,56
5-9	2.458	9,13	2.301	8,60	4.759	8,87	106,82
10-14	2.482	9,22	2.330	8,71	4.812	8,97	106,52
15-19	2.366	8,79	2.191	8,19	4.557	8,49	107,99
20-24	2.256	8,38	2.251	8,42	4.507	8,40	100,22
25-29	2.138	7,94	2.040	7,63	4.178	7,79	104,80
30-34	1.990	7,39	1.930	7,22	3.920	7,30	103,11
35-39	2.153	8,00	2.169	8,11	4.322	8,05	99,26
40-44	1.868	6,94	1.875	7,01	3.743	6,97	99,63
45-49	1.705	6,33	1.810	6,77	3.515	6,55	94,20
50-54	1.483	5,51	1.573	5,88	3.056	5,69	94,28
55-59	1.279	4,75	1.359	5,08	2.638	4,92	94,11
60-64	1.035	3,84	1.076	4,02	2.111	3,93	96,19
65-69	676	2,51	697	2,61	1.373	2,56	96,99
70-75	410	1,52	545	2,04	955	1,78	75,23
>75	432	1,60	558	2,09	990	1,84	77,42
JUMLAH	26.923	50,17	26.743	49,83	53.666	100	100,67

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018





Jika kita lihat Tabel 3.15 dan Diagram 3.7 tergambar bahwa penduduk Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Tahun 2019, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 4.808 jiwa (8,87%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.517 jiwa (9,35%) dan perempuan 2.291 jiwa (8,57%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 979 jiwa (1,81%) terdiri dari laki-laki 412 jiwa (1,53%) dan perempuan 567 jiwa (2,12%).

Proporsi tersebut berbeda dengan Tahun 2018, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 4.812 jiwa (8,97%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.482 jiwa (9,22%) dan perempuan 2.330 jiwa (8,71%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 955 jiwa (1,78%) terdiri dari laki-laki 410 jiwa (1,52%) dan perempuan 545 jiwa (2,04%).

Tabel 3.17
Jumlah Penduduk Kecamatan Warudoyong
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

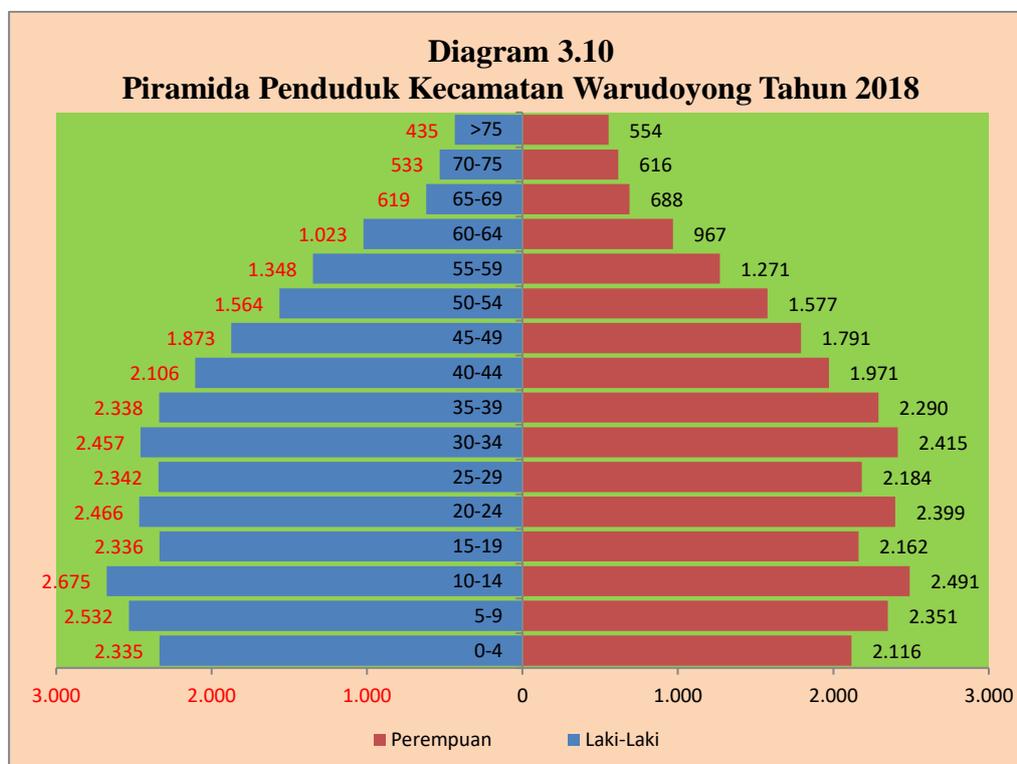
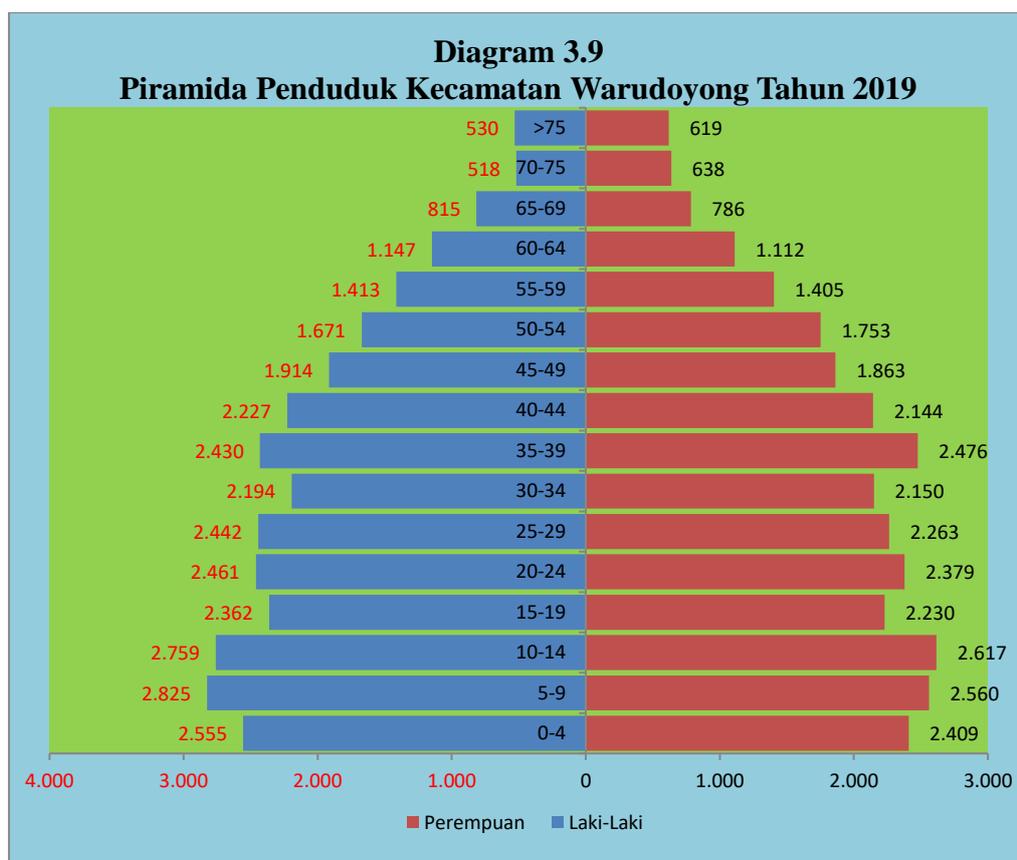
Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.555	8,59	2.409	8,37	4.964	8,32	106,06
5-9	2.825	9,50	2.560	8,90	5.385	9,03	110,35
10-14	2.759	9,28	2.617	9,09	5.376	9,01	105,43
15-19	2.362	7,94	2.230	7,75	4.592	7,70	105,92
20-24	2.461	8,28	2.379	8,27	4.840	8,11	103,45
25-29	2.442	8,21	2.263	7,86	4.705	7,89	107,91
30-34	2.194	7,38	2.150	7,47	4.344	7,28	102,05
35-39	2.430	8,17	2.476	8,60	4.906	8,22	98,14
40-44	2.227	7,49	2.144	7,45	4.371	7,33	103,87
45-49	1.914	6,44	1.863	6,47	3.777	6,33	102,74
50-54	1.671	5,62	1.753	6,09	3.424	5,74	95,32
55-59	1.413	4,75	1.405	4,88	2.818	4,72	100,57
60-64	1.147	3,86	1.112	3,86	2.259	3,79	103,15
65-69	815	2,74	786	2,73	1.601	2,68	103,69
70-75	518	1,74	638	2,22	1.156	1,94	81,19
>75	530	1,78	619	2,15	1.149	1,93	85,62
JUMLAH	29.737	49,84	28.779	48,23	59.667	100	103,33

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.18
Jumlah Penduduk Kecamatan Warudoyong
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.335	8,06	2.116	7,60	4.451	7,83	110,35
5-9	2.532	8,74	2.351	8,44	4.883	8,59	107,70
10-14	2.675	9,23	2.491	8,95	5.166	9,09	107,39
15-19	2.336	8,06	2.162	7,76	4.498	7,92	108,05
20-24	2.466	8,51	2.399	8,62	4.865	8,56	102,79
25-29	2.342	8,08	2.184	7,84	4.526	7,96	107,23
30-34	2.457	8,48	2.415	8,67	4.872	8,57	101,74
35-39	2.338	8,07	2.290	8,22	4.628	8,14	102,10
40-44	2.106	7,27	1.971	7,08	4.077	7,17	106,85
45-49	1.873	6,46	1.791	6,43	3.664	6,45	104,58
50-54	1.564	5,40	1.577	5,66	3.141	5,53	99,18
55-59	1.348	4,65	1.271	4,56	2.619	4,61	106,06
60-64	1.023	3,53	967	3,47	1.990	3,50	105,79
65-69	619	2,14	688	2,47	1.307	2,30	89,97
70-75	533	1,84	616	2,21	1.149	2,02	86,53
>75	435	1,50	554	1,99	989	1,74	78,52
JUMLAH	28.982	51,00	27.843	49,00	56.825	100	104,09

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018



Jika kita lihat Tabel 3.19 dan Diagram 3.9, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2019, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 5.385 jiwa (9,03) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.825 jiwa (9,50%) dan perempuan 2.560 jiwa (8,90%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 1.149 jiwa (1,93%) terdiri dari laki-laki 530 jiwa (1,78%) dan perempuan 619 jiwa (2,15%).

Proporsi tersebut masih sama dengan Tahun 2018, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 5.166 jiwa (9,09) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.675 jiwa (9,23%) dan perempuan 2.491 jiwa (8,95%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 989 jiwa (1,74%) terdiri dari laki-laki 435 jiwa (1,50%) dan perempuan 554 jiwa (1,99%).

Tabel 3.19
Jumlah Penduduk Kecamatan Baros
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

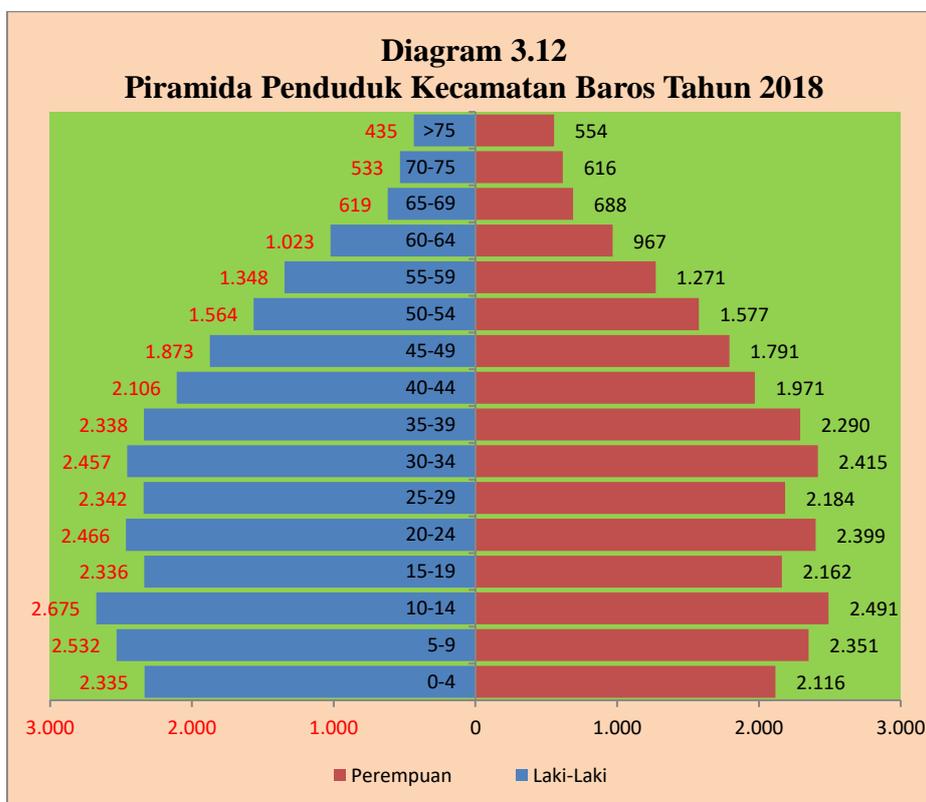
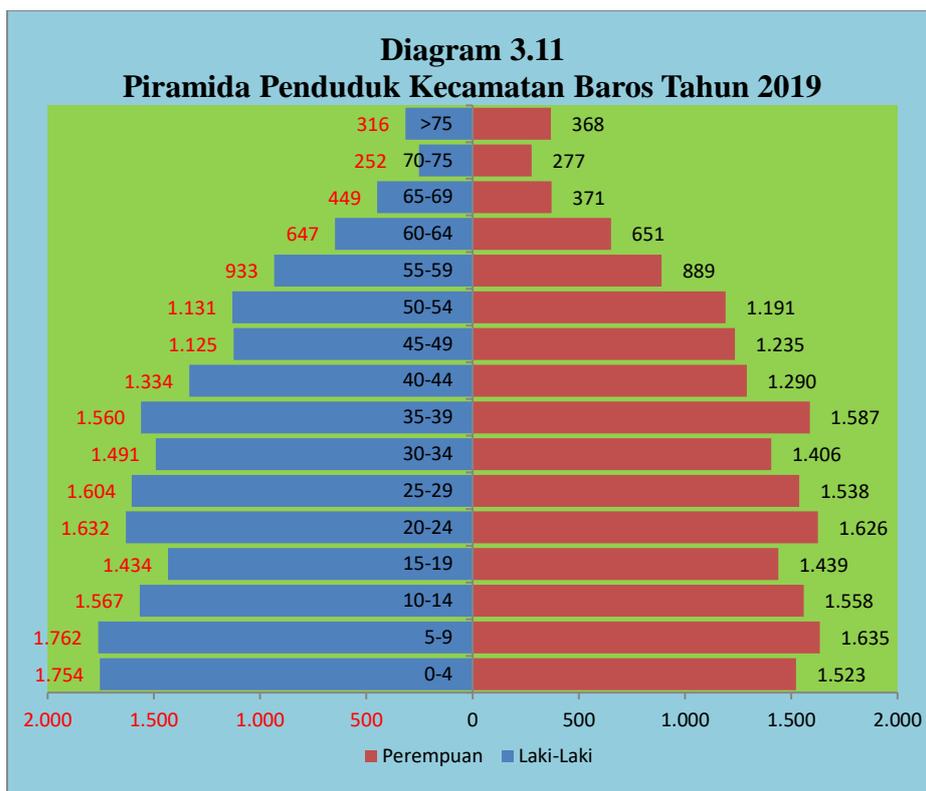
Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.754	9,37	1.523	8,30	3.277	8,72	115,17
5-9	1.762	9,41	1.635	8,91	3.397	9,04	107,77
10-14	1.567	8,37	1.558	8,49	3.125	8,32	100,58
15-19	1.434	7,66	1.439	7,84	2.873	7,65	99,65
20-24	1.632	8,71	1.626	8,86	3.258	8,67	100,37
25-29	1.604	8,56	1.538	8,38	3.142	8,36	104,29
30-34	1.491	7,96	1.406	7,67	2.897	7,71	106,05
35-39	1.560	8,33	1.587	8,65	3.147	8,38	98,30
40-44	1.334	7,12	1.290	7,03	2.624	6,98	103,41
45-49	1.125	6,01	1.235	6,73	2.360	6,28	91,09
50-54	1.131	6,04	1.191	6,49	2.322	6,18	94,96
55-59	933	4,98	889	4,85	1.822	4,85	104,95
60-64	647	3,45	651	3,55	1.298	3,45	99,39
65-69	449	2,40	371	2,02	820	2,18	121,02
70-75	252	1,35	277	1,51	529	1,41	90,97
>75	316	1,69	368	2,01	684	1,82	85,87
JUMLAH	18.728	49,84	18.343	48,82	37.575	100	102,10

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.20
Jumlah Penduduk Kecamatan Baros
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.439	8,17	1.385	8,03	2.824	8,10	103,90
5-9	1.527	8,67	1.391	8,06	2.918	8,37	109,78
10-14	1.537	8,73	1.538	8,91	3.075	8,82	99,93
15-19	1.302	7,40	1.240	7,19	2.542	7,29	105,00
20-24	1.650	9,37	1.577	9,14	3.227	9,26	104,63
25-29	1.456	8,27	1.488	8,62	2.944	8,44	97,85
30-34	1.606	9,12	1.531	8,87	3.137	9,00	104,90
35-39	1.406	7,99	1.356	7,86	2.762	7,92	103,69
40-44	1.195	6,79	1.243	7,20	2.438	6,99	96,14
45-49	1.149	6,53	1.234	7,15	2.383	6,84	93,11
50-54	1.062	6,03	1.079	6,25	2.141	6,14	98,42
55-59	802	4,56	732	4,24	1.534	4,40	109,56
60-64	595	3,38	494	2,86	1.089	3,12	120,45
65-69	338	1,92	299	1,73	637	1,83	113,04
70-75	259	1,47	304	1,76	563	1,61	85,20
>75	283	1,61	364	2,11	647	1,86	77,75
JUMLAH	17.606	50,50	17.255	49,50	34.861	100	102,03

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018



Jika kita lihat Tabel 3.21 dan Diagram 3.11, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2019, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 3.397 jiwa (9,04%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.762 jiwa (9,41%) dan perempuan 1.635 jiwa (8,91%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 529 jiwa (1,41%) terdiri dari laki-laki 252 jiwa (1,35%) dan perempuan 277 jiwa (1,51%).

Proporsi tersebut berbeda dengan Tahun 2018, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 3.075 jiwa (8,82%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.537 jiwa (8,73%) dan perempuan 1.538 jiwa (8,91%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 563 jiwa (1,61%) terdiri dari laki-laki 259 jiwa (1,47%) dan perempuan 304 jiwa (1,76%).

Tabel 3.21
Jumlah Penduduk Kecamatan Lembursitu
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

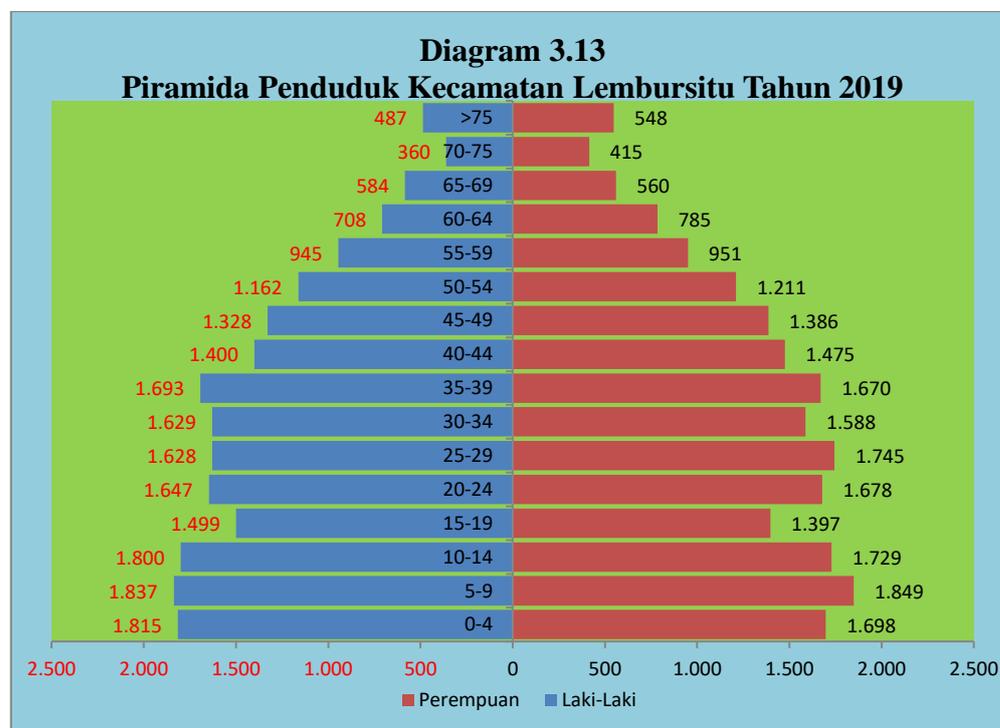
Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.815	8,96	1.698	8,29	3.513	8,53	106,89
5-9	1.837	9,07	1.849	9,02	3.686	8,95	99,35
10-14	1.800	8,89	1.729	8,44	3.529	8,56	104,11
15-19	1.499	7,40	1.397	6,82	2.896	7,03	107,30
20-24	1.647	8,13	1.678	8,19	3.325	8,07	98,15
25-29	1.628	8,04	1.745	8,52	3.373	8,19	93,30
30-34	1.629	8,04	1.588	7,75	3.217	7,81	102,58
35-39	1.693	8,36	1.670	8,15	3.363	8,16	101,38
40-44	1.400	6,91	1.475	7,20	2.875	6,98	94,92
45-49	1.328	6,56	1.386	6,76	2.714	6,59	95,82
50-54	1.162	5,74	1.211	5,91	2.373	5,76	95,95
55-59	945	4,67	951	4,64	1.896	4,60	99,37
60-64	708	3,50	785	3,83	1.493	3,62	90,19
65-69	584	2,88	560	2,73	1.144	2,78	104,29
70-75	360	1,78	415	2,03	775	1,88	86,75
>75	487	2,40	548	2,67	1.035	2,51	88,87
JUMLAH	20.251	49,14	20.490	49,72	41.207	100	98,83

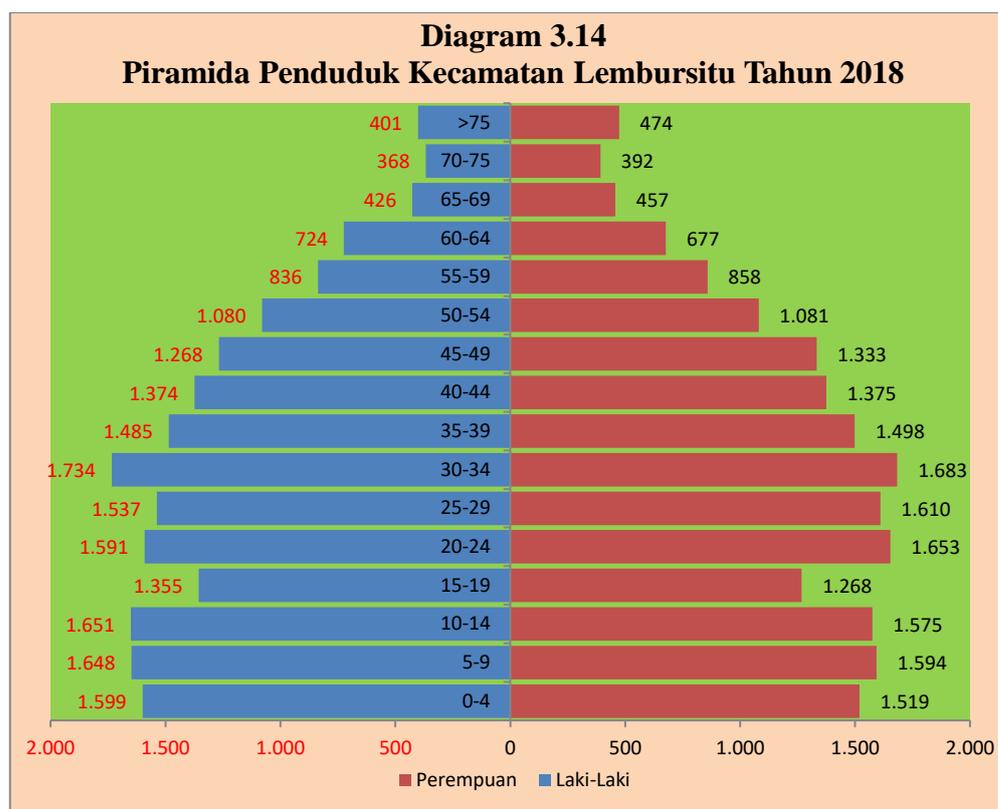
Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.22
Jumlah Penduduk Kecamatan Lembursitu
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.599	8,38	1.519	7,98	3.118	8,18	105,27
5-9	1.648	8,64	1.594	8,37	3.242	8,50	103,39
10-14	1.651	8,65	1.575	8,27	3.226	8,46	104,83
15-19	1.355	7,10	1.268	6,66	2.623	6,88	106,86
20-24	1.591	8,34	1.653	8,68	3.244	8,51	96,25
25-29	1.537	8,06	1.610	8,45	3.147	8,25	95,47
30-34	1.734	9,09	1.683	8,84	3.417	8,96	103,03
35-39	1.485	7,78	1.498	7,86	2.983	7,82	99,13
40-44	1.374	7,20	1.375	7,22	2.749	7,21	99,93
45-49	1.268	6,65	1.333	7,00	2.601	6,82	95,12
50-54	1.080	5,66	1.081	5,68	2.161	5,67	99,91
55-59	836	4,38	858	4,50	1.694	4,44	97,44
60-64	724	3,80	677	3,55	1.401	3,67	106,94
65-69	426	2,23	457	2,40	883	2,32	93,22
70-75	368	1,93	392	2,06	760	1,99	93,88
>75	401	2,10	474	2,49	875	2,30	84,60
JUMLAH	19.077	50,04	19.047	49,96	38.124	100	100,16

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018





Jika kita lihat Tabel 3.21 dan Diagram 3.13, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2019, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 3.686 jiwa (8,95%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.837 jiwa (9,07%) dan perempuan 1.849 jiwa (9,02%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 775 jiwa (1,88%) terdiri dari laki-laki 360 jiwa (1,78%) dan perempuan 415 jiwa (2,03%).

Proporsi tersebut masih sama dengan Tahun 2018, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 3.242 jiwa (8,50%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.648 jiwa (8,64%) dan perempuan 1.594 jiwa (8,37%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 760 jiwa (1,99%) terdiri dari laki-laki 368 jiwa (1,93%) dan perempuan 392 jiwa (2,06%).

Tabel 3.23
Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

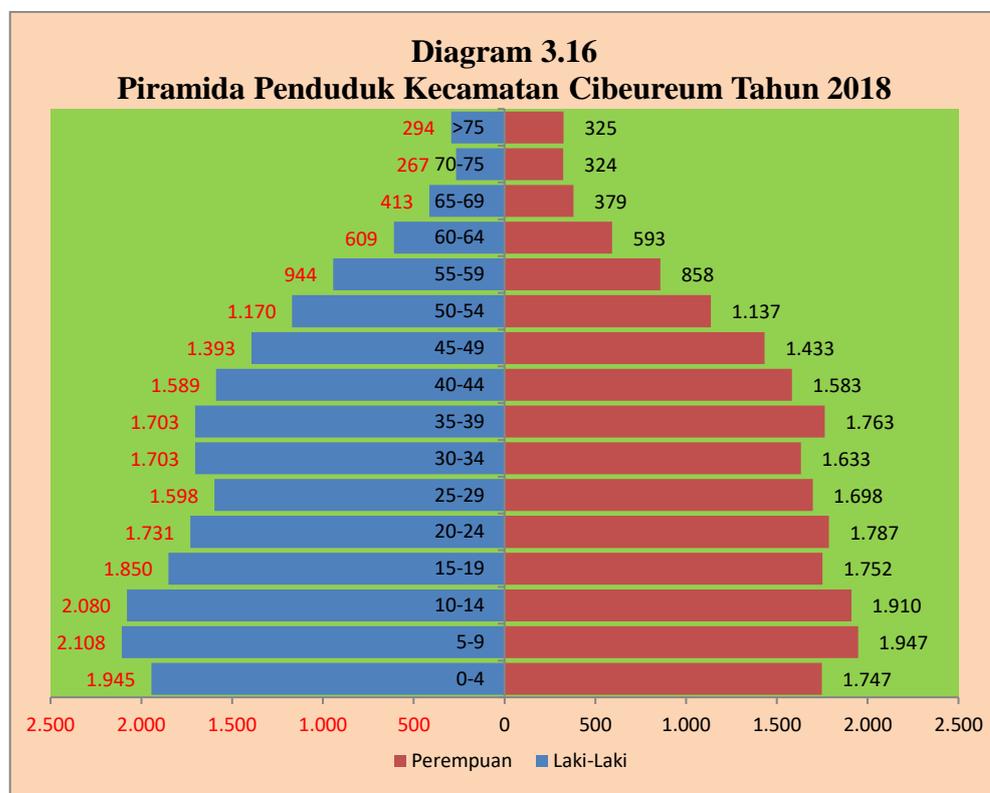
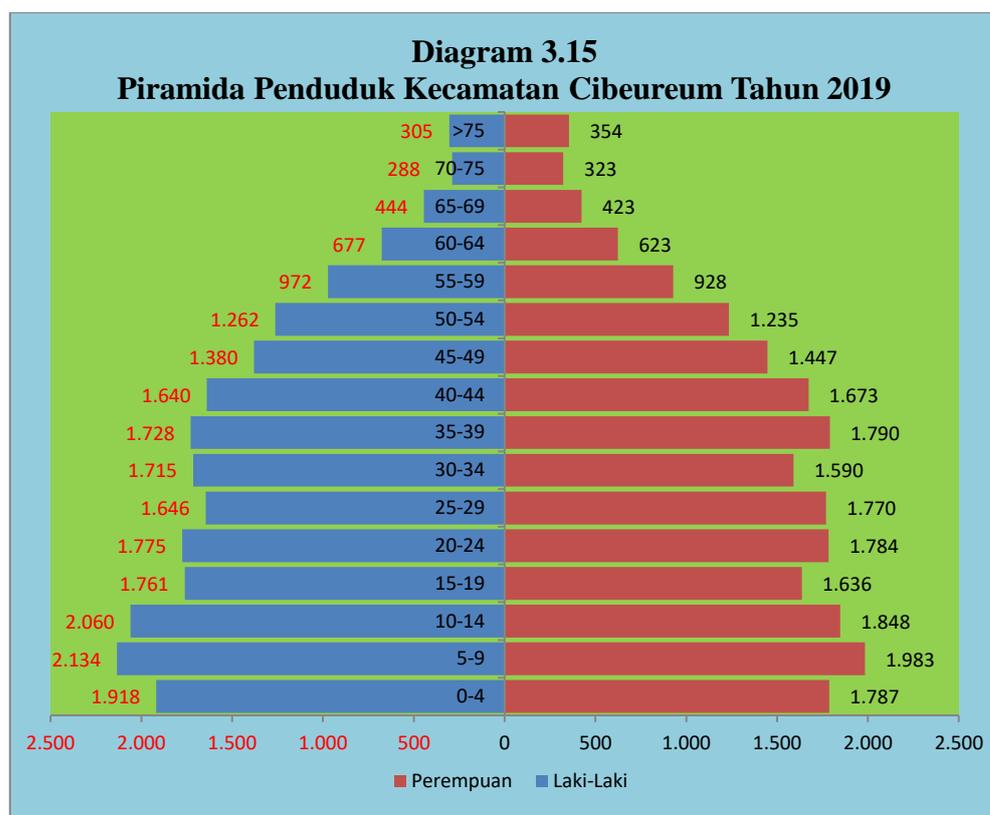
Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.918	8,96	1.787	8,56	3.705	8,64	107,33
5-9	2.134	9,97	1.983	9,50	4.117	9,60	107,61
10-14	2.060	9,63	1.848	8,86	3.908	9,11	111,47
15-19	1.761	8,23	1.636	7,84	3.397	7,92	107,64
20-24	1.775	8,30	1.784	8,55	3.559	8,30	99,50
25-29	1.646	7,69	1.770	8,48	3.416	7,96	92,99
30-34	1.715	8,02	1.590	7,62	3.305	7,70	107,86
35-39	1.728	8,08	1.790	8,58	3.518	8,20	96,54
40-44	1.640	7,66	1.673	8,02	3.313	7,72	98,03
45-49	1.380	6,45	1.447	6,93	2.827	6,59	95,37
50-54	1.262	5,90	1.235	5,92	2.497	5,82	102,19
55-59	972	4,54	928	4,45	1.900	4,43	104,74
60-64	677	3,16	623	2,99	1.300	3,03	108,67
65-69	444	2,08	423	2,03	867	2,02	104,96
70-75	288	1,35	323	1,55	611	1,42	89,16
>75	305	1,43	354	1,70	659	1,54	86,16
JUMLAH	21.397	49,88	20.869	48,65	42.899	100	102,53

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.24
Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.832	8,94	1.583	8,00	3.415	8,48	115,73
5-9	1.925	9,39	1.724	8,72	3.649	9,06	111,66
10-14	1.934	9,44	1.838	9,29	3.772	9,37	105,22
15-19	1.548	7,55	1.433	7,24	2.981	7,40	108,03
20-24	1.695	8,27	1.837	9,29	3.532	8,77	92,27
25-29	1.597	7,79	1.599	8,08	3.196	7,94	99,87
30-34	1.825	8,91	1.783	9,01	3.608	8,96	102,36
35-39	1.685	8,22	1.691	8,55	3.376	8,38	99,65
40-44	1.509	7,36	1.539	7,78	3.048	7,57	98,05
45-49	1.346	6,57	1.323	6,69	2.669	6,63	101,74
50-54	1.123	5,48	1.117	5,65	2.240	5,56	100,54
55-59	903	4,41	723	3,66	1.626	4,04	124,90
60-64	563	2,75	559	2,83	1.122	2,79	100,72
65-69	386	1,88	371	1,88	757	1,88	104,04
70-75	304	1,48	323	1,63	627	1,56	94,12
>75	318	1,55	338	1,71	656	1,63	94,08
JUMLAH	20.493	50,88	19.781	49,12	40.274	100	103,60

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018



Jika kita lihat Tabel 3.23 dan Diagram 3.15, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2019, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 4.177 jiwa (9,37%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.134 jiwa (9,97%) dan perempuan 1.983 jiwa (9,50%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 611 jiwa (1,42%) terdiri dari laki-laki 288 jiwa (1,35%) dan perempuan 323 jiwa (1,55%).

Proporsi tersebut berbeda dengan Tahun 2018, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 3.772 jiwa (9,37%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.934 jiwa (9,44%) dan perempuan 1.838 jiwa (9,29%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur 70-75 tahun yaitu 627 jiwa (1,56%) terdiri dari laki-laki 304 jiwa (1,48%) dan perempuan 323 jiwa (1,63%).

3.2.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk. Data dan informasi rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, khususnya yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu informasi rasio jenis kelamin ini juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Rasio Jenis Kelamin dinyatakan dalam rumus :

$$\text{Sex Ratio} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

Sex Ratio Kota Sukabumi Tahun 2019 dapat kita lihat dalam Tabel 3.9 yaitu 101,75 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 s.d 102 penduduk laki-laki. Keadaan tersebut masih sama dengan *Sex Ratio* Tahun 2018 dan Tahun 2017 yaitu 101,75 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 s.d 102 penduduk laki-laki.

Sex Ratio per kecamatan Tahun 2019 :

- ❖ *Sex Ratio* Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh adalah 102,43
Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Gunung Puyuh terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Cikole adalah 98,77
Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Cikole terdapat 98 s.d 99 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Citamiang adalah 100,67
Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Citamiang terdapat 100 s.d 101 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Warudoyong adalah 103,33
Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Warudoyong terdapat 103 s.d 104 penduduk laki-laki
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Baros adalah 102,10
Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Baros terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Lembursitu adalah 98,83
Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Lembursitu terdapat 98 s.d 99 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Cibeureum adalah 102,53
Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Cibeureum terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.

3.2.3. Rasio Ketergantungan (*Depedency Ratio*)

Untuk mengetahui rasio ketergantungan, jumlah penduduk yang ada dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok umur yaitu :

1. Penduduk Muda (0-14 Tahun), dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua atau orang lain.
2. Penduduk Tua (65 tahun ke atas), dianggap sudah tidak produktif lagi.
3. Penduduk Usia Kerja/Produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun (muda), ditambah dengan penduduk berumur 65 tahun keatas (tua) dibandingkan dengan jumlah penduduk berumur 15 -64 tahun. Rasio ini dapat dilihat berdasarkan umur yakni rasio ketergantungan tua. Rasio ketergantungan ini dapat menggambarkan keadaan ekonomi suatu wilayah secara kasar.

Negara-negara yang sedang berkembang dengan angka fertilitas tinggi akan mempunyai angka beban tanggungan yang tinggi pula, dikarenakan besarnya proporsi anak-anak di dalam penduduk tersebut.

Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2019 dapat disajikan rasio ketergantungan di bawah ini :

Tabel 3.25
Rasio Ketergantungan (*Depedency Ratio*) Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)	<i>Depedency Ratio</i>
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	GUNUNG PUYUH				47.62
	0 - 14 (Muda)	6,665	6,002	12,667	
	15 - 64 (Produktif)	16,758	16,548	33,306	
	>65 (Tua)	1,455	1,737	3,192	
2	CIKOLE				48.71
	0 - 14 (Muda)	8,141	7,816	15,957	
	15 - 64 (Produktif)	21,419	21,751	43,170	
	>65 (Tua)	2,292	2,779	5,071	
3	CITAMIANG				47.74
	0 - 14 (Muda)	7,209	6,708	13,917	
	15 - 64 (Produktif)	18,335	18,374	36,709	
	>65 (Tua)	1,636	1,972	3,608	
4	WARUDOYONG				49.03
	0 - 14 (Muda)	8,139	7,586	15,725	
	15 - 64 (Produktif)	20,261	19,775	40,036	
	>65 (Tua)	1,863	2,043	3,906	

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)	Dependency Ratio
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
5	BAROS				45.96
	0 - 14 (Muda)	5,083	4,716	9,799	
	15 - 64 (Produktif)	12,891	12,852	25,743	
	>65 (Tua)	1,017	1,016	2,033	
6	LEMBURSITU				49.71
	0 - 14 (Muda)	5,452	5,276	10,728	
	15 - 64 (Produktif)	13,639	13,886	27,525	
	>65 (Tua)	1,431	1,523	2,954	
7	CIBEUREUM				47.76
	0 - 14 (Muda)	6,112	5,618	11,730	
	15 - 64 (Produktif)	14,556	14,476	29,032	
	>65 (Tua)	1,037	1,100	2,137	
KOTA SUKABUMI					48.16
0 - 14 (Muda)		46,801	43,722	90,523	
15 - 64 (Produktif)		117,859	117,662	235,521	
>65 (Tua)		10,731	12,170	22,901	

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.26
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)	Dependency Ratio
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	GUNUNG PUYUH				45,87
	0 - 14 (Muda)	6.310	5.720	12.030	
	15 - 64 (Produktif)	16.174	15.946	32.120	
	>65 (Tua)	1.237	1.468	2.705	
2	CIKOLE				45,90
	0 - 14 (Muda)	7.761	7.339	15.100	
	15 - 64 (Produktif)	21.124	21.342	42.466	
	>65 (Tua)	1.974	2.420	4.394	
3	CITAMIANG				45,91
	0 - 14 (Muda)	6.905	6.273	13.178	
	15 - 64 (Produktif)	17.870	17.821	35.691	
	>65 (Tua)	1.458	1.748	3.206	
4	WARUDOYONG				46,15
	0 - 14 (Muda)	7.542	6.958	14.500	
	15 - 64 (Produktif)	19.853	19.027	38.880	
	>65 (Tua)	1.587	1.858	3.445	
5	BAROS				44,07
	0 - 14 (Muda)	4.503	4.314	8.817	
	15 - 64 (Produktif)	12.223	11.974	24.197	
	>65 (Tua)	880	967	1.847	

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)	Dependency Ratio
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
6	LEMBURSITU				46,52
	0 - 14 (Muda)	4.898	4.688	9.586	
	15 - 64 (Produktif)	12.984	13.036	26.020	
	>65 (Tua)	1.195	1.323	2.518	
7	CIBEUREUM				47,00
	0 - 14 (Muda)	5.691	5.145	10.836	
	15 - 64 (Produktif)	13.794	13.604	27.398	
	>65 (Tua)	1.008	1.032	2.040	
KOTA SUKABUMI					45,95
0 - 14 (Muda)		43.610	40.437	84.047	
15 - 64 (Produktif)		114.022	112.750	226.772	
>65 (Tua)		9.339	10.816	20.155	

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Rumus *Depedensi Ratio* :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk PROduktif}} \times k$$

Dari Tabel 3.25 di atas bisa kita lihat angka ketergantungan penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 sebesar :

$$\begin{aligned} DR &= \frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k \\ &= \frac{90.523 + 22.901}{235.521} \times 100 \\ &= 48,16 \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa setiap 100 orang produktif harus menanggung 48 s.d 49 orang yang tidak produktif. Hal ini sedikit berbeda dengan keadaan Rasio Ketergantungan Tahun 2018 dimana setiap 100 orang produktif harus menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

Angka Ketergantungan Penduduk (*Depedensi Ratio*) per Kecamatan Tahun 2019 :

❖ Kecamatan Gunung Puyuh

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k$$

$$= \frac{12.667 + 3.192}{33.306} \times 100$$

$$= 47,62$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 47 s.d 48 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Cikole

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k$$

$$= \frac{15.957 + 5.071}{43.170} \times 100$$

$$= 48,71$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 48 s.d 49 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Citamiang

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k$$

$$= \frac{13.917 + 3.608}{36.709} \times 100$$

$$= 47,74$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 47 s.d 48 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Warudoyong

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k$$

$$= \frac{15.725 + 3.906}{40.036} \times 100$$

$$= 49,03$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 49 s.d 50 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Baros

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k$$

$$= \frac{9.799 + 2.033}{25.743} \times 100$$

$$= 45,96$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Lembursitu

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k$$

$$= \frac{10.728 + 2.954}{27.525} \times 100$$

$$= 49,71$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 49 s.d 50 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Cibeureum

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k$$

$$= \frac{11.730 + 2.137}{29.032} \times 100$$

$$= 47,76$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 47 s.d 48 orang yang tidak produktif.

Kecamatan yang mempunyai angka ketergantungan paling tinggi adalah Kecamatan Lembursitu. Hal ini disebabkan karena Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kecamatan Lembursitu cukup tinggi dibanding jumlah penduduk Kota Sukabumi yaitu 49,71% dan yang paling kecil rasio ketergantungannya adalah Kecamatan Baros yaitu 45,96%. Namun demikian angka ketergantungan penduduk Kota Sukabumi dari masing-masing kecamatan masih di bawah 50%.

3.3. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

3.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama. Pemerintah Kota Sukabumi dapat menyusun atau merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas ibadah, atau program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan beragama.

Tabel 3.27
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2019

NO	AGAMA	JUMLAH	%
1	Islam	335,726	96.21
2	Kristen	7,255	2.08
3	Katholik	3,197	0.92
4	Hindu	46	0.01
5	Budha	2,710	0.78
6	Kong Huchu	4	0.00
7	Aliran Kepercayaan	7	0.00
	JUMLAH	348,945	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

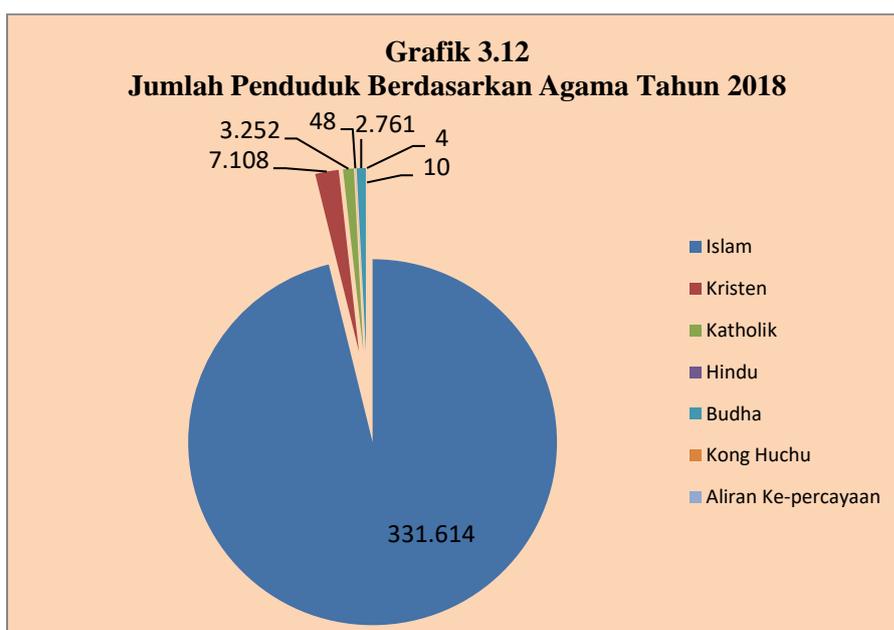
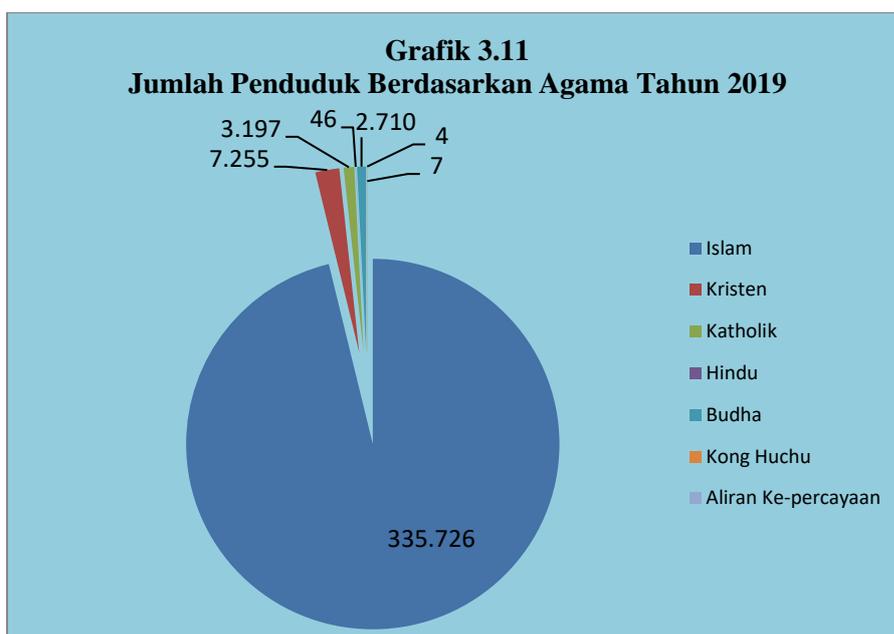
Tabel 3.28
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2018

NO	AGAMA	JUMLAH	%
1	Islam	331.614	96,18
2	Kristen	7.108	2,06
3	Katholik	3.252	0,94
4	Hindu	48	0,01
5	Budha	2.761	0,80
6	Kong Huchu	4	0,00
7	Aliran Kepercayaan	10	0,00
	JUMLAH	344.797	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Pada Tabel 3.27 nampak bahwa dari jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 sebesar 348.945 jiwa, sebanyak 335.726 jiwa atau 96,21% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,08%, Agama Katholik sebesar 0,92%, Agama Budha 0,78%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Aliran Kepercayaan sebesar 0%.

Keadaan tersebut tidak jauh berbeda proporsinya dengan Tahun 2018 sebesar 344.797 jiwa, sebanyak 331.614 jiwa atau 96,18% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,06%, Agama Katholik sebesar 0,94%, Agama Budha 0,80%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Aliran Kepercayaan sebesar 0% dan Tahun 2017 sebesar 335.866 jiwa, sebanyak 322.672 jiwa atau 96,07% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,08%, Agama Katholik sebesar 0,98%, Agama Budha 0,85%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Aliran Kepercayaan sebesar 0%.



Komposisi penduduk berdasarkan agama pada Tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan komposisi penduduk berdasarkan agama pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 335.726 jiwa atau 96,21% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,08%, Agama Katholik sebesar 0,92%, Agama Budha 0,78%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Aliran Kepercayaan sebesar 0%.

Tabel 3.29
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PERSENTASI AGAMA (JIWA)														JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		ISLAM	%	KRIS TEN	%	KATHO LIK		HINDU	%	BUDHA	%	KONG HUCU	%	KEPER CAYAAN	%	
1	GUNUNG PUYUH	47.206	96,02	1.135	2,31	635	1,29	30	0,06	159	0,32		0		0	49.165
2	CIKOLE	59.372	92,48	2.174	3,39	1.272	1,98	5	0,01	1.365	2,13	3	0,005	7	0,01	64.198
3	CITAMIANG	52.746	97,26	854	1,57	328	0,60		0	306	0,56		0		0	54.234
4	WARUDYOYONG	57.519	96,40	976	1,64	390	0,65	5	0,008	776	1,30	1	0,002		0	59.667
5	BAROS	36.464	97,04	892	2,37	215	0,57		0	4	0,01		0		0	37.575
6	LEMBURSITU	40.896	99,25	241	0,58	60	0,15		0	10	0,02		0		0	41.207
7	CIBEUREUM	41.523	96,79	983	2,29	297	0,69	6	0,01	90	0,21		0		0	42.899
JUMLAH		335.726	96,21	7.255	2,08	3.197	0,92	46	0,01	2.710	0,78	4	0,001	7	0,002	348.945

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019

Tabel 3.30
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PERSENTASI AGAMA (JIWA)														JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		ISLAM	%	KRIS TEN	%	KATHO LIK		HINDU	%	BUDHA	%	KONG HUCU	%	KEPER CAYAAN	%	
1	GUNUNG PUYUH	46.762	95,98	1.121	2,30	646	1,33	33	0,07	158	0,32		0		0	48.720
2	CIKOLE	58.948	92,37	2.170	3,40	1.300	2,04	5	0,01	1.383	2,17	3	0,005	8	0,01	63.817
3	CITAMIANG	52.146	97,17	862	1,61	335	0,62		0	323	0,60		0		0	53.666
4	WARUDYOYONG	56.328	96,26	975	1,67	405	0,69	5	0,009	800	1,37	1	0,002	2	0	58.516
5	BAROS	36.004	97,12	847	2,28	213	0,57		0	7	0,02		0		0	37.071
6	LEMBURSITU	40.463	99,32	213	0,52	57	0,14		0	8	0,02		0		0	40.741
7	CIBEUREUM	40.963	96,92	920	2,18	296	0,70	5	0,01	82	0,19		0		0	42.266
JUMLAH		331.614	96,18	7.108	2,06	3.252	0,94	48	0,01	2.761	0,80	4	0,001	10	0,003	344.797

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018

Pada Tabel 3.29 di atas, nampak bahwa :

- ❖ Penduduk yang beragama Islam prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Lembursitu (99,25%), baru disusul Kecamatan Citamiang (97,26%), lalu Kecamatan Baros (97,04%).
- ❖ Penduduk yang beragama Kristen prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (3,39%), baru disusul Kecamatan Gunung Puyuh (2,31%), lalu Kecamatan Baros (2,37%).
- ❖ Penduduk yang beragama Khatolik prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (1,98%), baru disusul Kecamatan Gunung Puyuh (1,29%), lalu Kecamatan Warudoyong (0,65%).
- ❖ Penduduk yang beragama Hindu prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Gunung Puyuh (0,06%), baru disusul Kecamatan Cibeureum (0,01%), lalu Kecamatan Cikoel (0,01%).
- ❖ Penduduk yang beragama Budha prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (2,13%), baru disusul Kecamatan Warudoyong (1,30%), lalu Kecamatan Citamiang (0,56%).
- ❖ Penduduk yang beragama Konghucu hanya berada di Kecamatan Cikole dengan prosentasi (0,005%) dan Kecamatan Warudoyong dengan prosentasi (0,002%).
- ❖ Penduduk yang beragama Aliran Kepercayaan hanya berada di Kecamatan Cikole dengan prosentasi (0,01%).

3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Jenjang pendidikan yang digambarkan dalam tabel dibawah ini dapat menggambarkan secara kasar tingkat pendidikan penduduk Kota Sukabumi, namun belum bisa menggambarkan secara jelas dan akurat mengenai jenjang pendidikan penduduk di Kota Sukabumi, karena jumlah yang digambarkan belum bisa diperinci per kelompok umur.

Jumlah penduduk menurut pendidikan akhir disajikan dalam Tabel 3.31 di bawah ini :

Tabel 3.31
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)										JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		Tidak/ Belum Sekolah	Tidak Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S. Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	
1	GUNUNG PUYUH	9.336	5.062	8.759	7.624	13.482	510	1.309	2.826	246	11	49.165
2	CIKOLE	11.490	5.793	11.696	9.778	18.556	684	1.819	3.993	373	16	64.198
3	CITAMIANG	10.018	5.193	11.206	8.731	14.753	440	1.021	2.646	213	13	54.234
4	WARUDOYONG	10.174	6.882	12.905	8.901	16.984	381	1.029	2.246	159	6	59.667
5	BAROS	6.919	3.829	9.451	5.513	8.874	277	716	1.809	181	6	37.575
6	LEMBURSITU	7.880	4.203	12.537	5.926	8.346	253	485	1.468	107	2	41.207
7	CIBEUREUM	7.930	4.513	11.457	6.200	9.291	306	864	2.138	192	8	42.899
	JUMLAH	63.747	35.475	78.011	52.673	90.286	2.851	7.243	17.126	1.471	62	348.945

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019

Tabel 3.32
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)										JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		Tidak/ Belum Sekolah	Tidak Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S. Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	
1	GUNUNG PUYUH	9.092	5.111	8.817	7.625	13.310	522	1.269	2.732	230	12	48.720
2	CIKOLE	11.379	5.571	11.937	9.779	18.435	684	1.788	3.878	349	17	63.817
3	CITAMIANG	10.034	5.075	11.239	8.683	14.457	455	987	2.518	205	13	53.666
4	WARUDOYONG	9.956	6.890	12.632	8.754	16.615	388	998	2.126	151	6	58.516
5	BAROS	6.735	3.866	9.430	5.553	8.661	285	679	1.687	170	5	37.071
6	LEMBURSITU	7.590	4.299	12.667	5.944	8.030	257	452	1.393	106	3	40.741
7	CIBEUREUM	7.792	4.547	11.626	6.000	8.969	313	834	2.000	175	10	42.266
	JUMLAH	62.578	35.359	78.348	52.338	88.477	2.904	7.007	16.334	1.386	66	344.797

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018

Tabel 3.33

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JIWA	%
1	Tidak/Belum Sekolah	63,747	18.27
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	35,475	10.17
3	Tamat SD/Sederajat	78,011	22.36
4	SLTP/Sederajat	52,673	15.09
5	SLTA/Sederajat	90,286	25.87
6	Diploma I/II	2,851	0.82
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	7,243	2.08
8	Diploma IV/Strata I	17,126	4.91
9	Strata II	1,471	0.42
10	Strata III	62	0.02
JUMLAH		348,945	100

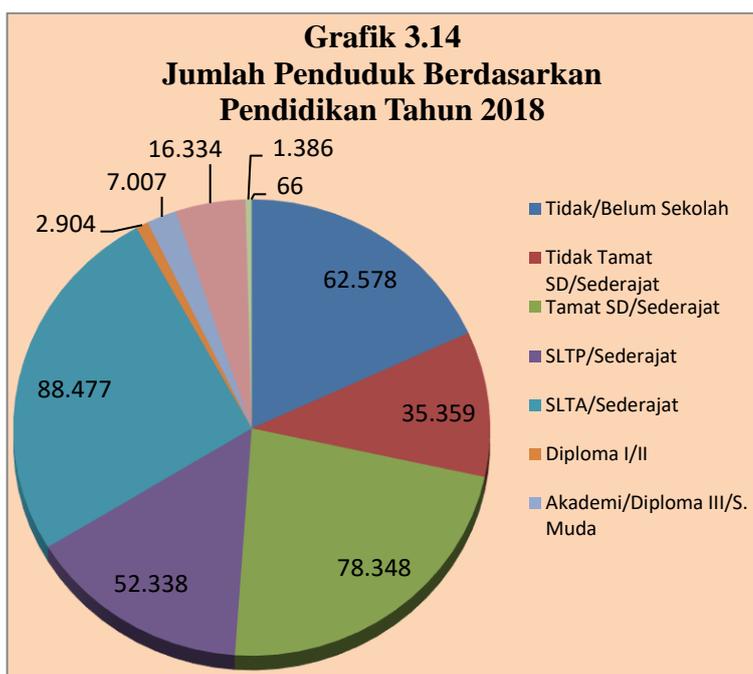
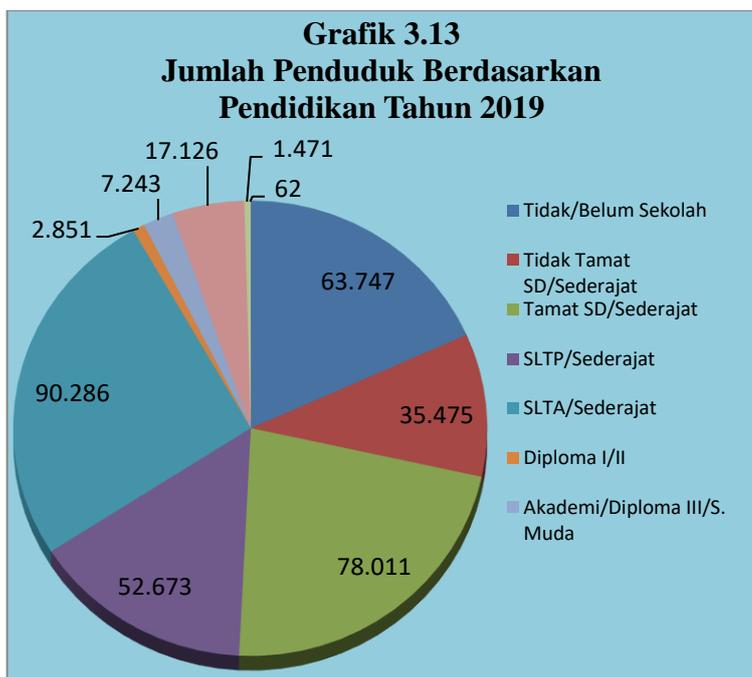
Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.34

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JIWA	%
1	Tidak/Belum Sekolah	62.578	18,15
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	35.359	10,26
3	Tamat SD/Sederajat	78.348	22,72
4	SLTP/Sederajat	52.338	15,18
5	SLTA/Sederajat	88.477	25,66
6	Diploma I/II	2.904	0,84
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	7.007	2,03
8	Diploma IV/Strata I	16.334	4,74
9	Strata II	1.386	0,40
10	Strata III	66	0,02
JUMLAH		344.797	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018



Jika kita lihat Tabel 3.31, nampak bahwa penduduk per kecamatan yang tidak/belum sekolah s.d jenjang pendidikan Strata III, terkonsentrasi di Kecamatan Cikole dan disusul Kecamatan Warudoyong dan Kecamatan Citamiang menduduki ranking kedua dan ketiga dibanding dengan kecamatan lain.

Dari Tabel 3.33 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi yang tidak/belum sekolah sebesar 62.578 jiwa (18,15%) dari 344.797 jiwa. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya anak-anak yang belum berusia sekolah maupun penduduk yang memang benar-benar tidak pernah sekolah.

Penduduk Kota Sukabumi yang tidak tamat SD/ sederajat sejumlah 35.475 jiwa (10,17%) dari 348.945 jiwa. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya orang-orang/ anak-anak yang putus sekolah/ drop out SD maupun anak-anak yang berusia SD tapi belum lulus/ tamat.

Proporsi terbesar berada pada tingkat pendidikan Tamat SLTA/ sederajat yaitu 90.286 jiwa (25,87%), lalu tingkat pendidikan SD/ sederajat yaitu 78.011 jiwa (22,36%), kemudian tingkat pendidikan SLTP/ sederajat yaitu 52.673 jiwa (15,09%). Selanjutnya proporsi terkecil pada jenjang Strata III sebanyak 62 jiwa (0,02%).

Untuk menggambarkan secara jelas dan akurat mengenai jenjang pendidikan penduduk di Kota Sukabumi, dapat dilihat pada Tabel 3.35 di bawah ini.

Tabel 3.35
Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Rendah

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)							
		Tidak/ Belum Sekolah	%	Tidak Tamat SD/ Sederajat	%	Tamat SD/ Sederajat	%	SLTP/ Sederajat	%
1	15-19	1.890	0,59	6.074	1,89	7.779	2,42	8.641	2,69
2	20-24	83	0,03	1.255	0,39	3.059	0,95	8.547	2,66
3	25-29	41	0,01	190	0,06	3.736	1,16	5.696	1,77
4	30-34	19	0,01	92	0,03	4.575	1,42	4.912	1,53
5	35-39	20	0,01	110	0,03	6.173	1,92	5.477	1,70
6	40-44	37	0,01	157	0,05	7.151	2,23	4.372	1,36
7	45-49	35	0,01	152	0,05	7.207	2,24	4.189	1,30
8	50-54	35	0,01	222	0,07	7.465	2,32	3.209	1,00
9	55-59	50	0,02	313	0,10	7.575	2,36	2.337	0,73
10	60-64	54	0,02	326	0,10	6.588	2,05	1.983	0,62
JUMLAH		2.264	0,70	8.891	2,77	61.308	19,08	49.363	15,36

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019

Tabel 3.36
Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Tinggi

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)					
		Diploma IV/Strata I	%	Strata II	%	Strata III	%
1	15-19	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	20-24	486	0,15	2	0,00	1	0,00
3	25-29	3.013	0,94	58	0,02	1	0,00
4	30-34	2.965	0,92	117	0,04	1	0,00
5	35-39	2.945	0,92	154	0,05	6	0,00
6	40-44	2.230	0,69	199	0,06	8	0,00
7	45-49	1.681	0,52	208	0,06	5	0,00
8	50-54	1.525	0,47	262	0,08	6	0,00
9	55-59	1.185	0,37	244	0,08	13	0,00
10	60-64	648	0,20	147	0,05	17	0,01
JUMLAH		16.678	5,19	1.391	0,43	58	0,02

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019

Tabel 3.37
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Menurut Usia

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)									
		Tidak/ Belum Sekolah	%	Tidak Tamat SD/ Sederajat	%	Tamat SD/ Sederajat	%	SLTP/ Sederajat	%	SLTA/ Sederajat	%
1	0-14	59.839	17,35	25.592	7,42	3.967	1,15	638	0,19	8	0,00
2	15-64	2.439	0,71	8.739	2,53	62.310	18,07	48.797	14,15	84.634	24,55
3	>64	300	0,09	1.028	0,30	12.071	3,50	2.903	0,84	3.835	1,11
JUMLAH		62.578	18,15	35.359	10,26	78.348	22,72	52.338	15,18	88.477	25,66

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)										JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		Diploma I/II	%	Akademi/ Diploma III/S. Muda	%	Diploma IV/Strata I	%	Strata II	%	Strata III	%	
1	0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.044
2	15-64	2.706	0,78	6.680	1,94	15.944	4,62	1.317	0,38	62	0,02	233.628
3	>64	198	0,06	327	0,09	390	0,11	69	0,02	4	0,00	21.125
JUMLAH		2.904	0,84	7.007	2,03	16.334	4,74	1.386	0,40	66	0,02	344.797

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019

3.4 Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dokumen kependudukan sebagai alat bukti autentik seseorang atau pemilikinya yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pelayanan publik baik pemerintahan atau swasta seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pertanahan, program bantuan pemerintah, dan lain sebagainya.

Dokumen kependudukan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap penduduk sesuai dengan domisilinya dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan status sipil sebagai warga negara yang juga merupakan penertiban administrasi kependudukan sebagai bahan updating database kependudukan yang valid, akurat dan dinamis untuk digunakan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan.

Adapun dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang, dan Akta-Akta Pencatatan Sipil (seperti: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan lain-lain).

3.4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga, dan merupakan dokumen awal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Tabel 3.38
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RASIO	KEPEMILIKAN KK	
					ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	49,165	15,185	3.24	14,931	98.33
2	CIKOLE	64,198	20,492	3.13	20,171	98.43
3	CITAMIANG	54,234	17,050	3.18	16,606	97.40
4	WARUDOYONG	59,667	18,891	3.16	18,408	97.44
5	BAROS	37,575	11,825	3.18	11,493	97.19
6	LEMBURSITU	41,207	13,506	3.05	13,157	97.42
7	CIBEUREUM	42,899	13,014	3.30	12,570	96.59
	JUMLAH	348,945	109,963	3.17	107,336	97.61

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.39
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK
Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RASIO	KEPEMILIKAN KK	
					ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	48.720	14.678	3,32	14.500	98,79
2	CIKOLE	63.817	19.864	3,21	19.603	98,69
3	CITAMIANG	53.666	16.456	3,26	16.172	98,27
4	WARUDOYONG	58.516	18.113	3,23	17.776	98,14
5	BAROS	37.071	11.301	3,28	11.116	98,36
6	LEMBURSITU	40.741	13.010	3,13	12.823	98,56
7	CIBEUREUM	42.266	12.505	3,38	12.391	99,09
	JUMLAH	344.797	105.927	3,26	104.381	98,54

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Dari Tabel 3.38 pada Tahun 2019 terlihat bahwa kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kota Sukabumi sebanyak 107.336 (97,61%) dari jumlah 109.963 Kepala Keluarga. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 kepemilikan KK sebanyak 104.381 (98,54%) dari jumlah 105.927 Kepala Keluarga dan Tahun 2017 kepemilikan KK sebanyak 100.500 (97,99%) dari jumlah 102.563 Kepala Keluarga.

Ratio atau perbandingan Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 3,17 menunjukkan setiap Kepala Keluarga rata-rata berisi 3-4 jiwa.

Secara kasar data ini bisa menggambarkan kondisi kepemilikan KK di Kota Sukabumi pada umumnya setiap Kepala Keluarga sudah mempunyai KK.

3.4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai identitas diri. KTP-el ini wajib dimiliki oleh semua penduduk yang telah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. KTP berfungsi untuk semua urusan yang berkaitan dengan legalitas, misalnya urusan dengan bank, mengurus perkawinan, mengurus sertifikat tanah, mengurus bantuan-bantuan dari pemerintah, dan lain-lain.

Tabel 3.40
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP-el Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RASIO	KEPEMILIKAN KTP-el		
					WAJIB KTP-el	ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	49,165	15,185	3.24	34,672	34,159	98.52
2	CIKOLE	64,198	20,492	3.13	46,027	45,339	98.51
3	CITAMIANG	54,234	17,050	3.18	38,275	37,704	98.51
4	WARUDOYONG	59,667	18,891	3.16	41,813	41,007	98.07
5	BAROS	37,575	11,825	3.18	26,427	25,977	98.30
6	LEMBURSITU	41,207	13,506	3.05	29,140	28,741	98.63
7	CIBEUREUM	42,899	13,014	3.30	29,562	29,165	98.66
	JUMLAH	348,945	109,963	3.17	245,916	242,092	98.44

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.41
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP-el Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RASIO	KEPEMILIKAN KTP-el		
					WAJIB KTP-el	ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	48.720	14.210	3,43	34.318	34.086	99,32
2	CIKOLE	63.817	19.402	3,29	45.594	45.253	99,25
3	CITAMIANG	53.666	16.046	3,34	37.936	37.634	99,20
4	WARUDOYONG	58.516	17.722	3,30	40.852	40.363	98,80
5	BAROS	37.071	10.714	3,46	26.050	25.812	99,09
6	LEMBURSITU	40.741	12.457	3,27	28.771	28.475	98,97
7	CIBEUREUM	42.266	12.012	3,52	29.044	28.708	98,84
	JUMLAH	344.797	102.563	3,36	242.565	240.331	99,08

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Tabel 3.40 menunjukkan bahwa prosentasi kepemilikan KTP Tahun 2019 sebesar 242.092 (98,44%) dari wajib KTP sebanyak 245.916, sedangkan prosentasi kepemilikan KTP pada Tahun 2018 sebesar 240.331 (99,08%) dari wajib KTP sebanyak 242.565 orang dan Tahun 2017 sebesar 213.844 (91,12%) dari wajib KTP sebanyak 234.689.

Penurunan tersebut akibat dari terjadinya mobilisasi keluar masuk penduduk, sehingga perlu adanya upaya lebih optimal kembali dari petugas dalam melaksanakan stelsel aktif pelayanan dokumen kependudukan melalui pelayanan keliling/jemput bola (jempol) pemukiman/anak sekolah/aki nini/perusahaan.

Dengan adanya perekaman KTP-el diharapkan data kependudukan akan lebih akurat dan terjamin ketunggalannya, sehingga tidak terjadi lagi penduduk memiliki KTP diberbagai tempat atau lebih dari satu KTP.

3.4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting dan merupakan bukti status keberadaan seseorang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul seseorang, kapan dan dimana seseorang dilahirkan.

Tabel 3.42
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
			ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	49,165	26,522	53.94
2	CIKOLE	64,198	34,459	53.68
3	CITAMIANG	54,234	29,900	55.13
4	WARUDOYONG	59,667	29,695	49.77
5	BAROS	37,575	19,462	51.80
6	LEMBURSITU	41,207	21,552	52.30
7	CIBEUREUM	42,899	22,416	52.25
JUMLAH		348,945	184,006	52.73

Sumber : Data Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Tabel 3.43
**Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran
Tahun 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
			ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	48.720	25.543	52,43%
2	CIKOLE	63.817	33.426	52,38%
3	CITAMIANG	53.666	28.932	53,91%
4	WARUDOYONG	58.516	28.371	48,48%
5	BAROS	37.071	18.491	49,88%
6	LEMBURSITU	40.741	20.750	50,93%
7	CIBEUREUM	42.266	21.593	51,09%
JUMLAH		344.797	177.106	51,37%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Apabila dilihat pada Tabel 3.42, kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Sukabumi Tahun 2019 sebanyak 184.006 jiwa (52,73%) dari jumlah penduduk sebanyak 348.945 jiwa. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Citamiang sebanyak 55,13%, sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Warudoyong sebesar 49,77%.

Hal tersebut berbeda dengan kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2018 sebanyak 177.106 jiwa (51,37%) dari jumlah penduduk sebanyak 344.797 jiwa. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Citamiang sebanyak 53,91%, sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Warudoyong sebesar 48,44%.

Tabel 3.44
Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun
Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019

NO	KECAMATAN	ANAK USIA 0-18 Thn (JIWA)	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
			ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	15,688	15,629	99.62
2	CIKOLE	19,667	19,578	99.55
3	CITAMIANG	17,135	17,010	99.27
4	WARUDOYONG	19,120	18,830	98.48
5	BAROS	12,021	11,844	98.53
6	LEMBURSITU	12,930	12,864	99.49
7	CIBEUREUM	14,320	14,197	99.14
JUMLAH		110,881	109,952	99.16

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.45
Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun
Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2018

NO	KECAMATAN	ANAK USIA 0-18 Thn (JIWA)	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
			ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	16.050	15.599	97,19%
2	CIKOLE	20.393	19.662	96,42%
3	CITAMIANG	17.511	17.005	97,11%
4	WARUDOYONG	19.581	18.740	95,71%
5	BAROS	12.241	11.743	95,93%
6	LEMBURSITU	13.254	12.824	96,76%
7	CIBEUREUM	14.682	14.219	96,85%
JUMLAH		113.712	109.792	96,55%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Apabila dilihat pada Tabel 3.44, kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kota Sukabumi Tahun 2019 sebanyak 109.952 jiwa (99,16%) dari jumlah penduduk Usia 0-18 Tahun sebanyak 110.881 jiwa. Kepemilikan Akta

Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Gunung Puyuh sebanyak 99,62%, sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Wardoyong sebesar 98,48%.

Hal tersebut masih sama dengan kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2018 sebanyak 109.792 jiwa (96,55%) dari jumlah penduduk Usia 0-18 Tahun sebanyak 113.712 jiwa. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Gunung Puyuh sebanyak 97,19%, sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Wardoyong sebesar 95,71%.

kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun beranjak naik yaitu sebesar 110.652 jiwa (99,79%). Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sudah melebihi dari target Nasional sebesar 85% di Tahun 2019. Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kota Sukabumi terkait dengan pencapaian target tersebut antara lain; setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil serta peristiwa penting lainnya telah menggunakan aplikasi SIAK, sehingga datanya terekam dalam *Database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), telah melakukan *updating* atau konversi data guna melengkapi biodata penduduk yang sudah ada dalam *Dabase* SIAK, melakukan inovasi pelayanan dengan program SI JEMPOL (Siap Jemput Bola Pelayanan) untuk semua dokumen kependudukan, pelayanan *online* 24 jam melalui portal informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <http://disdukcapil.sukabumikota.go.id>.

3.4.4 Kepemilikan Akta Perkawinan

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan, khusus untuk penduduk yang beragama Islam wajib dilaporkan kepada KUA Kecamatan.

Akta Perkawinan atau Surat Nikah merupakan legalitas hukum status perkawinan seseorang, apakah yang bersangkutan berstatus kawin, belum kawin, cerai mati, atau cerai hidup.

Namun tidak menuntut kemungkinan saat ini juga masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan perkawinannya tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama non Muslim.

Bagi pasangan suami istri yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinannya secara agama Islam dan tidak melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) saat itu, sehingga tidak memiliki keabsahan perkawinannya secara negara dalam artian tidak memiliki Surat Nikah. Untuk pasangan suami istri tersebut dapat mengajukan permohonan *Isbat nikah* ke Pengadilan Agama.

Menyadari bahwa *Isbat nikah* sangat urgen dan sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki Surat Nikah untuk melindungi hak-hak sipilnya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti status anak dan harta bersama (*gono-gini*). Penetapan *isbat nikah* oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Dari uraian di atas, Pengadilan Agama dengan *isbat nikah* mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dengan terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tabel 3.46
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perkawinan menurut Kecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	GUNUNGPUYUH	22,980	15,713	68.38%	7,133	68,38%
2	CIKOLE	29,811	16,553	55.53%	13,247	55,53%
3	CITAMIANG	25,418	18,061	71.06%	7,350	71,06%
4	WARUDOYONG	27,768	12,292	44.27%	15,434	44,27%
5	BAROS	18,053	9,107	50.45%	8,936	50,45%
6	LEMBURSITU	20,471	10,133	49.50%	10,335	49,50%
7	CIBEUREUM	20,491	12,266	59.86%	8,218	59,86%
	JUMLAH	164,992	94,125	57.05%	70,653	57,05%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.47
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perkawinan menurut Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	GUNUNGPUYUH	22,573	14,072	62.34%	8,267	36.62%
2	CIKOLE	29,333	14,362	48.96%	14,838	50.58%
3	CITAMIANG	24,777	16,877	68.12%	7,871	31.77%
4	WARUDOYONG	26,996	10,084	37.35%	16,754	62.06%
5	BAROS	17,536	7,356	41.95%	10,101	57.60%
6	LEMBURSITU	19,934	8,774	44.02%	11,090	55.63%
7	CIBEUREUM	19,890	10,535	52.97%	9,309	46.80%
	JUMLAH	161,038	82,060	50.96%	78,230	48.58%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Tabel 3.48
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perkawinan menurut Umur Tahun 2019

KELOMPOK UMUR	STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
15-19	481	381	79.21%	99	20.58%
20-24	6,476	5,152	79.56%	1,316	20.32%
25-29	17,216	12,018	69.81%	5,177	30.07%
30-34	20,958	13,015	62.10%	7,909	37.74%
35-39	24,564	14,416	58.69%	10,108	41.15%
40-44	22,105	12,463	56.38%	9,613	43.49%
45-49	19,360	10,792	55.74%	8,542	44.12%
50-54	17,331	9,485	54.73%	7,836	45.21%
55-59	13,339	6,754	50.63%	6,567	49.23%
60-64	9,729	4,700	48.31%	5,020	51.60%
65-69	6,529	2,793	42.78%	3,726	57.07%
70-74	3,266	1,175	35.98%	2,087	63.90%
>=75	3,638	981	26.97%	2,653	72.92%
JUMLAH	164,992	94,125	57.05%	70,653	57.05%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.49
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perkawinan menurut Umur Tahun 2018

KELOMPOK UMUR	STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
15-19	439	316	71.98%	121	27.56%
20-24	6,472	4,275	66.05%	2,190	33.84%
25-29	16,752	9,649	57.60%	7,061	42.15%
30-34	20,915	11,007	52.63%	9,815	46.93%
35-39	24,454	12,697	51.92%	11,605	47.46%
40-44	21,135	10,887	51.51%	10,117	47.87%
45-49	19,529	10,000	51.21%	9,426	48.27%
50-54	16,562	8,448	51.01%	8,044	48.57%
55-59	12,970	6,190	47.73%	6,730	51.89%
60-64	9,401	4,246	45.17%	5,110	54.36%
65-69	5,870	2,392	40.75%	3,449	58.76%
70-74	3,087	1,041	33.72%	2,035	65.92%
>=75	3,452	912	26.42%	2,526	73.17%
JUMLAH	161,038	82,060	50.96%	78,229	48.58%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Apabila kita cermati pada Tabel 3.46, Tahun 2019 penduduk Kota Sukabumi yang berstatus Kawin dan memiliki Akta Perkawinan atau Surat kawin sebanyak 94.125 (57,05%) dari 164.992 penduduk yang berstatus kawin. Keadaan tersebut dikarenakan banyak penduduk yang sudah menikah, akan tetapi tidak melampirkan akta perkawinan atau surat kawin pada saat melaporkan peristiwa kependudukannya.

Sedangkan pada Tahun 2018, penduduk Kota Sukabumi yang berstatus kawin dan memiliki Akta Perkawinan atau Surat Kawin sebanyak 82.060 (50,96%) dari 161.308 penduduk yang berstatus kawin.

3.4.5 Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian atau surat cerai merupakan legalitas hukum status perkawinan seseorang yang telah berpisah dengan pasangan perkawinannya.

Apabila kita cermati pada Tabel 3.50 di bawah ini, Tahun 2019 penduduk Kota Sukabumi yang berstatus cerai mati/hidup dan memiliki Akta Perceraian/Surat Cerai atau Surat Kematian pasangan perkawinannya sebanyak 2.892 (12,20%) dari 23.705 penduduk yang berstatus cerai mati/hidup.

Keadaan tersebut terjadi karena banyak penduduk yang sudah bercerai/berpisah dengan pasangan hidupnya, akan tetapi tidak melaporkan peristiwa kependudukannya.

Sedangkan pada Tahun 2018, penduduk Kota Sukabumi yang berstatus cerai dan memiliki Akta Perceraian atau Surat Cerai sebanyak 2.032 (9,05%) dari 22.462 penduduk yang berstatus perkawinannya cerai.

Adanya peningkatan kesadaran masyarakat Kota Sukabumi untuk melegitimasi status perceraian melalui jalur hukum dengan memiliki akta otentik berupa Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Tabel 3.50
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perceraian menurut Kecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	GUNUNGPUYUH	3,138	863	27.50	2,275	72.50
2	CIKOLE	4,822	628	13.02	4,194	86.98
3	CITAMIANG	3,847	441	11.46	3,406	88.54
4	WARUDOYONG	4,258	226	5.31	4,032	94.69
5	BAROS	2,397	277	11.56	2,120	88.44
6	LEMBURSITU	2,784	226	8.12	2,558	91.88
7	CIBEUREUM	2,459	231	9.39	2,228	90.61
	JUMLAH	23,705	2,892	12.20	20,813	87.80

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.51
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perceraian menurut Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	GUNUNGPUYUH	2,925	660	22.56	2,265	77,44
2	CIKOLE	4,586	405	8.83	4,181	91,17
3	CITAMIANG	3,757	323	8.60	3,434	91,40
4	WARUDYONG	3,918	118	3.01	3,800	96,99
5	BAROS	2,261	181	8.01	2,080	91,99
6	LEMBURSITU	2,676	164	6.13	2,512	93,87
7	CIBEUREUM	2,339	181	7.74	2,158	92,26
	JUMLAH	22,462	2,032	9.05	20,430	90,95

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

Tabel 3.52
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perceraian menurut Umur Tahun 2019

KELOMPOK UMUR	STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
15-19	3	0	0.00	3	100.00
20-24	82	38	46.34	44	53.66
25-29	340	182	53.53	158	46.47
30-34	714	330	46.22	384	53.78
35-39	1,273	402	31.58	871	68.42
40-44	1,667	380	22.80	1,287	77.20
45-49	2,034	381	18.73	1,653	81.27
50-54	2,588	330	12.75	2,258	87.25
55-59	2,857	263	9.21	2,594	90.79
60-64	3,054	213	6.97	2,841	93.03
65-69	2,815	170	6.04	2,645	93.96
70-74	2,206	101	4.58	2,105	95.42
>=75	4,072	102	2.50	3,970	97.50
JUMLAH	23,705	2,892	12.20	20,813	87.80

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 3.53
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perceraian menurut Umur Tahun 2018

KELOMPOK UMUR	STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
15-19	5	2	40	3	60
20-24	67	28	41.79	39	58,21
25-29	326	143	43.87	183	56,13
30-34	701	224	31.95	477	68,05
35-39	1.260	317	25.16	943	74,84
40-44	1.580	254	16.08	1.326	83,92
45-49	2.028	295	14.55	1.733	85,45
50-54	2.420	229	9.46	2.191	90,54
55-59	2.803	183	6.53	2.620	93,47
60-64	2.898	138	4.76	2.760	95,24
65-69	2.509	100	3.99	2.409	96,01
70-74	2.066	56	2.71	2.010	97,29
>=75	3.799	63	1.66	3.736	98,34
JUMLAH	22.462	2.032	9.05	20.430	90,95

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018

BAB IV KUALITAS PENDUDUK

4.1 Indikator Kesehatan

4.1.1 Kelahiran (*Fertilitas*)

Kelahiran (*Fertilitas*) merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator kelahiran ini berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.

Tinggi rendahnya kelahiran dalam suatu penduduk erat hubungannya dan tergantung pada struktur umur, banyaknya perkawinan, umur pada waktu kawin, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita serta pembangunan ekonomi. Kelahiran yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya adalah Lahir Mati. Lahir Mati adalah kematian yang terjadi pada bayi yg dilahirkan (setelah cukup masanya umur kandungan 7 bulan atau lebih) tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Jumlah kelahiran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
di Kota Sukabumi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN								
		LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
		HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	GUNUNG PUYUH	432	1	433	404	3	407	836	4	840
2	CIKOLE	623	0	623	492	0	492	1.115	0	1.115
3	CITAMIANG	499	0	499	466	1	467	965	1	966
4	WARUDOYONG	530	2	532	459	0	459	989	2	991
5	BAROS	317	0	317	323	0	323	640	0	640
6	LEMBURSITU	416	2	418	369	3	372	785	5	790
7	CIBEUREUM	375	3	378	371	0	371	746	3	749
JUMLAH (KAB/KOTA)		3.192	8	3.200	2.884	7	2.891	6.076	15	6.091

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2019

Lahir-Mati di Kota Sukabumi pada tahun 2019 sejumlah 15 kasus (0,25%) dari jumlah kelahiran sebanyak 6.091 kelahiran. Jika kita lihat per kecamatan, maka lahir mati terbanyak terdapat di Kecamatan Lembursitu yaitu sebanyak 5 kasus (33,33%) dari jumlah lahir mati sebanyak 15 kasus. Sedangkan Kecamatan Baros dan Kecamatan Cikole merupakan kecamatan yang tidak terdapat lahir mati.

Dari data tersebut di atas dapat dihitung Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) dan Angka Fertilitas Umum

a. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka Kelahiran Kasar (*CBR*) menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Rumusnya :

$$CBR = \frac{B}{P} \times k$$

Keterangan :

B = Jumlah kelahiran pada tahun tertentu

(Berdasarkan data Dinkes, Jumlah Kelahiran tahun 2019 adalah 6.091)

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

(Berdasarkan SIAK, Jumlah Penduduk Bulan Juli 2019 adalah 348.131)

k = 1000

CBR Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah :

$$6.091 / 348.131 \times 1000 = 17,5$$

Angka ini mengandung arti bahwa dari 1000 penduduk terjadi kelahiran 18 kelahiran.

b. Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*)

Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*) menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi (15 - 49 tahun) dalam suatu periode tertentu.

Rumusnya :

$$GFR = \frac{B}{Pf (15 - 49)} \times k$$

Keterangan:

B = Jumlah Kelahiran

Pf (15-49) = Jumlah Wanita umur 15 – 49 Tahun

k = 1000

GFR Kota Sukabumi pada Tahun 2019 adalah :

$$\frac{6.091}{85.112} \times 1000 = 71,56$$

Angka ini menunjukkan bahwa dari 1000 wanita usia 15 - 49 tahun terdapat 72 kelahiran.

c. Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Yang dimaksud Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya.

Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur (*ASFR*). Dalam buku ini *TFR* belum bisa disajikan karena data banyaknya kelahiran menurut umur dari wanita yang berada dalam kelompok umur belum bisa diketahui.

4.1.2 Kematian (*Mortalitas*)

Kematian (*Mortalitas*) merupakan salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk.

Kematian seseorang dalam suatu penduduk dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tinggi rendahnya angka kematian akan dipengaruhi oleh struktur umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial ekonomi serta keadaan lingkungan dimana mereka berada (misalnya taraf hidup dan perawatan kesehatan).

a. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu.

b. Angka Kematian menurut Umur (*Age Specific Death Rate*)

Angka Kematian menurut Umur (*Age Specific Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama.

Angka ini sebenarnya bisa menunjukkan hasil yang lebih teliti dibandingkan kematian kasar, akan tetapi di dalam buku ini belum bisa disajikan karena data banyaknya kematian menurut umur yang berada dalam kelompok umur belum ada.

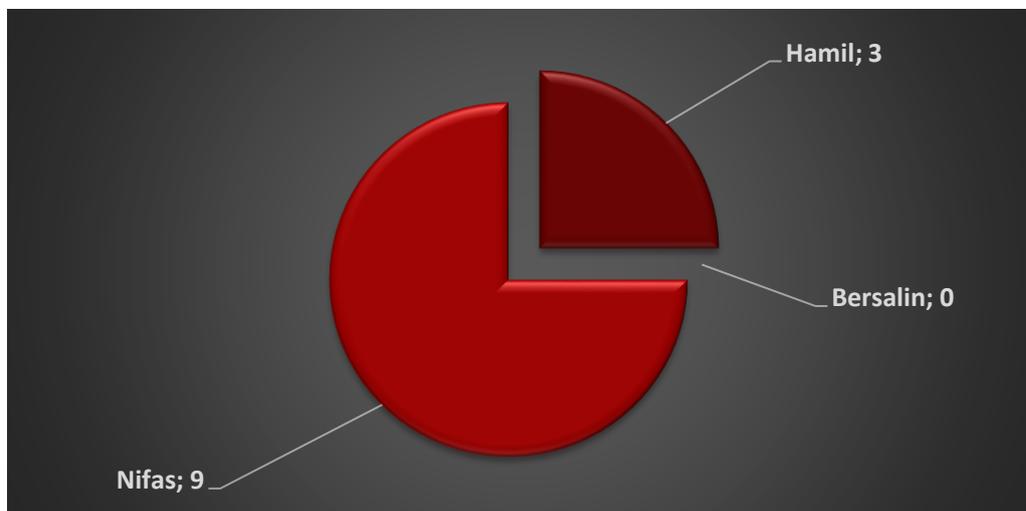
c. Angka Kematian Ibu/AKI (*Maternal Mortality Rate*)

Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan masa nifas dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental. (*Kementerian Kesehatan RI, 2010*).

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Kesehatan dalam menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*).

Kasus kematian ibu di Kota Sukabumi Pada Tahun 2019 sebanyak 12 kasus. Berdasarkan periode meninggal, kematian ibu ini 3 kasus terjadi pada masa kehamilan, 9 kasus pada masa nifas dan 0 kasus terjadi pada masa persalinan. Kematian ibu berdasarkan periode meninggal di Kota Sukabumi pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 4.1 di bawah ini :

Grafik 4.1
Kematian Ibu Berdasarkan Periode Meninggal
di Kota Sukabumi Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2019

Sementara berdasarkan penyebab, kematian ibu terdiri dari 7 kasus penyebab langsung dan 5 kasus penyebab tidak langsung. Penyebab langsung, disebabkan oleh Perdarahan sebanyak 5 kasus (41,7%) dan 2 kasus Hipertensi (16,7%). Sedangkan penyebab tidak langsung diakibatkan karena TB sebanyak 2 kasus (16,7%), PNH (Paroximal Nocturnal Hemoragik)/kelainan darah sebanyak 1 kasus (8,3%) dan penyebab lain sebanyak 2 kasus (16,7%).

Hal penting lain yang menjadi penyebab kematian ibu dikenal dengan 3 Terlambat (3T), yaitu terlambat merujuk, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat ditangani di fasilitas kesehatan.

Kasus kematian ibu Tahun 2019 tersebar hampir di seluruh kecamatan, hanya di Kecamatan Gunung puyuh yang tidak terdapat Kematian Ibu. Berikut kasus kematian ibu berdasarkan wilayah kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2019 :

Grafik 4.2
Kematian Ibu Berdasarkan Wilayah Kecamatan
di Kota Sukabumi Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Dikarenakan jumlah kelahiran hidup di Kota Sukabumi tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup, maka digunakan nomenklatur Jumlah Kematian Ibu. Tetapi jika dikonversikan ke dalam Angka Kematian Ibu, dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2019 sebanyak 6.076 kelahiran hidup, maka Angka Kematian Ibu di Kota Sukabumi adalah $197,5/100.000$ Kelahiran Hidup. Capaian ini melebihi angka kematian ibu yang ditargetkan oleh nasional ($102/100.000$ Kelahiran Hidup).

d. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Bayi relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita.

Penyebab kematian pada masa neonatus dan bayi pada tahun 2019 diantaranya adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 7 kasus (30%), Asfiksia 6 kasus (26%), Kelainan kongenital 3 kasus (13%), Diare 5 kasus (22%), Pneumoni 2 (9%) Dan penyebab tidak langsung 11 (32,3%)

Terjadinya kematian sebagian besar terjadi di fasilitas kesehatan. Di RS terjadi sebanyak 22 kasus (64,7%), di Puskesmas 3 kasus (8,8%), di Rumah sebanyak 5 kasus (14,7%), dan di perjalanan menuju fasilitas rujukan sebanyak 4 kasus (11,7%).

Jumlah kasus kematian bayi di Kota Sukabumi pada tahun 2019 ada 34 kasus kematian bayi. Terdiri dari Kematian pada masa neonatal (0-28 hari) yaitu sebanyak 17 kasus kematian, dan Kematian pada masa bayi usia 1-11 bulan yaitu sebanyak 17 kasus.

Berdasarkan angka di atas, jumlah kematian bayi sebanyak 34 kasus kematian dengan jumlah kelahiran hidup 6076. Maka Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019 di Kota Sukabumi yaitu 5,60/1000 Kelahiran Hidup. Capaian angka kematian bayi ini memenuhi target tahun 2019, yaitu <24 per 1000 Kelahiran Hidup. Capaian inipun telah memenuhi target nasional <32/1000 Kelahiran Hidup dan target provinsi <22,8/1000 Kelahiran Hidup.

Kasus kematian bayi tersebar hampir di semua wilayah kecamatan. Kematian terbanyak yaitu di wilayah Kecamatan Cikole sebanyak 8 kasus, Kecamatan Lembursitu 7 kasus, Kecamatan Cibereum 7 kasus, Kecamatan Citamiang 5 kasus, Kecamatan Warudoyong 4 kasus, Kecamatan Gunung puyuh sebanyak 3 kasus. Hanya di Kecamatan Baros yang tidak terdapat kematian bayi. Berikut grafik kematian bayi berdasarkan wilayah kecamatan :

Grafik 4.3
Kematian Bayi Berdasarkan Wilayah Kecamatan
di Kota Sukabumi Tahun 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2019

d. Kematian Anak Balita dan Angka Kematian Balita (AKABA)

Kematian Anak Balita adalah kematian balita umur 12-59 bulan di suatu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Angka ini dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif AKABA > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan < 20 rendah.

Jika angka kematian bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan digunakan untuk pengembangan perencanaan, maka angka kematian balita berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus yang terjadi di Kecamatan Citamiang. Dengan jumlah Kelahiran Hidup 6.076, maka Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2019 di Kota Sukabumi yaitu 0,16/1000 Kelahiran Hidup.

4.2 Indikator Pendidikan

4.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah prosentasi penduduk umur 15 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengikuti kalimat sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Angka Melek huruf (AMH) berguna untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf dan menunjukkan kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menunjukkan pula kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media, sehingga Angka Melek Huruf (AMH) ini dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap perkembangan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi pada prinsipnya sudah mencapai 100%, namun bila dilihat dari indikator penelitian masih terdapat sekitar 0,0001% penduduk yang belum melek huruf, hal ini dikarenakan terdapat :

- a. penduduk yang sudah berusia lanjut namun mereka melek huruf arab dan dapat membaca angka, serta sudah tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar baik di lembaga formal maupun informal dikarenakan usia yang sudah lanjut.
- b. penduduk berkebutuhan khusus baik dari segi fisik maupun mental yang tidak memungkinkan mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

4.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai pada wilayah tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

Rumus :

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah murid ditingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100\%$$

* Keterangan

$$\text{APK Paud} = \frac{\text{Jumlah murid Paud}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 Tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa PAUD Seluruhnya			Jumlah Penduduk 5-6 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Gunung Puyuh	726	686	1,412	907	854	1,761	80.0	80.4	80.2
2.	Cikole	1,096	1,063	2,159	1,140	1,045	2,185	96.1	101.8	98.8
3.	Citamiang	684	739	1,423	1,012	889	1,901	67.6	83.1	74.9
4.	Warudoyong	772	770	1,542	1,190	1,051	2,241	64.9	73.2	68.8
5.	Baros	584	582	1,166	690	677	1,367	84.6	86.0	85.3
6.	Lembursitu	524	491	1,015	735	786	1,521	71.3	62.5	66.7
7.	Cibeureum	784	737	1,521	882	811	1,693	88.9	90.8	89.8
	Jumlah	5,170	5,068	10,238	6,556	6,113	12,669	78.9	82.9	80.8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2019

Pada Tabel 4.2 tampak bahwa APK Kota Sukabumi Tahun 2019 secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan PAUD adalah (80,8%). Capaian ini sudah termasuk dalam kategori baik mengingat pada jenjang ini tidak termasuk kedalam jenjang pendidikan wajib belajar.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/ sederajat

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Penduduk 7-12 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1.	Gunung Puyuh	2,588	2,414	5,002	419	402	821	95	99	96
2.	Cikole	4,066	4,026	8,092	397	381	778	122	121	122
3.	Citamiang	3,526	3,245	6,771	304	281	585	119	117	118
4.	Warudoyong	2,770	2,547	5,317	283	272	555	85	83	84
5.	Baros	2,246	2,024	4,270	218	202	420	113	108	110
6.	Lembursitu	1,994	1,953	3,947	538	560	1,098	92	93	93
7.	Cibeureum	2,387	2,201	4,588	92	96	188	96	99	98
	Jumlah	19,577	18,410	37,987	2,251	2,194	4,445	103	103	103

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2019

Pada Tabel 4.3 tampak bahwa APK Kota Sukabumi Tahun 2019 secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat berada diatas 100% (103%) hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk Kota Sukabumi terhadap pendidikan jenjang SD/ sederajat pada umumnya tinggi, dan jika kita lihat per Kecamatan capaian APK tertinggi di atas 100%, terdapat 3 Kecamatan yaitu kecamatan Cikole (122%), Kecamatan Citamiang (118%), dan Kecamatan Baros (110%). Hal ini disebabkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan tersebut, termasuk siswa perbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Seluruh			Jumlah Penduduk 13-15 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1.	Gunung Puyuh	1,234	1,094	2,328	1,419	1,260	2,679	87	87	87
2.	Cikole	3,015	3,121	6,136	1,728	1,614	3,342	174	193	184
3.	Citamiang	1,925	1,888	3,813	1,469	1,458	2,927	131	129	130
4.	Warudoyong	1,440	1,325	2,765	1,655	1,542	3,197	87	86	86
5.	Baros	607	562	1,169	1,006	974	1,980	60	58	59
6.	Lembursitu	1,114	1,080	2,194	1,089	996	2,085	102	108	105
7.	Cibeureum	732	760	1,492	1,273	1,186	2,459	57	64	61
	Jumlah	10,067	9,830	19,897	9,639	9,030	18,669	104	109	107

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2019

Pada Tabel 4.4 tampak bahwa APK Kota Sukabumi Tahun 2019 secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat berada di atas 100% (107%), hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk Kota Sukabumi terhadap pendidikan jenjang SMP/ sederajat pada umumnya tinggi.

Jika kita lihat per Kecamatan APK tertinggi terdapat di 3 (tiga) kecamatan dua tertinggi yaitu Kecamatan Cikole dan Kecamatan Citamiang, dapat dilihat dengan capaian APK di atas 100% (Kecamatan Cikole 184% dan Kecamatan Citamiang (130%), hal ini menunjukkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan, termasuk siswa di luar kota.

Untuk capaian APK yang berada di bawah 100% yaitu berada di wilayah Baros (59,0%), dan Cibeureum (61%). Hal ini disebabkan jumlah lembaga pendidikan jenjang SMP/ sederajat tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan terdapat anak/ siswa yang bersekolah diluar wilayah kecamatan tersebut.

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/Sederajat

Pada Tabel 4.5 di bawah ini, tampak bahwa APK Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat berada di atas 100% (162%). Hal ini menunjukkan tingkat perhatian penduduk terhadap pendidikan jenjang SMA/ sederajat pada umumnya tinggi. Apabila dilihat per Kecamatan APK tertinggi terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Cikole (309%) dan Kecamatan Citamiang (254%). Hal ini menunjukkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan, termasuk siswa di luar Kota Sukabumi.

APK terendah berada di Kecamatan Baros (31%) dan Kecamatan Warudoyong (77%). Hal ini karena di kecamatan tersebut keberadaan lembaga pendidikan jenjang SMA/ sederajat tidak seimbang dengan jumlah penduduk, bahkan untuk Kecamatan Baros lembaga pendidikan jenjang SMA/ sederajat sangat minim, selain itu dikerenakan penyebaran siswa jenjang SMA/ sederajat tersebut banyak yang masuk ke wilayah perkotaan.

Tabel 4.5

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	APK
1	Gunung Puyuh	2.844	2.158	132
2	Cikole	8.412	2.722	309
3	Citamiang	5.742	2.262	254
4	Warudoyong	1.922	2.485	77
5	Baros	492	1.586	31
6	Lembursitu	2.924	1.791	163
7	Cibeureum	1.370	1.586	86
	Jumlah	23.706	14.590	162

Sumber Data : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2019

4.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100% karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Rumus :

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah murid kelp usia sekolah di jenjang pendidikan tententu}^*}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}^*} \times 100\%$$

*) Keterangan :

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajad usia 7 - 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajad usia 13 - 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajad usia 16 - 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajad usia 19 - 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 - 24 tahun}} \times 100\%$$

a. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/ sederajat

Tabel 4.6

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/ sederajat

No	Kecamatan	Jumlah Siswa 7-12 Tahun			Jumlah Penduduk 7-12 Tahun			APM		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1.	Gunung Puyuh	2,343	2,162	2,343	419	402	821	86	88	87
2.	Cikole	3,736	3,666	3,736	397	381	778	112	111	111
3.	Citamiang	3,244	2,978	3,244	304	281	585	109	107	108
4.	Warudoyong	2,539	2,322	2,539	283	272	555	78	76	77
5.	Baros	2,057	1,841	2,057	218	202	420	103	98	101
6.	Lembursitu	1,851	1,772	1,851	538	560	1,098	86	84	85
7.	Cibeureum	2,197	1,985	2,197	92	96	188	89	89	89
	Jumlah	17,967	16,726	17,967	2,251	2,194	4,445	95	94	94

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2019

Tabel 4.6 di atas terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Sukabumi Tahun 2019 jenjang SD/ Sederajat berdasarkan data, capaiannya di atas 90% (94%), hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan sangat baik karena capaian APM hampir mendekati 100%.

Bila dilihat berdasarkan wilayah, maka Kecamatan Cikole menempati posisi APM yang paling tinggi yaitu diatas 111%, karena jumlah murid SD (7-12) tahun melebihi jumlah penduduk usia jenjang Sekolah Dasar (7-12) tahun dikarenakan banyaknya siswa dari luar kecamatan Cikole.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/ sederajat

Tabel 4.7
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/ sederajat

No	Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Penduduk			APM		
		Seluruh 13-15 Tahun			13-15 Tahun			Gender		L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	
1.	Gunung Puyuh	987	855	987	1,419	1,260	2,679	70	68	69
2.	Cikole	2,409	2,473	2,409	1,728	1,614	3,342	139	153	146
3.	Citamiang	1,405	1,362	1,405	1,469	1,458	2,927	96	93	95
4.	Warudoyong	1,132	1,016	1,132	1,655	1,542	3,197	68	66	67
5.	Baros	495	432	495	1,006	974	1,980	49	44	47
6.	Lembursitu	845	796	845	1,089	996	2,085	78	80	79
7.	Cibeureum	492	504	492	1,273	1,186	2,459	39	43	41
	Jumlah	7,766	7,437	7,766	9,639	9,030	18,669	81	82	81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2019

Tabel 4.7 di atas terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Sukabumi Tahun 2019 jenjang SMP/Sederajat capaiannya adalah 81%. Apabila dilihat berdasarkan wilayah, maka Kecamatan Cikole menempati posisi APM yang paling tinggi yaitu 146%.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/ sederajat

Tabel 4.8
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/ sederajat

No	Kecamatan	Jumlah Siswa 16-18 Tahun	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	APM
1	Gunung Puyuh	2.056	2.158	95
2	Cikole	6.766	2.722	249
3	Citamiang	4.539	2.262	201
4	Warudoyong	1.037	2.485	42
5	Baros	376	1.586	24
6	Lembursitu	2.421	1.791	135
7	Cibeureum	1.075	1.586	68
	Jumlah	18.270	14.590	125

Sumber Data : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2019

Tabel 4.8 di atas terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Sukabumi jenjang SMA/Sederajat sangat tinggi yaitu 125%. Angka ini sudah relatif sangat baik dimana sudah terdapat kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan dan jenjang SMA sederajat merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jenjang SMP dan SD.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah, maka Kecamatan Cikole menempati posisi APM paling tinggi yaitu 249%.

d. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Didefinisikan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 Tahun dan maksimal 15 Tahun.

Angka RLS akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Angka RLS akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran per Kapita.

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sukabumi berdasarkan data penduduk usia 18 tahun ke atas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

No	Ijazah Pendidikan Formal yang Dimiliki	Jumlah Penduduk 18 keatas yang sedang sekolah / telah berijazah	Lama Masa Pendidikan yang Dihabiskan	Jumlah Penduduk X Lama Pendidikan yang Dihabiskan
1.	Tidak sekolah	1.039	-	-
2.	Tidak Tamat SD	5.095	-	-
3.	TAMAT SD	68.913	6	413,478
4.	TAMAT SMP	49.090	9	441,810
5.	TAMAT SMA	90.205	12	1,082,460
6.	TAMAT D1	1,140	13	14,820
7.	TAMAT D2	1,711	14	23,954
8.	TAMAT D3	7.243	15	108,645
9.	TAMAT S1	17.126	16	274,016
10.	TAMAT S2	1.471	18	26,478
11.	TAMAT S3	62	21	1,302
	Jumlah Penduduk	243,095		2,386,963
			RLS	9.82

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2019

Tabel 4.9 di atas menunjukkan di Kota Sukabumi Angka Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena Angka RLS pada Tahun 2018 sebesar 9,79 tahun menjadi 9,82 di Tahun 2019.

4.3 Indikator Keluarga Berencana

4.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri yang isterinya berusia 15-49 tahun dan masih haid atau pasangan suami-isteri yang isterinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau isteri sudah berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

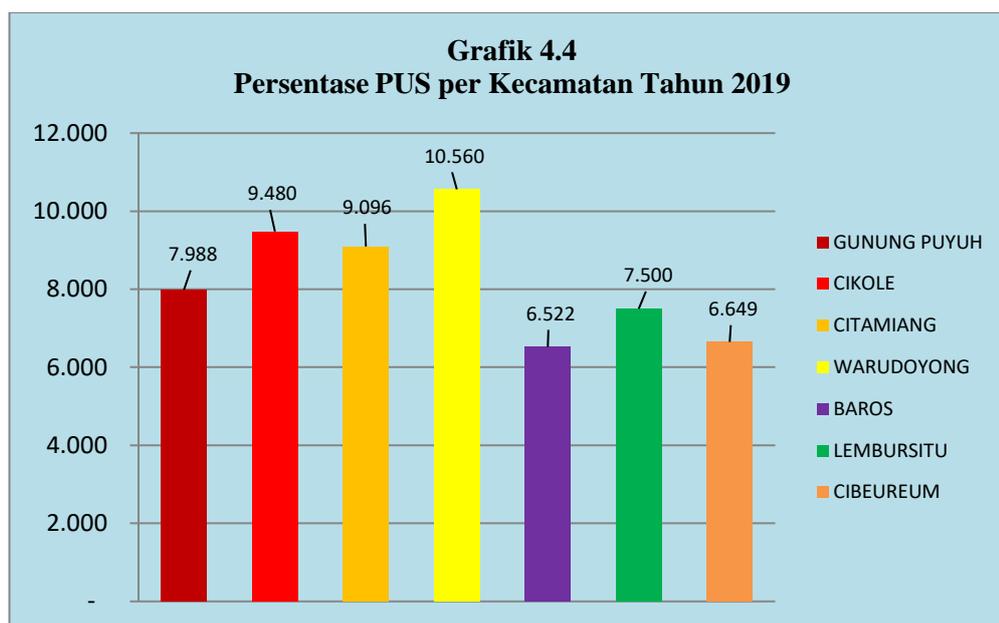
Jumlah PUS di Kota Sukabumi pada Tahun 2019 mencapai 57.695 pasangan, dimana jumlah PUS terbanyak berada di Kecamatan Warudoyong yaitu 10.460 pasangan dan jumlah PUS paling sedikit berada di Kecamatan Baros yaitu 6.522 pasangan.

Gambaran rinci jumlah PUS di Kota Sukabumi terlihat pada Tabel 4.10 dan Grafik 4.4 berikut ini:

Tabel 4.10
Data Pasangan Usia Subur (PUS)

NO	KECAMATAN	PUS	%
1.	GUNUNG PUYUH	7,988	13.82
2.	CIKOLE	9,480	16.40
3.	CITAMIANG	9,096	15.74
4.	WARUDOYONG	10,560	18.27
5.	BAROS	6,522	11.28
6.	LEMBURSITU	7,500	12.98
7.	CIBEUREUM	6,649	11.50
JUMLAH		57,795	

Sumber : Dinas PPKBPPPAPM Kota Sukabumi Tahun 2019



4.3.2 Peserta KB Aktif

Peserta Keluarga Berencana (akseptor KB) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) dimana salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program.

Yang dimaksud dengan Peserta KB Aktif (PA) atau lebih dikenal dengan *Current User (CU)* adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi modern. Dalam pengertian ini tidak termasuk cara-cara kontrasepsi tradisional, seperti pijat urut, jamu dan juga tidak termasuk cara-cara KB alamiah seperti pantang berkala, senggama terputus dan sebagainya. Kontrasepsi adalah cara atau alat yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan).

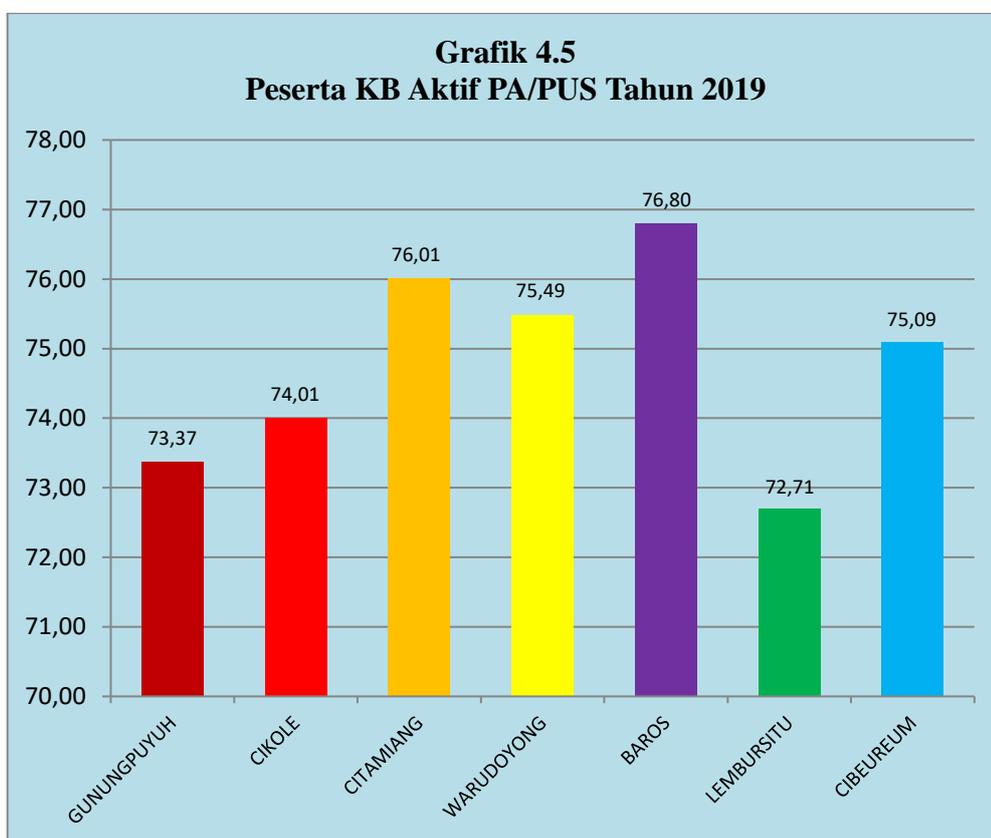
Untuk mengetahui kondisi prevalensi peserta KB Aktif Kota Sukabumi pada Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan Grafik 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.11
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi

No	KECAMATAN	PUS	MKJP					NON MKJP				TOTAL	CPR (PA/PUS)	% MKJP
			IUD	MOW	MOP	IMPLAN	JML	KONDOM	SUNTIK	PIL	JML			
1	GUNUNGPUYUH	7,988	920	230	20	630	1,800	185	2,591	1,285	4,061	5,861	73.37	30.71
2	CIKOLE	9,480	1,277	222	36	567	2,102	226	3,019	1,669	4,914	7,016	74.01	29.96
3	CITAMIANG	9,096	906	197	31	614	1,748	177	3,357	1,632	5,166	6,914	76.01	25.28
4	WARUDROYONG	10,460	1,031	211	29	1,062	2,333	272	3,573	1,718	5,563	7,896	75.49	29.55
5	BAROS	6,522	629	97	15	446	1,187	71	2,506	1,245	3,822	5,009	76.80	23.70
6	LEMBURSITU	7,500	611	209	19	791	1,630	209	2,512	1,102	3,823	5,453	72.71	29.89
7	CIBEUREUM	6,649	593	115	8	336	1,052	118	2,719	1,104	3,941	4,993	75.09	21.07
KOTA SUKABUMI		57,695	5,967	1,281	158	4,446	11,852	1,258	20,277	9,755	31,290	43,142	74.78	27.47

Ket.: 1. PUS = Pasangan Usia Subur 2. MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 3. CPR = Contraceptive Prevalence Rate

Sumber : Dinas PPKBPPAPM Kota Sukabumi Tahun 2019



Pada Tabel 4.11 dan Grafik 4.5 di atas memperlihatkan prevalensi Peserta KB Aktif (CU/PUS) di Kota Sukabumi Tahun 2019 mencapai 43.142/57.695 x 100% = 74,78%.

4.3.3 Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB

PUS bukan peserta KB terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu hamil (H), ingin anak segera (IAS), ingin anak ditunda (IAT), dan tidak ingin anak lagi (TIAL). Pengertian PUS bukan peserta KB “hamil” adalah PUS yang istrinya sedang hamil; “ingin anak segera” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan masih menginginkan anak dengan batas waktu kurang dari dua tahun; “ingin anak tunda” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan menginginkan kelahiran anak ditunda dengan batas waktu dua tahun lebih; “tidak ingin anak lagi” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan tidak ingin anak.

Salah satu dimensi dari PUS bukan peserta KB dikenal istilah *Unmet Need* yang khusus diperuntukkan untuk kategori “ingin anak tunda” dan “tidak ingin anak lagi”. Sesuai dengan pengertiannya, *Unmet Need* adalah proporsi wanita usia subur dalam status menikah yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak dan atau mereka yang *Unmet Need* karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk, tidak menginginkan tambahan anak (membatasi kelahiran).

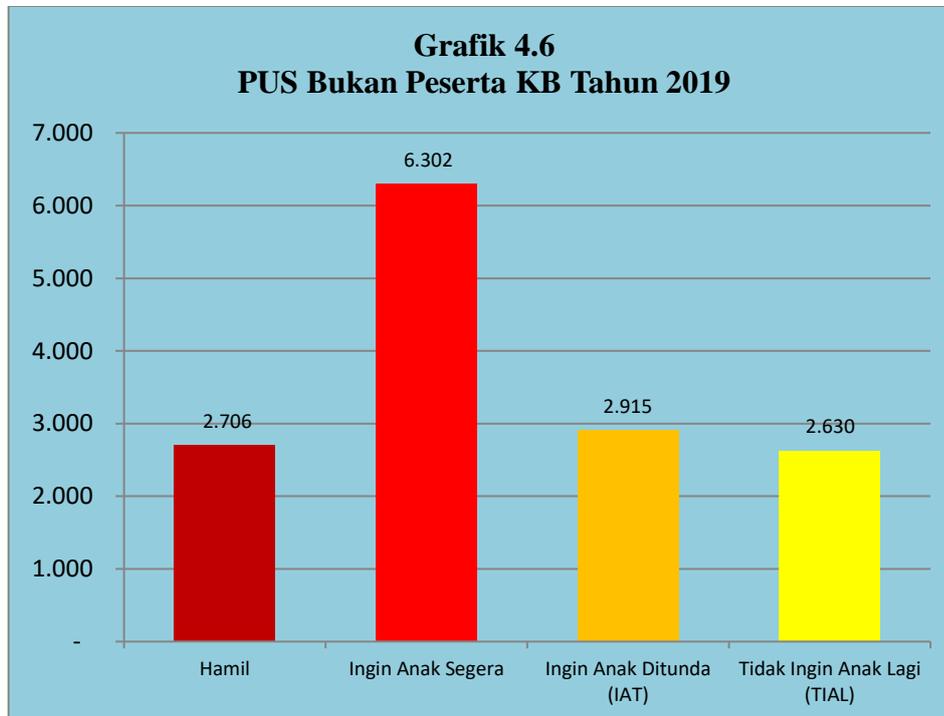
Tabel 4.12
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB

NO	KECAMATAN	PUS	BUKAN PESERTA KB				JML	UNMETNEED	
			Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Ditunda (IAT)	Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)		(IAT+TIAL)	%
1	GUNUNGPUYUH	7.988	414	949	414	350	2.127	764	9,56
2	CIKOLE	9.480	415	876	593	580	2.464	1.173	12,37
3	CITAMIANG	9.096	539	832	423	388	2.182	811	8,92
4	WARUDROYONG	10.460	375	916	722	551	2.564	1.273	12,17
5	BAROS	6.522	298	604	302	309	1.513	611	9,37
6	LEMBURSITU	7.500	342	1.282	242	181	2.047	423	5,64
7	CIBEUREUM	6.649	323	843	219	271	1.656	490	7,37
KOTA SUKABUMI		57.695	2.706	6.302	2.915	2.630	14.553	5.545	9,61

Ket.: 1. PUS = Pasangan Usia Subur

2. UNMETNEED = PUS yang tidak punya anak lagi atau menjarangkan kelahiran atau menunda kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi

Sumber : Dinas PPKBPPPAPM Kota Sukabumi Tahun 2019



Pada Tabel 4.12 dan Grafik 4.6 di atas, memperlihatkan potret kondisi PUS bukan peserta KB di Kota Sukabumi. Jumlah PUS bukan peserta KB pada Tahun 2019 mencapai angka 14.553 atau 25,22% dari total PUS yang ada di Kota Sukabumi dimana jumlah kategori PUS bukan peserta KB “ingin anak segera” mendominasi wilayah ini dengan angka mencapai 5.545 atau 9,61% dari total jumlah PUS bukan peserta KB.

Di lain sisi, *Unmet Need* Kota Sukabumi pada Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 10,45% di Tahun 2018 dan 12,72% di Tahun 2016. Walaupun capaian *unmet need* di tahun 2019 mengalami penurunan, namun tetap tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena selama ini fokus penggarapan sasaran program KB lebih ditekankan kepada akseptor KB aktif dalam konteks alih cara dari metode kontrasepsi jangka pendek ke metode kontrasepsi jangka panjang, Manajemen data sasaran yang belum memadai dari para PKB/PLKB dan TPD, serta minimnya wawasan dan pola pikir masyarakat tentang program KB khususnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi.

Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang masih harus diupayakan tingkat penurunannya untuk semakin mendorong atau meningkatkan pencapaian target realisasi peserta KB aktif (CU/PUS) di Kota Sukabumi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang intensif tentang program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) kepada masyarakat menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan ini.

4.3.4 Tahapan Keluarga

Tahapan keluarga sedianya digunakan sebagai cerminan kualitas keluarga. Semakin tinggi tahapannya maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Ada 5 tahapan keluarga menurut BKKBN yaitu :

1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

2) Keluarga Sejahtera Tahap I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

3) Keluarga Sejahtera Tahap II

Yaitu keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) juga telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

Tabel 4.13
Tahapan Keluarga

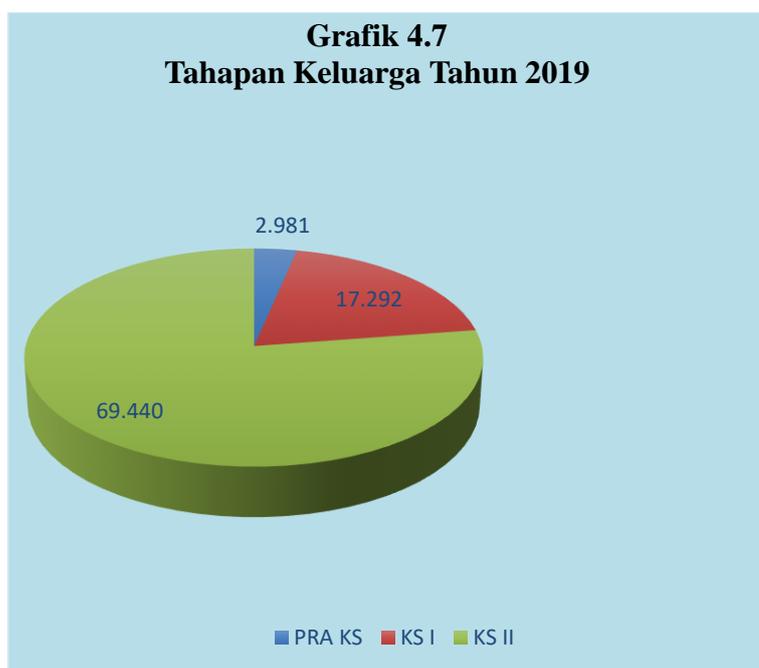
NO	KECAMATAN	TAHAPAN KELUARGA			JUMLAH
		PRA KS	KS I	KS II	
1	GUNUNGPUYUH	624	2,728	9,403	12,755
2	CIKOLE	422	2,212	14,422	17,056
3	CITAMIANG	447	2,953	10,228	13,628
4	WARUDOYONG	274	3,029	11,847	15,150
5	BAROS	199	2,294	6,833	9,326
6	LEMBURSITU	675	1,446	8,835	10,956
7	CIBEUREUM	340	2,630	7,872	10,842
KOTA SUKABUMI		2,981	17,292	69,440	89,713

Ket.: KS = Keluarga Sejahtera

Sumber: Dinas PPKBPPPAPM Kota Sukabumi Tahun 2019

Pada Tabel 4.13 di atas, memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan keluarga di Kota Sukabumi. Keluarga Pra Sejahtera, sebagai cerminan tahapan keluarga terendah di Kota Sukabumi mencapai angka 2.981 atau 3,32% dari jumlah tahapan keluarga sebanyak 89.713.

Kemudian apabila melihat kondisi per wilayah, maka jumlah keluarga Pra Sejahtera terbanyak berada di Kecamatan Lembursitu sebanyak 675 atau 22,64% dari total jumlah keluarga Pra Sejahtera yang ada di Kota Sukabumi. Sedangkan jumlah keluarga Pra Sejahtera terendah berada di Kecamatan Baros sebanyak 199 atau 6,68% dari total jumlah keluarga Pra Sejahtera yang ada di Kota Sukabumi.



Selanjutnya lebih jelas dalam Grafik 4.7 di atas, tergambar secara umum kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Sukabumi. Persentase terendah dari tahapan keluarga sejahtera adalah keluarga Pra Sejahtera yang diwakili oleh bagian warna biru tua sebanyak 3,32% dari total Jumlah keluarga di Kota Sukabumi dan persentase tertinggi yaitu pada tahapan Keluarga Sejahtera II sebanyak 77,40% dari total jumlah keluarga yang digambarkan dengan bagian warna hijau.

Sesuai dengan pengertian dari tahapan keluarga sejahtera II, maka kondisi ini mengandung makna bahwa sebagian besar keluarga di Kota Sukabumi merupakan keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) juga telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

4.4 Indikator Tenaga Kerja

Di negara-negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi, dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

4.4.1 Jumlah Pencari Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15–64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu, juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial

Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 348.945 jiwa, dengan jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun) sebesar 235.521 jiwa, sehingga diketahui persentase tenaganya sebesar 67,50%. Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula. Berdasarkan jenis kelamin diketahui proporsi penduduk laki-laki usia kerja (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yaitu 50,01%.

a) Angkatan Kerja

1. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran.

Tabel 4.14
Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2019

UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
15-19	13.808	13.036	26.844
20-24	14.464	14.297	28.761
25-29	13.875	13.819	27.694
30-34	13.265	12.791	26.056
35-39	14.183	14.245	28.428
40-44	12.654	12.601	25.255
45-49	11.051	11.317	22.368
50-54	9.992	10.549	20.541
55-59	8.162	8.390	16.552
60-64	6.405	6.617	13.022
JUMLAH	117.859	117.662	235.521

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

2. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.

Tabel. 4.15
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Tahun 2019

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Grand Total
1	Mengurus Rumah Tangga	-	82.958	82.958
2	Pelajar/Mahasiswa	37827	32.963	70.790
3	Pensiunan	2401	1.092	3.493
Grand Total		40.228	117.013	157.241

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

3. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tabel 4.16
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Grand Total
5	Pegawai Negeri Sipil	3.886	2.698	6.584
6	Tentara Nasional Indonesia	336	1	337
7	Kepolisian RI	879	56	935
8	Perdagangan	3.666	548	4.214
9	Petani/Pekebun	1.054	37	1.091
10	Peternak	49	5	54
11	Nelayan/Perikanan	18		18
12	Industri	69	10	79
13	Konstruksi	117	1	118
14	Transportasi	440	1	441
15	Karyawan Swasta	21.490	8.763	30.253
16	Karyawan BUMN	760	264	1.024
17	Karyawan BUMD	196	103	299
18	Karyawan Honorer	1.226	724	1.950
19	Buruh Harian Lepas	25.377	629	26.006
20	Buruh Tani/Perkebunan	887	80	967
21	Buruh Nelayan/Perikanan	23		23
22	Buruh Peternakan	129	8	137
23	Pembantu Rumah Tangga	3	272	275
24	Tukang Cukur	37	1	38

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Grand Total
25	Tukang Listrik	62		62
26	Tukang Batu	151		151
27	Tukang Kayu	684	1	685
28	Tukang Sol Sepatu	12		12
29	Tukang Las/Pandai Besi	166		166
30	Tukang Jahit	221	94	315
31	Tukang Gigi	4		4
32	Penata Rias	7	30	37
33	Penata Busana	2	4	6
34	Penata Rambut	12	23	35
35	Mekanik	308		308
36	Seniman	101	9	110
37	Tabib	8	3	11
38	Paraji		28	28
39	Perancang Busana	1	1	2
40	Penterjemah	1		1
41	Imam Mesjid	37		37
42	Pendeta	32		32
43	Pastor	54	3	57
44	Wartawan	254	16	270
45	Ustadz/Mubaligh	19	16	35
46	Juru Masak	1		1
47	Promotor Acara	1		1
60	Wali Kota	1		1
61	Wakil Wali Kota	1		1
62	Anggota DPRD Provinsi	32	5	37
63	Anggota DPRD Kab/Kota	147	80	227
64	Dosen	1.023	1.822	2.845
65	Guru	1		1
66	Pilot	39	4	43
67	Pengacara	4	6	10
68	Notaris	21	1	22
69	Arsitek	5	5	10
70	Akuntan	37	5	42
71	Konsultan	86	110	196
72	Dokter		257	257
73	Bidan	203	354	557
74	Perawat	3	272	275

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Grand Total
75	Apoteker	17	19	36
76	Psikiater/Psikolog		2	2
78	Penyiar Radio		1	1
79	Pelaut	6	5	11
80	Peneliti	101		101
81	Sopir	8	2	10
82	Pialang	3.118		3.118
84	Pedagang	7	1	8
85	Perangkat Desa	3.431	544	3.975
87	Biarawati	4		4
88	Wiraswasta		35	35
89	Lainnya	21.948	2.177	24.125
Grand Total		93.039	19.875	112.914

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

b) Bukan Tenaga Kerja

Penduduk berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak termasuk dalam tenaga kerja, adalah mereka yang bersekolah, ibu rumah tangga, dan lainnya.

Tabel 4.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Bukan Tenaga Kerja Tahun 2019

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	14.845	13.767	28.612
5-9	16.226	15.140	31.366
10-14	15.730	14.815	30.545
70-75	2.836	3.465	6.301
>75	3.169	3.924	7.093
JUMLAH	52.806	51.111	103.917

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Angkatan kerja adalah kelompok pekerja dalam suatu pekerjaan. Hal ini umumnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang bekerja untuk satu perusahaan atau industri, tetapi juga dapat diterapkan pada wilayah geografis seperti kota, negara bagian, negara, dan lain-lain. Tenaga kerja dari suatu negara baik yang bekerja dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK (atau tingkat kegiatan ekonomi, EAR), adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok

mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Ini juga berarti semua orang yang tersedia untuk bekerja.

Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Dari bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 2 itu jelas bahwa pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat karena hal ini berhubungan dengan usaha masyarakat untuk mendapat penghasilan. info lowongan dapat diakses melalui Web: <https://ayokitakerja.kemnaker.go.id>

TABEL 4.18
IHKTISAR PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR BERDASARKAN AKI, DITEMPATKAN DAN
DIRINCI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019

TINGKAT PENDIDIKAN	TOTAL YANG TERDAFTAR		SISA S/D BULAN INI		YANG TERDAFTAR		DI TEMPATKAN		PENEMPATAN		DITEMPATKAN	
	S/D BULAN INI		YANG BELUM DI TEMPATKAN		BULAN INI		BULAN INI		S/D BULAN LALU		S/D BULAN INI	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I	II		IV		V		VI		VII		VIII	
1. SD												
- BH dan Tidak Tamat SD												
- SD	28	89	8	13	4	5	3	4	17	72	20	76
2. SETINGKAT SLTP	194	397	82	127	11	18	10	13	102	257	112	270
3. SETINGKAT SLTA	2044	1856	301	-98	32	35	38	41	1705	1913	1743	1954
4. SETINGKAT SMK					31	21						
5.. PMI JANUARI s.d. NOVEMBE							3	3	68	99	71	102
6. BKK SMKN 3							41	202	0	0	41	202
BKK SMKN 4							232	0	0	0	232	0
7. - D.I/D.II D III / Akademi.	105	135	35	58	6	10	3	7	67	70	70	77
8. - SARJANA	199	265	77	118	7	18	6	8	116	139	122	147
JUMLAH	2570	2742	503	218	91	107	336	278	2075	2550	2411	2828
JUMLAH = L + P	5312		721		198		614		4625		5239	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019

Kendala ketenagakerjaan di Kota Sukabumi :

1. Masalah pokok ketenagakerjaan di Kota Sukabumi, saat ini adalah ketidakseimbangan antara penyediaan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja.
2. Dampak utama yang akan terjadi adalah membengkaknya jumlah pengangguran dan masalah sosial yang menyertainya.
3. Kesempatan kerja yang terbatas.
4. Rendahnya kualitas angkatan kerja.
5. Rendahnya kualitas angkatan kerja ini diindikasikan dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SMA/SMK Sederajat ke bawah.
6. Pasar kerja lebih banyak membutuhkan pencari Kerja yang telah Berkompetensi.

Langkah-langkah :

- 1) Proses pembuatan kartu kuning secara online pembuatan kartu kuning secara online.
- 2) Masuk ke website Dinas Ketenagakerjaan yaitu <http://infokerja.naker.go.id>.

Program penempatan ke Luar Negeri :

1. G to G / PEMAGANGAN LUAR NEGERI;
2. P3MI;
3. Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri / Magang atau BKK;
4. TKI Mandiri melalui LPK/LKP.

4.5 Indikator Sosial

4.4.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pembangunan di bidang kependudukan sangat terkait dengan permasalahan di bidang sosial. Apalagi Kota Sukabumi sebagai kota perdagangan dan jasa akan sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya urbanisasi yang ujung-ujungnya membawa pengaruh signifikan terhadap tumbuhnya permasalahan-permasalahan sosial.

Tabel 4.19
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Tahun 2019

NO	JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH
1	Lansia terlantar	orang	30
2	WRSE	orang	-
3	WPS	orang	15
4	Gepeng	orang	50
5	Anjal	orang	30
6	Disabilitas	orang	365
7	Orang Terlantar	orang	148
8	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa dan E WARONG	orang	360
9	Korban Bencana	orang	357
10	Pelayanan Kemiskinan melalui UPT SLRT	orang	11.421
11	Eks Warga Binaan LP	orang	-
12	Eks NAPZA	orang	-
13	Psikotik	orang	-
14	ODHA	orang	-
15	Kaum Minoritas	orang	-
16	Penerima Manfaat BPNT	orang	11.215
17	Bantuan Langsung untuk keluarga sangat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	orang	12.315
18	Pelatihan Keluarga Miskin dan KPM	orang	100
19	Penerima Rastrada (200 KK)	orang	300
20	Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	orang	3
JUMLAH		orang	35.705

Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2019 sebagai berikut :

1) Indikator Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

Dari table di atas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dinas yang telah di tetapkan.

Semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sudah cukup efektif dan dalam rangka pencapaian target, hal ini terlihat dari capain target yang melampaui target yang telah ditetapkan, dimana ada tahun 2019 populasi PMKS sebanyak 99.242 jiwa ditargetkan dapat ditangani sebanyak 45% nya (44.659 jiwa) dan melalui program dan kegiatan yang telah diaplikasikan dapat terealisasi penanggulangan PMKS sebesar 54,84% (54.426 jiwa) sehingga persentase capaian kinerja nya sebesar 121,86% dan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu dapt dilihat mengalami kenaikan capaian kinerja dimana tahun 2017 tingkat capaiannya sebesar 104,45%. Capaian tersebut dicapai melalui beberapa program yang menembak indikator tersebut yaitu : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

- 2) Indikator Persentase Warga Miskin yang dilayani melalui UPT. SLRT REPEH RAPIH

Persentase warga miskin yang dilayani oleh UPT. SLRT REPEH RAPIH pada tahun 2019 terealisasi sebesar 100%, pelayanan berupa pemberian surat rekomendasi sosial bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan dari program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Tabel 4.20
Rekapitulasi Pelayanan UPT SLRT REPEH RAPIH
Tahun 2019

No.	Bidang	Jumlah
A	Kesehatan	
	Jamkesda	1.420
	Rekomendasi BPJS	1.643
	Integrasi Jamkesda ke PBI	4.332
B	Pendidikan	
	SKTM PIP/Kartu cerdas/ Bidikmisi	3.762
C	Sosial	
	Surat Rekomendasi sosial	282
TOTAL		11.421

Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019

- 3) Indikator Perentase korban bencana yang mendapatkan bantuan cepat tanggap darurat, pada tahun 2019 terealisasi 100%, artinya korban bencana yang terjadi di Kota Sukabumi semuanya telah ditangani sesuai prosedur serta mendapatkan bantuan berupa natura dari Dinas Sosial.

Sasaran ini dicapai dengan 5 (tujuh) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
 Dengan Kegiatan :
 - a. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
 - b. Koordinasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kajian Pemetaan Data Masyarakat Miskin yang terintegrasi)
- d. Pengolahan Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS
 - b. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev Lansia Terlantar)
 - d. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
3. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma
 - a. Pendidikan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma
 - b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dengan kegiatan :
 - a. Pemantauan dan Pendistribusian Raskin bagi kelompok masyarakat
 - b. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Tabel 4.21
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun						
		Satuan	2018			2019		
			T	R	C	T	R	C
1.	Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	10	10	100	10	10	100

2.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	10	10	100	10	10	100
-----------	--	----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial pada tahun 2019.

Untuk indikator pertama yaitu persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang mendapat bantuan telah tercapai 100% dimana pada tahun anggaran 2019, terdapat kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasaran panti asuhan/jompo dimana output dari kegiatan tersebut adalah pemberian bantuan peralatan dapur bagi 5 panti.

Sedangkan untuk indikator Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, untuk tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 100%, WKSBM merupakan bagian dari Masyarakat untuk membantu menekan laju pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang Program Pemerintah dalam kegiatan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM). Kegiatan/kelompok berbasis masyarakat ini yang punya kepedulian, rasa kebersamaan/kekeluargaan, swadaya dan gotong royong, saat ini di Kota Sukabumi masih berjalan dengan dasar sukarela yang mana diharapkan bantuan dari pihak manapun untuk membantu keberlangsungan WKSBM ini.

1) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

a. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo

Pada kegiatan ini diserahkan peralatan tidur kepada penghuni panti

2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Tabel 4.22
Rekapitulasi Pendataan PMKS di Kota Sukabumi Tahun 2019

KODE	PMKS	KECAMATAN							JUMLAH
		GN. PUYUH	CI KOLE	CITA MIANG	WARU DOYONG	BA ROS	LEM BUR SITU	CI BEU REUM	
A1	Anak Balita Terlantar	1	20	5	0	0	1	23	50
A2	Anak Terlantar	34	66	22	9	22	20	84	257
A3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	1	4	1	0	6	0	10	22
A4	Anak Jalanan	7	11	3	0	1	4	1	27
A5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	12	28	2	1	14	25	24	106
A6	Anak yang Menjadi Tindak Kekerasan / Diperlakukan salah	2	3	9	0	26	0	1	41
A7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4	3	2	0	1	11	7	28
A8	Lanjut Usia Terlantar	184	318	74	151	277	372	438	1814
A9	Penyandang Disabilitas	124	104	76	53	102	143	148	750
A10	Tuna Susila	1	0	2	0	0	0	3	5
A11	Gelandangan	2	8	1	5	2	3	4	25
A12	Pengemis	14	9	6	11	4	3	9	56
A13	Pemulung	29	35	28	0	11	14	23	140
A14	Kelompok Minoritas	3	1	3	0	0	0	67	74
A15	Bekas Warga Binaan LP	28	16	2	0	1	0	9	56
A16	Orang Dengan HIV / Aids (ODHA)	1	0	1	0	0	0	2	4
A17	Korban Penyalahgunaan Napza	15	2	4	0	1	1	3	26
A18	Korban Trafficking	1	1	0	0	2	0	0	4
A19	Korban Tindak Kekerasan	2	0	0	0	0	0	1	3
A20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1	0	0	0	0	2	19	22
A21	Korban Bencana Alam	1	21	4	0	3	0	4	33
A22	Korban Bencana Sosial	0	9	13	5	0	7	42	74
A23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	405	231	146	61	325	90	237	1495
A24	Fakir Miskin	2245	610	967	182	364	346	621	5335
A25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	21	11	9	0	0	10	12	63
JUMLAH TOTAL		3138	1511	1380	478	1162	1052	1792	10510

Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019

4.6 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk yang permanen atau dikenal dengan migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (Migrasi Internal) atau batas politik/negara (Migrasi International) atau dengan cara lain migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*Push Factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*Pull Factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain.

Mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya dorong disebut migrasi keluar, sedangkan mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya tarik disebut migrasi masuk.

4.6.1 Angka Migrasi Masuk

Angka Migrasi Masuk (*In Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

$$\begin{aligned} \text{Rumus : AMM} &= \frac{\text{Banyaknya migran masuk}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{7.685}{348.945} \times 1000 = 22.02 \end{aligned}$$

Angka migrasi masuk Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah 22.02. Hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 22 - 23 jiwa. Keadaan tersebut berbeda dengan Tahun 2018 adalah 21.85, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 21 - 22 jiwa.

Apabila dilihat migrasi penduduk masuk ke Kota Sukabumi per kecamatan Tahun 2019 paling banyak ke Kecamatan Cikole sebanyak 1.411 jiwa atau 18,36% dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Baros sejumlah 841 jiwa atau 10,94%. Sedangkan pada Tahun 2018 paling banyak ke Kecamatan Cikole sebanyak 1.398 jiwa atau 18,55% dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Cibeureum sejumlah 912 jiwa atau 12,14%. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.23 dan Tabel 4.24 di bawah ini.

Tabel 4.23
Migrasi Penduduk Masuk Kota Sukabumi Tahun 2019

NO	KECAMATAN TUJUAN	DATANG DALAM PROV	DATANG LUAR PROV	JUMLAH MIGRAN MASUK
1	GUNUNG PUYUH	835	273	1,108
2	CIKOLE	1,134	277	1,411
3	CITAMIANG	969	219	1,188
4	WARUDOYONG	1,009	264	1,273
5	BAROS	711	130	841
6	LEMBURSITU	723	165	888
7	CIBEUREUM	787	189	976
	JUMLAH	6,168	1,517	7,685

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 4.24
Migrasi Penduduk Masuk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

KELOMPOK UMUR	JUMLAH MIGRAN MASUK
00-04	410
05-09	710
10-14	625
15-19	674
20-24	1.106
25-29	1.350
30-34	831
35-39	684
40-44	483
45-49	315
50-54	185
55-59	131
60-64	80
65-69	38
70-74	29
>=75	34
JUMLAH	7.685

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 4.25
Migrasi Penduduk Masuk Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2019

KODE	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH MIGRASI MASUK
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1,197
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1,925
3	PELAJAR/MAHASISWA	1,554
4	PENSIUNAN	33
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	96
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	16
7	KEPOLISIAN RI	26
8	PERDAGANGAN	22
9	PETANI/PEKEBUN	36
10	PETERNAK	-
11	NELAYAN/PERIKANAN	-
12	INDUSTRI	4
13	KONSTRUKSI	3
14	TRANSPORTASI	1
15	KARYAWAN SWASTA	1,108
16	KARYAWAN BUMN	23
17	KARYAWAN BUMD	3
18	KARYAWAN HONORER	60
19	BURUH HARIAN LEPAS	559
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	13
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	-
22	BURUH PETERNAKAN	2
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1
24	TUKANG CUKUR	1
25	TUKANG LISTRIK	-
26	TUKANG BATU	-
27	TUKANG KAYU	2
28	TUKANG SOL SEPATU	-
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	1
30	TUKANG JAHIT	2
31	TUKANG GIGI	-
32	PENATA RIAS	-
33	PENATA BUSANA	-

KODE	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH MIGRASI MASUK
34	PENATA RAMBUT	
35	MEKANIK	-
36	SENIMAN	-
37	TABIB	-
38	PARAJI	-
39	PERANCANG BUSANA	-
40	PENTERJEMAH	-
41	IMAM MESJID	-
42	PENDETA	-
43	PASTOR	-
44	WARTAWAN	2
45	USTADZ/MUBALIGH	4
46	JURU MASAK	-
47	PROMOTOR ACARA	-
48	ANGGOTA DPR-RI	-
49	ANGGOTA DPD	-
50	ANGGOTA BPK	-
51	PRESIDEN	-
52	WAKIL PRESIDEN	-
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	-
54	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	-
55	DUTA BESAR	-
56	GUBERNUR	-
57	WAKIL GUBERNUR	-
58	BUPATI	-
59	WAKIL BUPATI	-
60	WALI KOTA	-
61	WAKIL WALI KOTA	-
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	-
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	-
64	DOSEN	5
65	GURU	66
66	PILOT	-
67	PENGACARA	1
68	NOTARIS	-

KODE	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH MIGRAN MASUK
69	ARSITEK	1
70	AKUNTAN	-
71	KONSULTAN	1
72	DOKTER	11
73	BIDAN	16
74	PERAWAT	34
75	APOTEKER	6
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	1
77	PENYIAR TELEVISI	3
78	PENYIAR RADIO	-
79	PELAUT	-
80	PENELITI	-
81	SOPIR	34
82	PIALANG	-
83	PARANORMAL	-
84	PEDAGANG	70
85	PERANGKAT DESA	-
86	KEPALA DESA	-
87	BIARAWATI	3
88	WIRASWASTA	722
89	LAINNYA	-
	JUMLAH	7,685

4.6.2 Angka Migrasi Keluar

Angka Migrasi Keluar (*Out Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.

Rumus :

$$AMK = \frac{\text{Banyaknya migran keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

$$= \frac{7.282}{348.945} \times 1000 = 20.87$$

Angka migrasi keluar Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah 20.87, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 20 – 21 jiwa. Keadaan tersebut masih sama dengan Tahun 2018 yaitu 20.60, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 20 – 21 jiwa.

Apabila dilihat migrasi keluar penduduk Kota Sukabumi per kecamatan Tahun 2019 paling banyak dari Kecamatan Cikole sebanyak 1.390 jiwa atau 19,09% dan yang paling sedikit dari Kecamatan Baros sebanyak 775 jiwa atau 10,64%. Sedangkan pada Tahun 2018 paling banyak dari Kecamatan Cikole sebanyak 1.557 jiwa atau 20,90% dan yang paling sedikit dari Kecamatan Baros sebanyak 735 jiwa atau 9,87%.

Tabel 4.26
Migrasi Penduduk Keluar Kota Sukabumi
Tahun 2019

NO	KECAMATAN TUJUAN	PINDAH KELUAR KOTA	PINDAH KELUAR PROVINSI	JUMLAH MIGRAN KELUAR
1	GUNUNG PUYUH	836	315	1,151
2	CIKOLE	1,060	330	1,390
3	CITAMIANG	843	227	1,070
4	WARUDOYONG	1,049	263	1,312
5	BAROS	591	184	775
6	LEMBURSITU	655	124	779
7	CIBEUREUM	666	139	805
	JUMLAH	5,700	1,582	7,282

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 4.27
Migrasi Penduduk Keluar Menurut Alasan Kependudukan
Tahun 2019

NO	ALASAN	JUMLAH
1	PEKERJAAN	24
2	PENDIDIKAN	23
3	KEAMANAN	72
4	KESEHATAN	108
5	PERUMAHAN	6,810
6	KELUARGA	217
7	LAIN-LAIN	28
	JUMLAH	7,282

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

Tabel 4.28
Migrasi Penduduk Keluar Menurut Kelompok Umur
Tahun 2019

KELOMPOK_UMUR	JUMLAH MIGRAN MASUK
00-04	445
05-09	648
10-14	523
15-19	514
20-24	851
25-29	1.259
30-34	957
35-39	679
40-44	489
45-49	303
50-54	207
55-59	165
60-64	95
65-69	62
70-74	43
>=75	42
JUMLAH	7.282

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

4.6.3 Angka Migrasi Netto

Angka Migrasi Netto (*Net Migration*) yaitu selisih antara migrasi masuk dan keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi netto negatif.

Angka migrasi netto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dengan migran keluar per 1000 penduduk daerah tersebut

Rumus :

$$\begin{aligned}
 MN &= \frac{\text{Banyaknya migran masuk} - \text{banyaknya migran keluar}}{\text{banyaknya penduduk}} \times 1000 \\
 &= \frac{7.685 - 7.282}{348.945} \times 1000 = 1.15
 \end{aligned}$$

Angka Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah 1.15. Hal ini berarti selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar dari 1000 penduduk Tahun 2019 adalah 1 - 2 jiwa.

Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah Migrasi Netto Positif, karena jumlah migrasi masuk 22,02% lebih besar dibandingkan migrasi keluar 20,87%.

Jadi Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah Migrasi Netto Positif sebanyak 1 - 2 jiwa.

Tabel 4.29
Migrasi Netto Penduduk
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	MIGRASI NETTO
1	GUNUNG PUYUH	49,165	1,108	1,151	(0.87)
2	CIKOLE	64,198	1,411	1,390	0.33
3	CITAMIANG	54,234	1,188	1,070	2.18
4	WARUDOYONG	59,667	1,273	1,312	(0.65)
5	BAROS	37,575	841	775	1.76
6	LEMBURSITU	41,207	888	779	2.65
7	CIBEUREUM	42,899	976	805	3.99
	JUMLAH	348,945	7,685	7,282	1.15

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kota Sukabumi dengan luas wilayah 48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 348.945 jiwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu, dan Cibeureum.
2. Jumlah dan persebaran penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,40%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10,77%), persebaran penduduk tersebut masih sama keadaannya dengan Tahun 2018 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,51%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10,75%), dan Tahun 2017 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,63%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10,57%).
3. Kepadatan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 348.945 jiwa dibandingkan Luas Wilayah 48 km² adalah 7.270 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 7.270 s.d 7.271 jiwa. Apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Tahun 2018 adalah 7.183 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 7.183 s.d 7.184 jiwa dan kepadatan penduduk Tahun 2017 adalah 6.997 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.997 s.d 6.998 jiwa, terjadi peningkatan kepadatan penduduk sebanyak 87 jiwa.
4. Struktur umur penduduk Kota Sukabumi tergolong Penduduk Produktif. Data Tahun 2019 menunjukkan sebesar 67,50% (Kota Maju bukan Kota Berkembang) karena kurang dari 30% penduduk Kota Sukabumi berumur <15 tahun (Penduduk Muda) yaitu 25,4% dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih yaitu 6,56%.

5. *Sex Rasio* Kota Sukabumi Tahun 2019 yaitu 101,75 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 s.d 102 penduduk laki-laki. Keadaan tersebut masih sama dengan *Sex Rasio* Tahun 2018 dan Tahun 2017 yaitu 101,75 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 s.d 102 penduduk laki-laki.
6. Jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 sebesar 348.945 jiwa, sebanyak 335.726 jiwa atau 96,21% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,08%, Agama Katholik sebesar 0,92%, Agama Budha 0,78%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Aliran Kepercayaan sebesar 0%. Keadaan tersebut tidak jauh berbeda proporsinya dengan Tahun 2018 sebesar 344.797 jiwa, sebanyak 331.614 jiwa atau 96,18% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,06%, Agama Katholik sebesar 0,94%, Agama Budha 0,80%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Aliran Kepercayaan sebesar 0% dan Tahun 2017 sebesar 335.866 jiwa, sebanyak 322.672 jiwa atau 96,07% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,08%, Agama Katholik sebesar 0,98%, Agama Budha 0,85%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Aliran Kepercayaan sebesar 0%.
7. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kota Sukabumi sebanyak 107.336 (97,61%) dari jumlah 109.963 Kepala Keluarga. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 kepemilikan KK sebanyak 104.381 (98,54%) dari jumlah 105.927 Kepala Keluarga dan Tahun 2017 kepemilikan KK sebanyak 100.500 (97,99%) dari jumlah 102.563 Kepala Keluarga. Ratio atau perbandingan Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 3,17 menunjukkan setiap Kepala Keluarga rata-rata berisi 3-4 jiwa.
8. Kepemilikan KTP Tahun 2019 sebesar 242.092 (98,44%) dari wajib KTP sebanyak 245.916, sedangkan prosentasi kepemilikan KTP pada Tahun 2018 sebesar 240.331 (99,08%) dari wajib KTP sebanyak 242.565 orang dan Tahun 2017 sebesar 213.844 (91,12%) dari wajib KTP sebanyak 234.689.
9. Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kota Sukabumi Tahun 2019 sebanyak 109.952 jiwa (99,16%) dari jumlah penduduk Usia 0-18 Tahun sebanyak 110.881 jiwa. Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun sudah melebihi dari target Nasional sebesar 85%.

10. Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2019 yang berstatus kawin dan memiliki Akta Perkawinan atau Surat Kawin sebanyak 94.125 (57,05%) dari 164.992 penduduk yang berstatus kawin. Keadaan tersebut dikarenakan banyak penduduk yang sudah menikah, akan tetapi tidak melampirkan akta perkawinan atau surat kawin pada saat melaporkan peristiwa kependudukannya.
11. Penduduk Kota Sukabumi yang berstatus cerai mati/hidup dan memiliki Akta Perceraian/Surat Cerai atau Surat Kematian pasangan perkawinannya sebanyak 2.892 (12,20%) dari 23.705 penduduk yang berstatus cerai mati/hidup. Keadaan tersebut terjadi karena banyak penduduk yang sudah bercerai/berpisah dengan pasangan hidupnya, akan tetapi tidak melaporkan peristiwa kependudukannya.
12. Ibu Bersalin di Kota Sukabumi Tahun 2019 sebanyak 6.021, sehingga terdapat Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) sebesar 17,46 yang menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk terjadi kelahiran 18 kelahiran, sedangkan Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*) sebesar 65,17 yang menunjukkan bahwa dari 1000 wanita usia 15-49 tahun terdapat 65 kelahiran.
13. Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi pada prinsipnya sudah mencapai 100%, namun bila dilihat dari indikator penelitian masih terdapat sekitar 0,0001% penduduk yang belum melek huruf, hal ini dikarenakan terdapat penduduk yang sudah berusia lanjut namun mereka melek huruf arab dan dapat membaca angka, serta sudah tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar baik di lembaga formal maupun informal dikarenakan usia yang sudah lanjut.
14. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Sukabumi pada Tahun 2019 mencapai 57.695 pasangan, dimana jumlah PUS terbanyak berada di Kecamatan Warudoyong yaitu 10.460 pasangan dan jumlah PUS paling sedikit berada di Kecamatan Baros yaitu 6.522 pasangan.
15. Prevalensi Peserta KB Aktif (CU/PUS) Tahun 2019 mencapai 74,78%.
16. Jumlah PUS bukan peserta KB pada Tahun 2019 mencapai angka 14.553 atau 25,22% dari total PUS yang ada di Kota Sukabumi dimana jumlah kategori PUS bukan peserta KB “ingin anak segera” mendominasi wilayah ini dengan angka mencapai 5.545 atau 9,61% dari total jumlah PUS bukan peserta KB.

17. Lahir-Mati di Kota Sukabumi pada tahun 2019 sejumlah 15 kasus (0,25%) dari jumlah kelahiran sebanyak 6.091 kelahiran. Jika kita lihat per kecamatan, maka lahir mati terbanyak terdapat di Kecamatan Lembursitu yaitu sebanyak 5 kasus (33,33%) dari jumlah lahir mati sebanyak 15 kasus.
18. Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi sudah mencapai 100%.
19. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat berada di atas 100% (162%).
20. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Sukabumi jenjang SMA/ Sederajat sangat tinggi yaitu 125%. Angka ini sudah relatif sangat baik dimana sudah terdapat kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan dan jenjang SMA sederajat merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jenjang SMP dan SD.
21. Kesejahteraan keluarga di Kota Sukabumi Tahun 2019 terlihat pada Keluarga Pra Sejahtera sebagai cerminan tahapan keluarga terendah mencapai angka 2.981 atau 3,32% dari jumlah tahapan keluarga sebanyak 89.713.
22. Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 348.945 jiwa, dengan jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun) sebesar 235.521 jiwa, sehingga diketahui persentase tenaga kerjanya sebesar 67,50%. Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula.
23. Persentase penanganan PMKS pada tahun 2019 mencapai 54,68%, pencapaian kinerja ini melampaui target yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2018 penanganan PMKS yang ditargetkan adalah sebanyak 40%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan penanganan PMKS tahun 2018 mencapai 41,78%, persentase penanganan PMKS tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
24. Angka migrasi masuk Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah 22,02. Hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 22 - 23 jiwa. Keadaan tersebut berbeda dengan Tahun 2018 adalah 21,85, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 21 - 22 jiwa.

25. Angka migrasi keluar Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah 20,87, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 20 – 21 jiwa. Keadaan tersebut masih sama dengan Tahun 2018 yaitu 20,60, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 20 – 21 jiwa.
26. Angka Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah 1.15. Hal ini berarti selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar dari 1000 penduduk Tahun 2019 adalah 1 - 2 jiwa. Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah Migrasi Netto Positif, karena jumlah migrasi masuk 22,02% lebih besar dibandingkan migrasi keluar 20,87%, sehingga terdapat Migrasi Netto Positif sebanyak 1 - 2 jiwa.

5.2 Saran

1. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi serta perumusan perencanaan anggaran kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi harus menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) semesteran yang telah dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Melaksanakan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Sukabumi dan terus diadakan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dengan dinas/instansi terkait melalui Perjanjian Kerja Sama dalam Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang bersumber dari *Data Warehouse* yang ada di Kementerian Dalam Negeri.
3. Memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, sehingga diperoleh akurasi dan validasi data kependudukan yang sangat berguna untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran oleh pemangku kebijakan di Kota Sukabumi.